



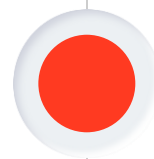
REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN

RAPAT KERJA MENTERI LHK DENGAN KOMISI IV DPR RI

Jakarta, 26 Agustus 2021

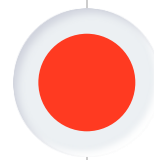


DAFTAR ISI



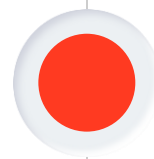
Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat APBN
TA 2020

04



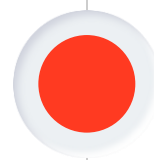
Evaluasi Anggaran
Tahun 2021

14



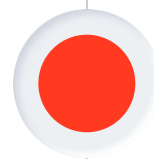
RKA K/L Tahun 2022

92



Usulan Program yang
akan didanai DAK
Berdasarkan Kriteria
Teknis Komisi IV DPR RI

122



Penutup

135

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undangan Yth Pimpinan DPR RI, dengan surat Nomor AG/10454/DPR RI/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021, maka Rapat Kerja antara Komisi IV DPR RI dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2021.

Untuk itu dipersiapkan bahan Rapat Kerja mencakup 1) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA. 2020, 2) Evaluasi Anggaran Tahun 2021, 3) RKA K/L Tahun 2022, dan 4) Usulan program-program yang akan didanai oleh DAK berdasarkan kriteria teknis dari Komisi. Untuk Isu-isu Aktual lainnya disajikan dalam bahan terpisah.

Atas pandangan dan masukan Yth Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI kami sampaikan ucapan terima kasih.

Jakarta, 26 Agustus 2021

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BAGIAN 1

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2020



LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Uraian	Catatan	31 DESEMBER 2020			31 DESEMBER 2019
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN	B.1				
1 Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	4.747.429.715.468	5.060.721.667.703	107	5.992.073.615.963
Jumlah Pendapatan		4.747.429.715.468	5.060.721.667.703	107	5.992.073.615.963
BELANJA	B.2				
Belanja Transaksi Kas					
1 Belanja Pegawai	B.2.1.1	1.934.311.714.000	1.786.863.943.993	92	1.937.881.855.722
2 Belanja Barang	B.2.1.2	5.171.629.620.000	4.896.393.714.560	95	6.301.606.081.219
3 Belanja Modal	B.2.1.3	552.897.449.000	512.908.544.375	93	603.552.580.238
Jumlah Belanja		7.658.838.783.000	7.196.166.202.928	94	8.843.040.517.179

(Menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020)

NERACA

Nama Perkiraan	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
	(Rp)	(Rp)
ASET		
ASET LANCAR	1.230.615.750.526	2.687.696.496.280
ASET TETAP	14.546.981.324.697	14.358.538.670.419
PIUTANG JANGKA PANJANG	21.090.322.163	21.210.365.455
ASET LAINNYA	1.668.192.526.599	1.649.341.556.020
JUMLAH ASET	17.466.879.923.985	18.716.787.088.174
KEWAJIBAN	80.742.807.461	13.991.037.526
EKUITAS	17.386.137.116.524	18.702.796.050.648
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	17.466.879.923.985	18.716.787.088.174

(Menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020)

LAPORAN OPERASIONAL (LO)

URAIAN	JUMLAH	
	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
KEGIATAN OPERASIONAL		
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	4.685.465.108.941	5.534.156.949.365
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	8.455.220.396.741	9.251.426.365.874
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(3.769.755.287.800)	(3.717.269.416.509)
KEGIATAN NON OPERASIONAL		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	7.587.141.108	8.721.753.293
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	32.233.986.876	50.910.319.497
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	(24.646.845.768)	(42.188.566.204)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	54.156.267.742	170.209.903.185
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	44.418.327.888	158.678.266.271
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	9.737.939.854	11.531.636.914
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(14.908.905.914)	(30.656.929.290)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	-	-
POS LUAR BIASA		
Pendapatan Luar Biasa	-	-
Beban Luar Biasa	-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	-	-
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(3.784.664.193.714)	(3.747.926.345.799)

(Menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/ defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-lo, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

URAIAN	JUMLAH	
	31 DESEMBER 2020	31 DESEMBER 2019
EKUITAS AWAL	18.702.796.050.648	8.120.392.727.464
SURPLUS/DEFISIT - LO	-3.784.664.193.714	-3.747.926.345.799
KOREKSI YANG	-603.113.069.189	10.832.534.691.419
MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	3.071.118.328.779	3.497.794.977.564
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	-1.316.658.934.124	10.582.403.323.184
EKUITAS AKHIR	17.386.137.116.524	18.702.796.050.648

(Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
- Dalam Laporan Keuangan ini, penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Temuan BPK-RI atas LK Tahun 2020 dan Rencana Tindak Lanjutnya



PENGANTAR

- A. Pemeriksaan BPK-RI atas LK KLHK Tahun 2020 telah selesai dilaksanakan yang ditandai dengan penyampaian LHP BPK-RI. LHP tersebut diserahkan secara langsung oleh Anggota IV BPK-RI kepada Menteri LHK pada tanggal 13 Agustus 2021.
- B. Pemeriksaan dilaksanakan dalam 2 tahap yaitu:
 - 1. Tahap I / Pemeriksaan Interim, dimulai tanggal 17 November 2020 selama 23 hari di Instansi Pusat;
 - 2. Tahap II / Pemeriksaan Terinci, dimulai tanggal 6 Januari 2021 selama 97 hari di Instansi Pusat dan 6 Provinsi; Aceh, Jabar, Kalsel, Kaltim, Sultra dan Maluku.
- C. LHP BPK-RI tersebut berisi 2 hal utama, yaitu:
 - 1. 16 Temuan Pemeriksaan atas SPI & Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan beserta rekomendasi penyelesaian masalahnya.
 - 2. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** sejak Tahun 2017.

PERMASALAHAN PNBP & PIUTANG PNBP

TEMUAN :

1. Pengawasan dan Pengendalian atas Aktivitas Pertambangan di Kawasan Hutan Tanpa Izin Belum Memadai
2. Pembayaran PNBP-PKH oleh Pemegang IPPKH pada Prov. Sultra Belum Tertib
3. Penatausahaan dan Pencatatan PNBP Kehutanan (PSDH, DR dan IIUPH) Belum Sepenuhnya Tertib dan Sesuai Ketentuan
4. Pengendalian atas Pengelolaan Piutang PNBP pada Ditjen PHL dan Ditjen PKTL Belum Memadai

PENJELASAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT :

1. Inventarisasi & verifikasi ulang kepada Pemegang IUP melalui koordinasi dengan Kementerian ESDM dan Pemprov
2. Identifikasi risiko, menyusun/menyempurnakan mekanisme dan regulasi wasdal.
3. Menyusun / mengembangkan / menyempurnakan sistem aplikasi berbasis IT untuk akurasi data
4. Memberikan sanksi kepada pihak internal dan eksternal yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik

PERMASALAHAN BELANJA BARANG & MODAL

TEMUAN :

1. Kegiatan Penyusunan DED Pemb. Persemaian Modern pada Kantor Pusat PDASHL Tidak Sesuai Ketentuan Rp655.017.055
2. Kegiatan PEN Padat Karya Penanaman Mangrove Tidak Sesuai Ketentuan Minimal Rp736.200.320
3. Pelaksanaan Kegiatan RHL Tidak Sesuai Ketentuan (Rp700.897.458,67)
4. Pengawasan Pelaksanaan Pek. Pembangunan Shelter/Rumah Insinerator di Prov. Sumbar Tidak Sesuai Ketentuan dan Jaminan Pelaksanaan (Rp121.385.197) Tidak Dicairkan serta Denda Keterlambatan Rp2.448.286,00 Belum Disetor ke Kas Negara
5. Penanaman RHL P0 Tahun 2020 Tidak Berada pada Lahan Kritis serta Sistem Aplikasi RHL dan Padat Karya Mangrove pada Ditjen PDASHL Belum Memadai
6. Pelaksanaan Program PEN Tahun 2020 Berupa Pemb. Sekat Kanal pada Ditjen PPKL Tidak Mengacu kepada Pedoman Pembangunan Infrastruktur Pembasahan Gambut
7. Kelebihan Pembayaran (Rp531.330.458) dan Pengenaan Denda Keterlambatan (Rp381.299.056) atas Pekerjaan pada Satker P3KLL dan BPDASHL Mahakam Berau
8. Proses Pengadaan Pek. Jasa Konsultansi Perencanaan, Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi dan Pek. Konstruksi Pemb. Laboratorium Merkuri dan Metrologi Lingk. pada Puslitbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan Tidak Sesuai Ketentuan

PENJELASAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

1. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengadaan Barang/Jasa
2. Melakukan reviu ITJEN atas pekerjaan yang masih belum sesuai ketentuan dan menyampaikan laporan reviu kepada BPK-RI.
3. Memerintahkan penyetoran ke kas negara atas kelebihan pembayaran yang belum dikembalikan.
 - a. Bahwa terdapat penurunan nilai temuan dari 10,7 milyar (tahun 2019) menjadi 2,4 milyar (tahun 2020).
 - b. Dari nilai tersebut telah dilakukan penyetoran sebesar 2,29 milyar (setara 94%) dan tersisa 147 juta (setara 6%)
4. Memberikan sanksi kepada pihak yang tidak optimal melaksanakan tugasnya
5. Atas terdapatnya permasalahan di pelaksanaan kegiatan teknis (RHL, PKPM, PEN, dll), KLHK akan :
 - a. Melakukan updating dan revisi peta lahan kritis agar sesuai kondisi lapangan
 - b. Menyusun regulasi dan pedoman teknis untuk meningkatkan kualitas kegiatan
 - c. Melakukan kajian dan evaluasi kinerja secara periodik
 - d. Menyusun/mengembangkan/menyempurnakan sistem aplikasi on-line

PERMASALAHAN BMN & PERSEDIAAN

TEMUAN TERKAIT BMN & PERSEDIAAN

1. Penatausahaan Persediaan untuk Diserahkan ke Masyarakat Belum Memadai
2. Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Tetap di 14 Satker Belum Memadai
3. Penatausahaan dan Pengelolaan Aset Lainnya di 12 Satker Belum Memadai
4. Pelaksanaan Tindak Lanjut Revaluasi BMN Tahun 2017-2018 Belum Memadai

PENJELASAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

1. Temuan BMN merupakan temuan yang berulang, yang menonjol adalah barang yang tidak diketahui keberadaannya dan salah catat barang rusak ke dalam barang yang masih baik. Namun dari sisi nilai temuan, terdapat penurunan nilai temuan.
2. Atas hal tersebut, KLHK akan menyusun road map dan membentuk Gugus Tugas disertai pengendalian dan pengawasan yang optimal serta memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang kurang optimal melaksanakan tugasnya.
3. Terkait pengelolaan persediaan yang harus diserahkan kepada masyarakat, tahun ini masih ditemukan. Namun dari sisi nilai temuan, terdapat penurunan dari 1,2 trilyun di tahun 2019 menjadi 607 milyar di tahun 2020. Dari nilai 607 milyar tersebut sebenarnya sudah diserahkan kepada masyarakat 563 milyar (93%) namun belum tuntas proses pemindah-tanganannya. KLHK akan menyelesaikan di tahun 2021.
4. Terkait Revaluasi BMN, merupakan kelanjutan dari temuan tahun lalu. KLHK akan segera menyelesaikan masalah ini dengan meningkatkan koordinasi dengan DJKN.

BAGIAN 2

Evaluasi Anggaran Tahun 2021



PERJALANAN PAGU KEMENTERIAN LHK TAHUN 2021 (dalam ribu rupiah)

NO	UNIT KERJA ESELON I	PAGU SEBELUM REFOKUSING	REFOKUSING			PAGU EKSISTING TAHUN 2021
			TAHAP III	TAHAP IV	TOTAL	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=4+5</i>	<i>7=3-6</i>
1	SEKRETARIAT JENDERAL	514.033.779	23.186.167	25.590.514	48.776.681	465.257.098
2	INSPEKTORAT JENDERAL	69.981.398	3.262.357	4.555.336	7.817.693	62.163.705
3	DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	315.270.382	1.937.557	9.359.976	11.297.533	303.972.849
4	DITJEN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN	1.985.045.653	61.703.749	91.031.521	152.735.270	1.832.310.383
5	DITJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	1.766.424.820	69.098.995	59.590.206	128.689.201	1.637.735.619
6	DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	550.560.624	11.797.069	6.207.658	18.004.727	532.555.897
7	BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	312.032.391	2.089.125	7.466.980	9.556.105	302.476.286
8	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	295.560.688	15.932.819	13.591.203	29.524.022	266.036.666
9	DITJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	369.922.921	20.575.715	10.914.274	31.489.989	338.432.932
10	DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	334.879.136	25.895.037	14.556.855	40.451.892	294.427.244
11	DITJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	282.209.106	2.033.219	12.844.144	14.877.363	267.331.743
12	DITJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERBAHAYA DAN	244.262.243	34.461.093	13.984.639	48.445.732	195.816.511
13	DITJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	262.322.546	36.268.467	14.945.282	51.213.749	211.108.797
	JUMLAH KEMENTERIAN LHK	7.302.505.687	308.241.369	284.638.588	592.879.957	6.709.625.730
14	BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE*	1.828.272.967	289.821.067	596.791.950	886.613.017	941.659.950
	JUMLAH KEMENTERIAN LHK + BRGM	9.130.778.654	598.062.436	881.430.538	1.479.492.974	7.651.285.680

*Terdapat blokir anggaran di BRGM sebesar **Rp.886.613.017.000,00**.

REALISASI KEMENTERIAN LHK TA 2021

(APLIKASI OMSPAN 23 AGUSTUS 2021 PK 11.00 WIB)

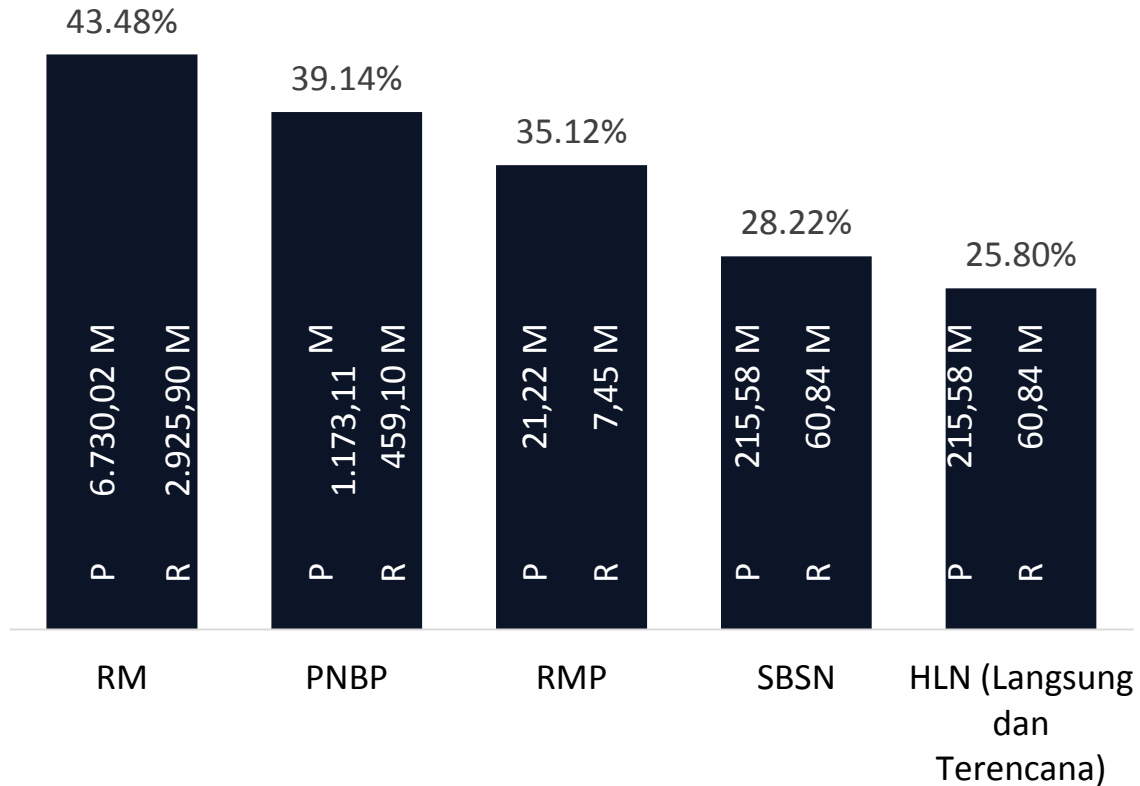
Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Persen
029.01	Sekretariat Jenderal	465.257.098.000	226.340.343.859	48,65%
029.02	Inspektorat Jenderal	62.163.705.000	34.600.573.875	55,66%
029.03	Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	303.972.849.000	149.932.674.056	49,32%
029.04	Ditjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan	1.832.310.383.000	791.737.571.259	43,21%
029.05	Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	1.637.735.619.000	840.848.854.007	51,34%
029.06	Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	532.555.897.000	272.245.022.747	51,12%
029.07	Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan	302.476.286.000	181.009.298.799	59,84%
029.08	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	266.036.666.000	152.660.995.109	57,38%
029.09	Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	338.432.932.000	189.821.511.243	56,09%
029.10	Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	294.427.244.000	170.715.742.438	57,98%
029.11	Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	267.331.743.000	148.668.312.952	55,61%
029.12	Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun	195.816.511.000	89.130.908.457	45,52%
029.13	Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	211.108.797.000	86.672.697.520	41,06%
KEMENTERIAN LHK		6.709.625.730.000	3.334.384.506.321	49,70%
029.14	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove*	941.659.950.000	206.819.559.813	21,96%
KEMENTERIAN LHK + BRGM		7.651.285.680.000	3.541.204.066.134	46,28%

*Terdapat blokir anggaran di BRGM sebesar **Rp.886.613.017.000,00**.

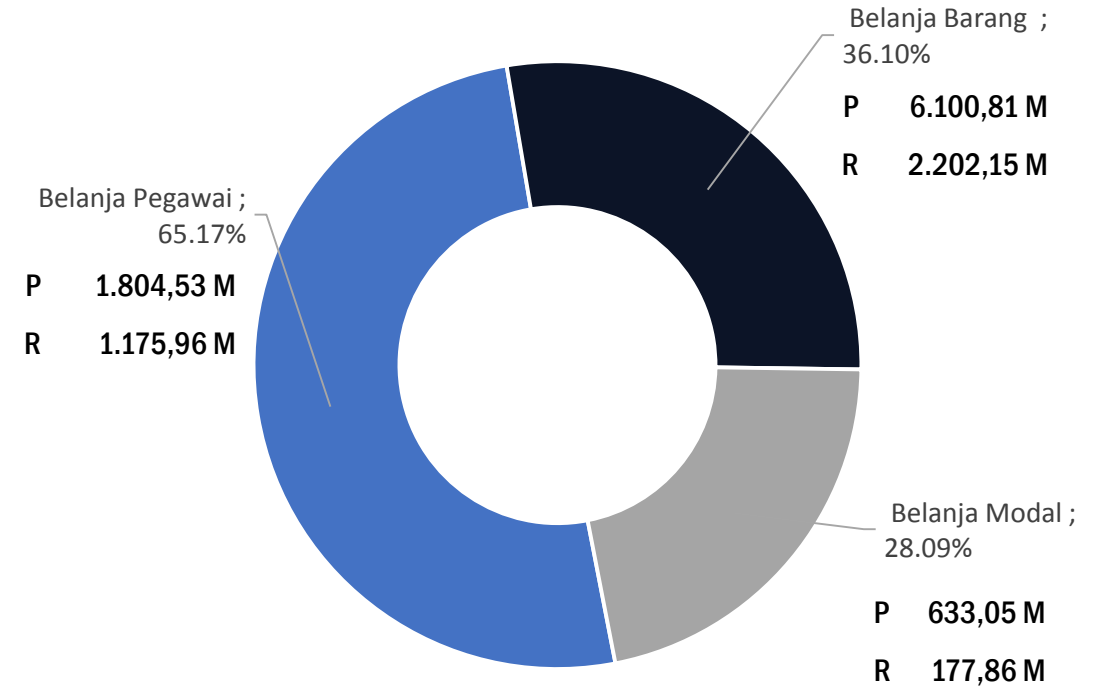
PROGRES REALISASI ANGGARAN TA.2021

Sumber : OMSPAN Kemenkeu, update 23 Agustus 2021 Pukul 10.00 WIB

Berdasarkan Sumber Dana

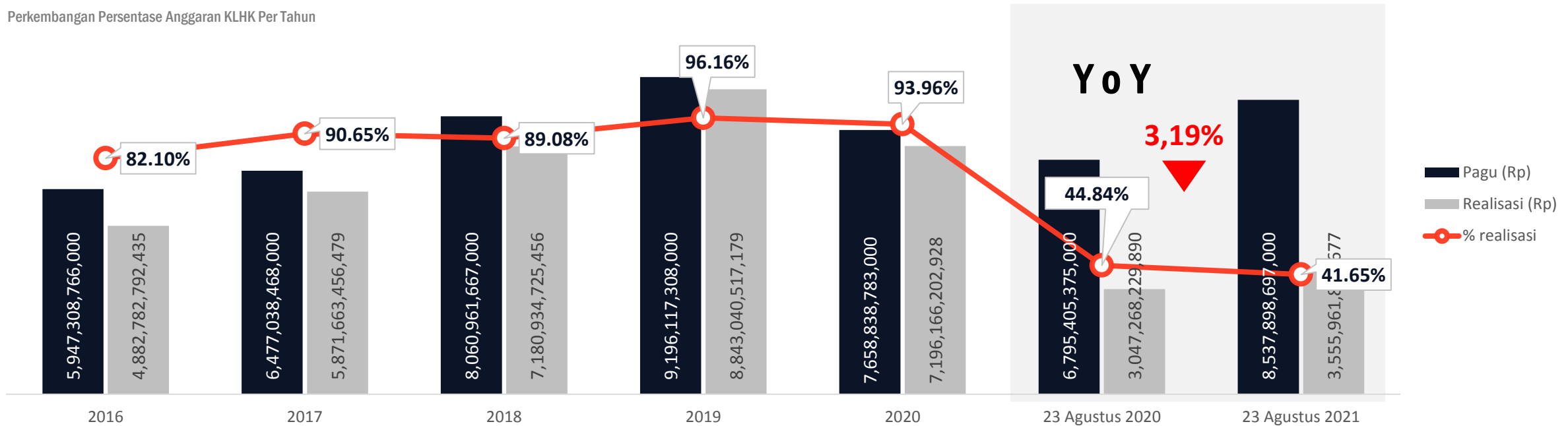


Berdasarkan Jenis Belanja



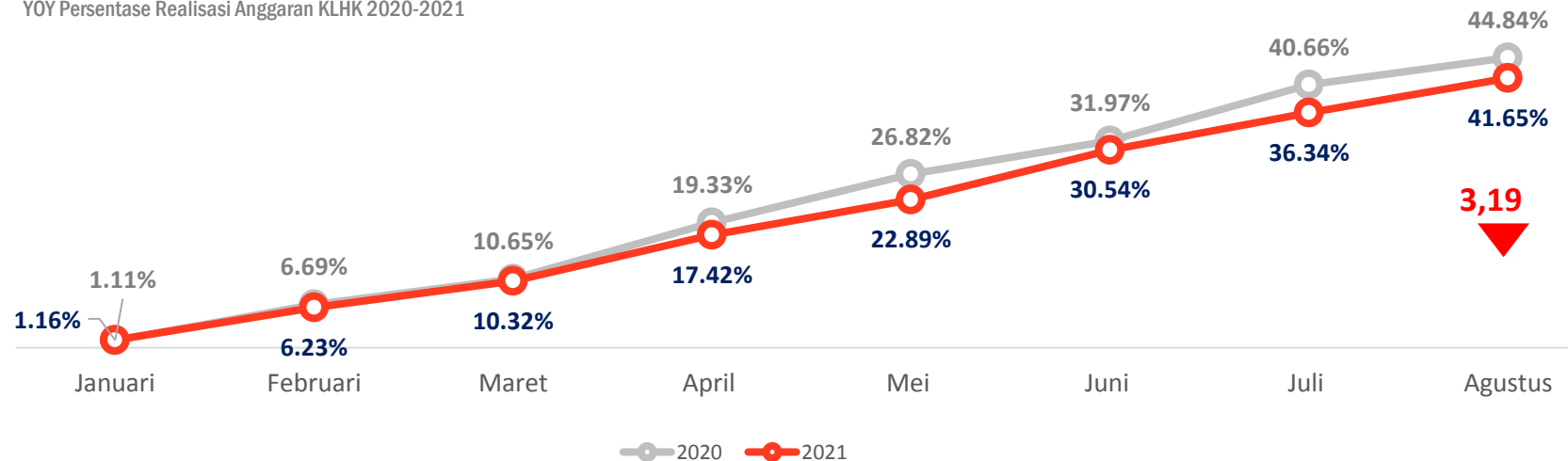
Pagu dan Realisasi Anggaran KLHK 2016-2021

Perkembangan Persentase Anggaran KLHK Per Tahun



Secara tahun ke tahun (YoY), jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terjadi penurunan persentase realisasi anggaran sebesar 3,19% (capaian Persentase 23 Agustus 2020 sebesar 44,84%). Namun secara realisasi anggaran (dalam rupiah) terjadi peningkatan sebesar Rp 0,51 Triliun

YOY Persentase Realisasi Anggaran KLHK 2020-2021



KLHK MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Dalam upaya menggerakkan roda ekonomi masyarakat dan membantu pemerataan ekonomi wilayah

Dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, perlu dialokasikan anggaran untuk Program Prioritas KLHK dalam *cluster* Ketahanan Pangan, Pariwisata dan Padat Karya

PEN-FOOD ESTATE (Ketahanan Pangan)

Mendukung penyiapan lumbung pangan dan SDM unggul dan terlatih di Kalimantan Tengah yang ditindak lanjuti oleh Ditjen PHL, KSDAE, PKTL, BP2SDM, PSKL, dan BRGM.

PEN-PARIWISATA

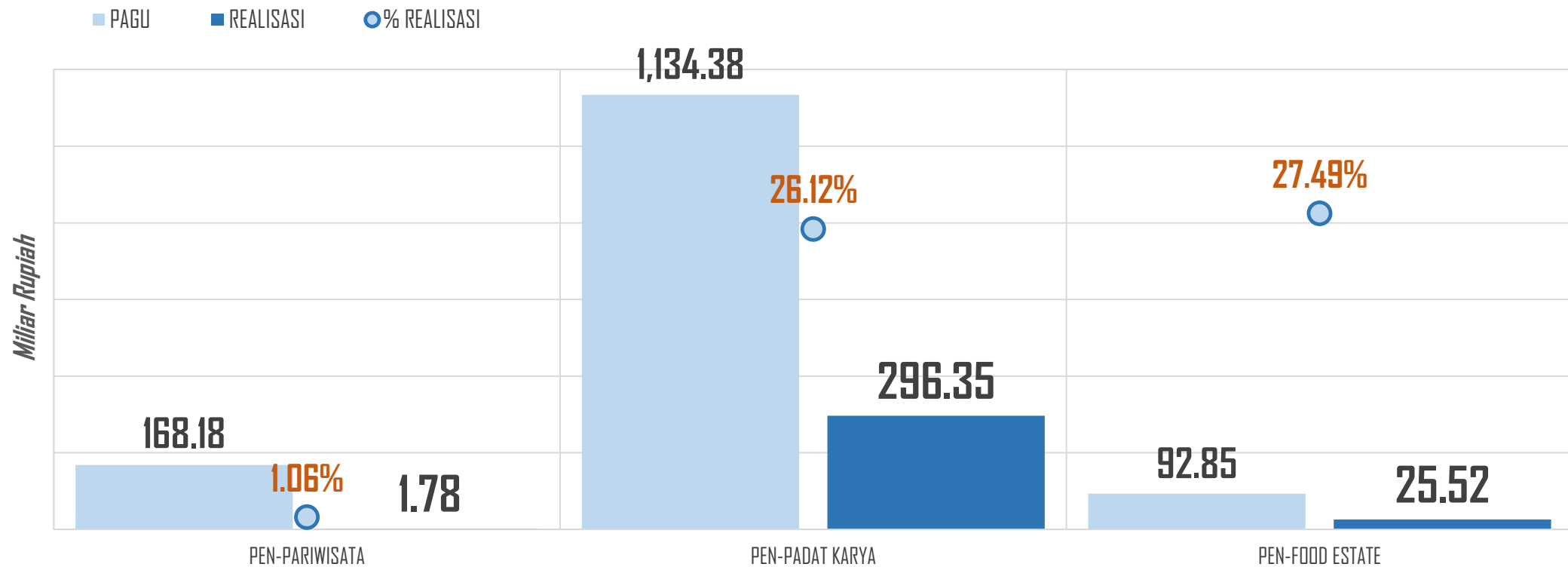
Mendukung pengembangan sarana dan prasarana di destinasi wisata prioritas Indonesia melalui Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah dan pembangunan persemaian permanen sebagai pusat rehabilitasi Kawasan wisata yang ditindak lanjuti oleh Ditjen PSLB3 dan PDASRH

PEN-PADAT KARYA

Mendukung pemerataan ekonomi wilayah melalui program padat karya atau *cash for work*, menyerap banyak HOK dan menggulirkan dana kepada masyarakat yang ditindak lanjuti oleh Ditjen PDASRH, PHL, KSDAE, PKTL, PSKL, PPKL dan BRGM.

PERKEMBANGAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL KLHK

Pertengahan tahun pertama tahun 2021 memantapkan komitmen dalam usaha peningkatan ekonomi nasional



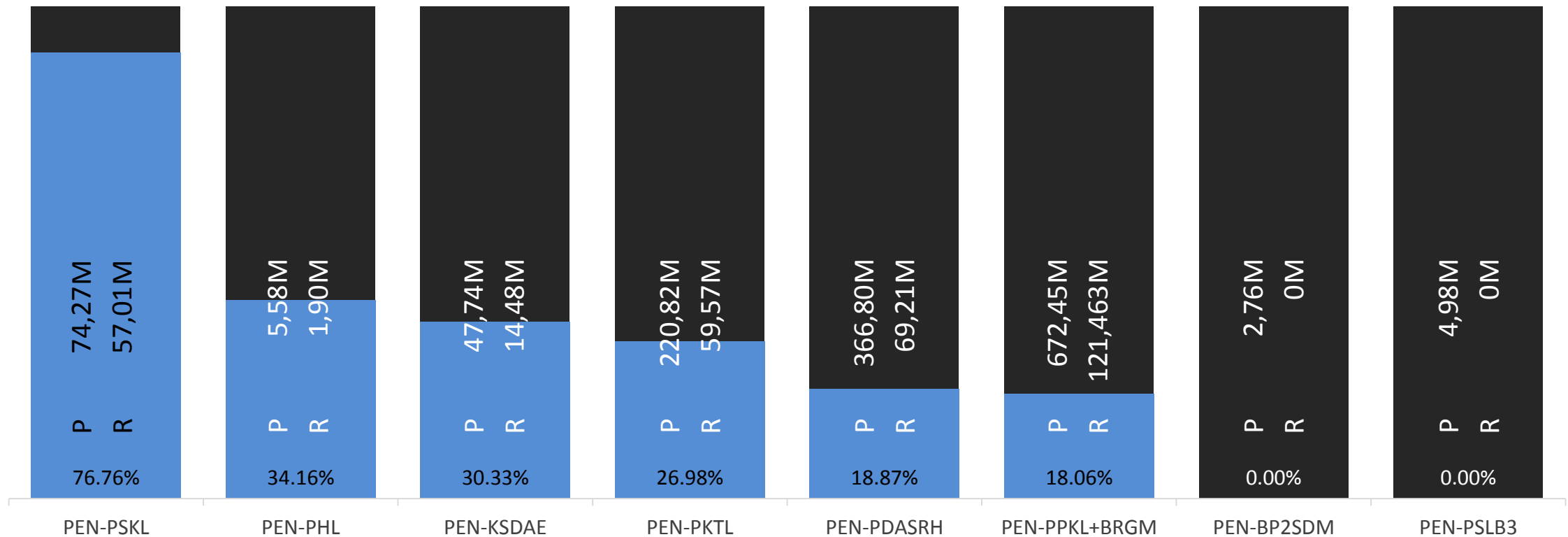
Sumber data: bit.ly/cfw_2021 | 10.00 WIB 23 Agustus 2021

PROGRES REALISASI ANGGARAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA. 2021

Update : 23 Agustus Pukul 10.00 WIB Sumber : bit.ly/cfw_2021

Pagu Rp 1.395.425.256.000
 Realisasi Rp 323.659.539.266
 % Realisasi PEN **23,19%**



PROGRAM CASH FOR WORK

Meningkatkan sumbangsih KLHK kepada masyarakat dalam mendukung Program PEN-Padat Karya melalui aliran dana kepada masyarakat dan serapan HOK melalui Program *Cash For Work* (CFW)

Cash For Work (CFW) Merupakan pendanaan anggaran APBN KLHK baik program kegiatan dengan tagging PEN maupun program kegiatan dengan tagging mandiri (non-PEN) yang bersifat padat karya.



Rp454,69 Miliar

42,00% dana telah dialirkan ke masyarakat dari target Rp 1,08 Triliun



4,97 Juta HOK

48,23% HOK terserap dari target 10,3 juta HOK

PROGRES REALISASI ANGGARAN *CASH FOR WORK*

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA. 2021

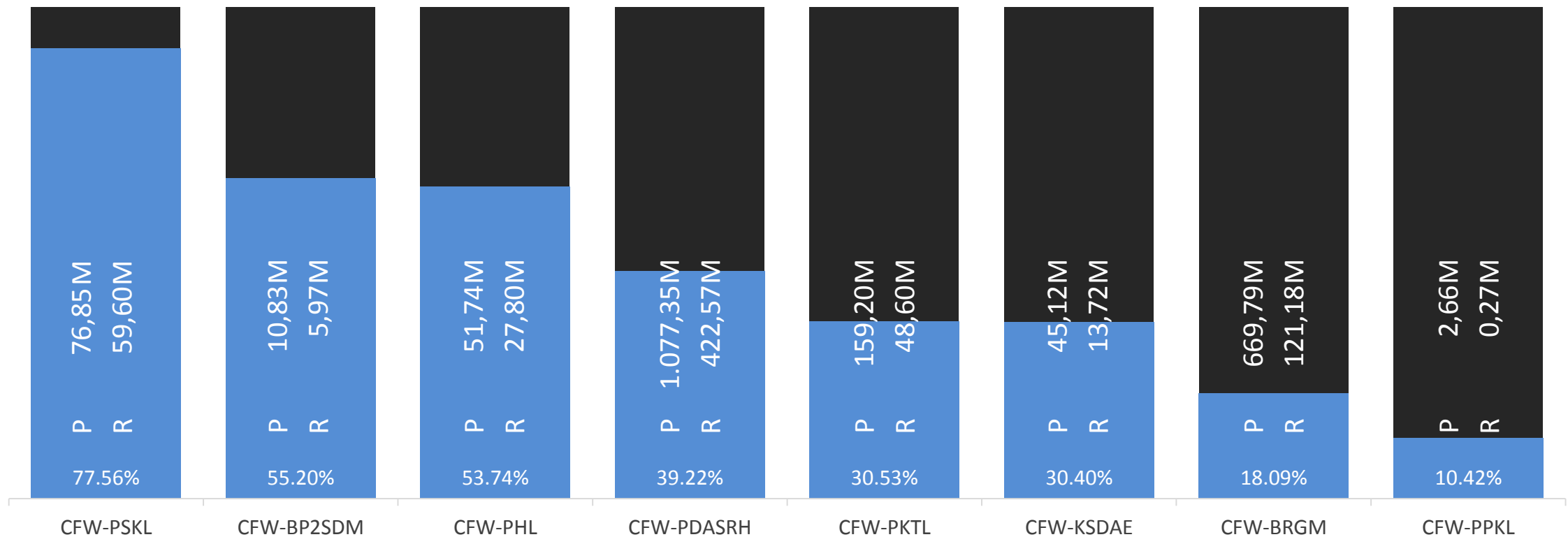
Update : 23 Agustus Pukul 10.00 WIB Sumber : bit.ly/cfw_2021



Pagu Rp 2.093.576.254.000

Realisasi Rp 699.763.013.084

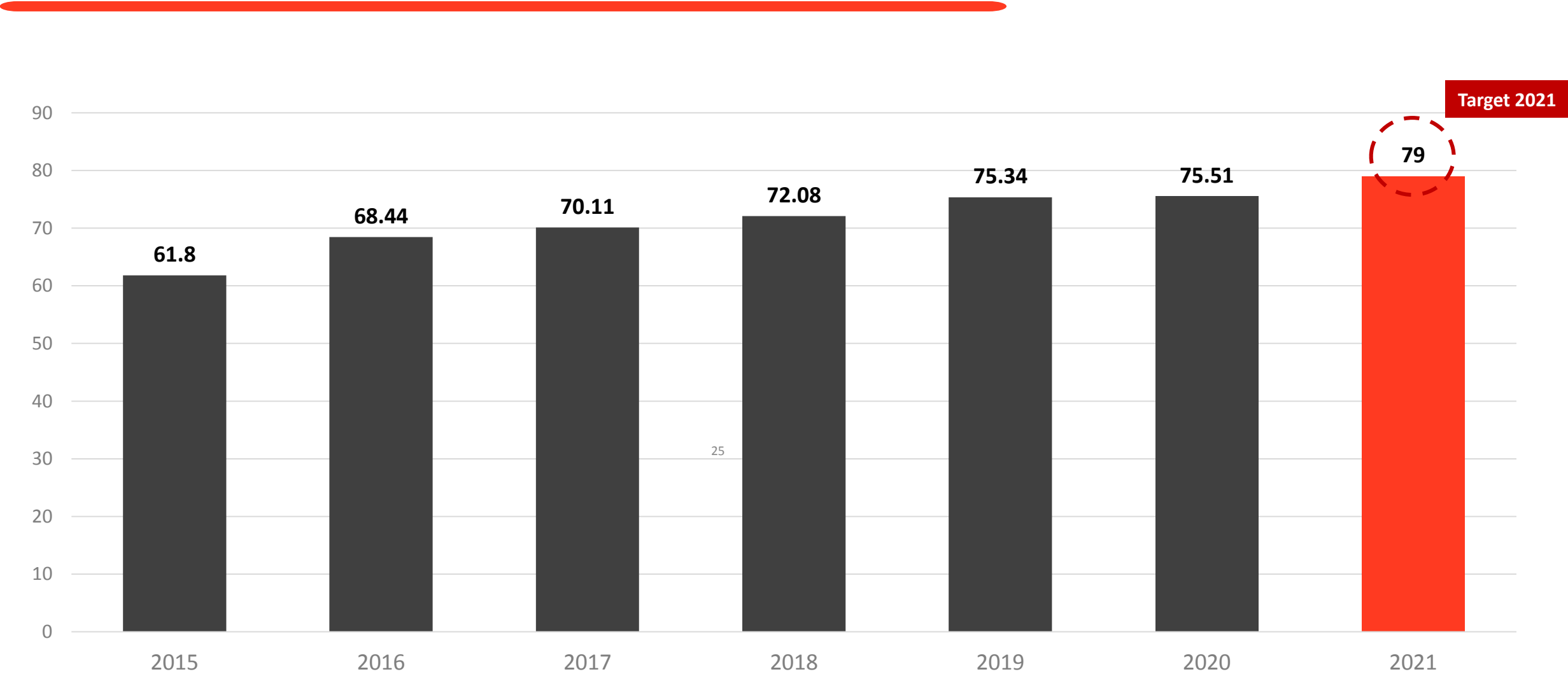
Rata-Rata Realisasi CFW **33,42%**



Evaluasi Kinerja Per Unit Eselon I Tahun 2021



EVALUASI KINERJA SEKRETARIAT JENDERAL



Perjalanan Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian LHK

REALISASI KINERJA RB TAHUN 2021 (Sampai dengan Semester I)

PROGRAM	REALISASI KINERJA RB
Manajemen Perubahan	Telah tersedia aplikasi budaya kerja KLHK dengan alamat : https://sibude.id sebagai media komunikasi agen perubahan.
Penguatan Pengawasan	Seluruh Satuan kerja lingkup Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 271 Satker telah menyusun Desain Penyelenggaraan SPIP yang didalamnya terdapat aktivitas penilaian risiko atas kegiatan utama dan kegiatan pendukung beserta rencana kegiatan pengendalian terhadap resiko signifikan dalam rangka pembangunan <i>first line of defence</i>
Penguatan Akuntabilitas	Penilaian kinerja output dilakukan secara berkala dan rutin setiap mingguan dan setiap bulanan melalui laporan progres RKA
Penataan Organisasi/Kelembagaan	Telah diterbitkan PermenLHK No. 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK sebagai implementasi penyederhanaan birokrasi diikuti dengan penyetaraan terhadap 865 Jabatan Administrator dan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional.
Penataan Tata Laksana	Sedang dilaksanakan pengumpulan bahan NSPK dan Penyusunan konsep Permen LHK terkait SPBE. Menindaklanjuti Surat dari KemenPANRB terkait Pelaksanaan Evaluasi/Penilaian SPBE Tahun 2021, KemenLHK telah melaksanakan penilaian mandiri SPBE dimaksud melalui portal monev.spbe.go.id dan memperoleh hasil penilaian mandiri dengan nilai 4.03 dengan predikat sangat baik.
Sistem Manajemen SDM	Penyusunan PermenLHK tentang Manajemen Talenta tahap finalisasi untuk diajukan harmonisasi dengan Kemenkumham disertai penguatan unit kerja yang menangani penilaian kompetensi dan kinerja untuk mengakselerasi pemetaan talenta seiring proses penyusunan PermenLHK tentang Manajemen Talenta.
Deregulasi Kebijakan	Telah dilakukan Simplifikasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan sektor lingkungan hidup dan kehutanan dengan hasil telah terbit sebanyak 4 (empat) Peraturan Pemerintah dan 2 (dua) Peraturan Menteri.
Pelayanan Publik	Membangun sistem pelayanan terintegrasi dimana telah tersedia system OSS HUB KemenLHK dengan OSS KPM, saat ini sedang menunggu <i>launching</i> dari OSS BKPM agar dapat diimplementasikan untuk proses perizinan yang terintegrasi.

EVALUASI KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL

PENGAWASAN INTERNAL

A. Target dan Realisasi Pengawasan Internal

NO	KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	Audit	111	44	39,64
2	Reviu	137	117	85,40
3	Evaluasi	83	20	24,10
4	Pengawasan Lainnya/Consulting	187	140	74,87
Jumlah		537	321	59,78

B. Penanganan Pengaduan Masyarakat

NO	Tindak Lanjut	Surat	Media Online	Jumlah
1	Dilakukan audit investigatif	3	0	3
2	Dilakukan identifikasi khusus	3	1	4
3	Diusulkan dilakukan identifikasi khusus	1	0	1
4	Diserahkan kepada Eselon I lain	2	4	6
5	Dalam proses penelaahan	7	5	12
6	Tidak ditindaklanjuti karena bukan kewenangan Kementerian LHK/ sudah selesai/sudah sesuai ketentuan	2	0	2
Jumlah		18	10	28

C. Jenis Pengawasan Internal

1. Reviu Desain Penyelenggaraan SPIP Tahun 2021
2. Reviu Laporan Keuangan Tahun 2020
3. Reviu Laporan Kinerja Kementerian LHK Tahun 2020
4. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Triwulan Tahun 2021
5. Evaluasi Implementasi SAKIP
6. *Ground Check* Tindak Lanjut Hasil E-audit RHL
7. Evaluasi Pengelolaan BMN
8. Evaluasi Pengelolaan Destinasi Wisata
9. Audit Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi
10. Pendampingan Revisi Desain SPIP Tahun 2021
11. Pendampingan Penatausahaan BMN
12. Monitoring dan Evaluasi NSPK Turunan dari UUCK
13. Pendampingan Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Tahun 2020
14. Pendampingan Verifikasi Base Line Data dalam Program PEN dan Implementasi UUCK
15. Pendampingan terhadap Kegiatan yang dibiayai Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
16. Pendampingan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK / WBBM

Penyeleksian Unit Kerja Berpredikat WBK

**Evaluasi Internal terhadap Calon Unit Kerja Berpredikat WBK/WBBM
lingkup KLHK Tahun 2021 terhadap 65 Unit Kerja dari 11 Eselon I**

**40 Unit Kerja telah memenuhi syarat minimal untuk dapat diusulkan
kepada Menteri PAN-RB**

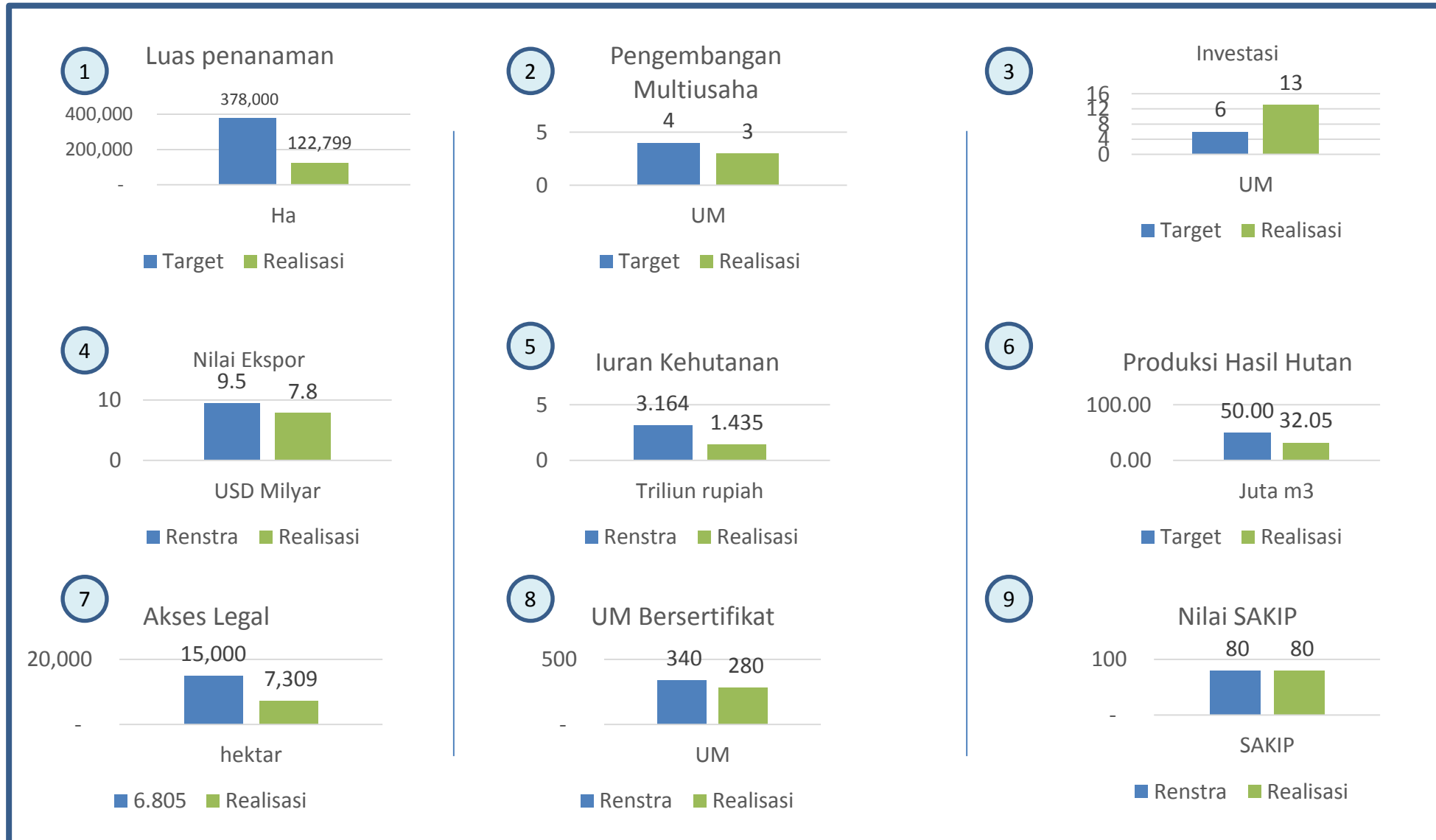
**Usulan terhadap unit kerja layanan berpredikat menuju WBK telah
disampaikan kepada Menteri PAN-RB Cq. Deputi Bidang Reformasi
Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan**

MATURITAS SPIP

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 05 Tahun 2021, Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tahun 2021 lingkup KLHK dilaksanakan melalui 3 Tahapan :

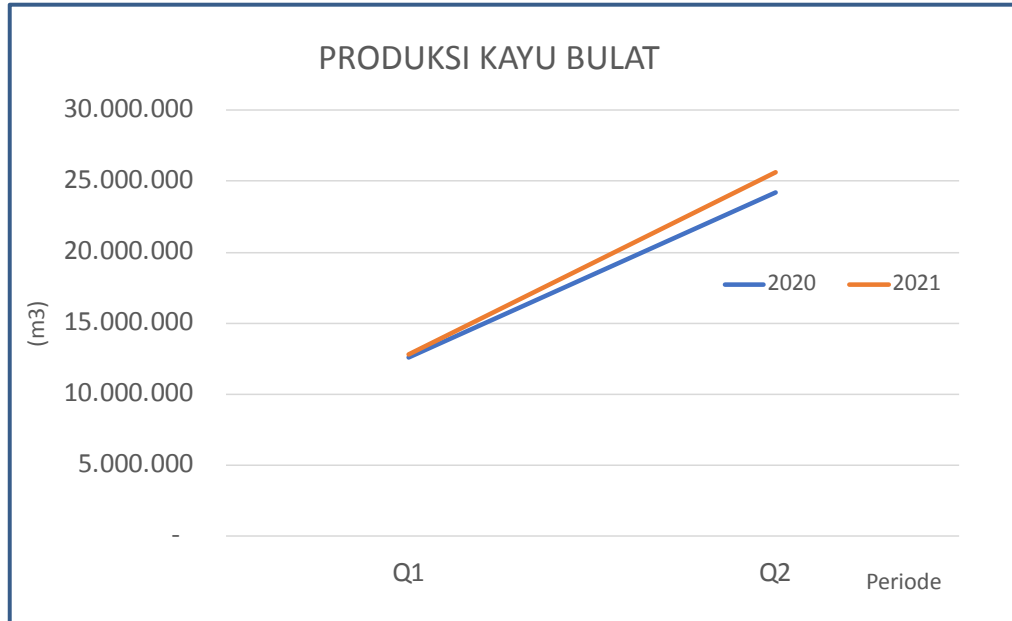
1. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh 13 Unit Eselon I lingkup KLHK yang selanjutnya disebut Satker
2. Pelaksanaan Penjaminan Kualitas (PK) Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh Inspektorat Jenderal (APIP) KLHK
3. Pelaksanaan Evaluasi atas PK Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi oleh BPKP

CAPAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI



* Data per 9 Agustus 2021

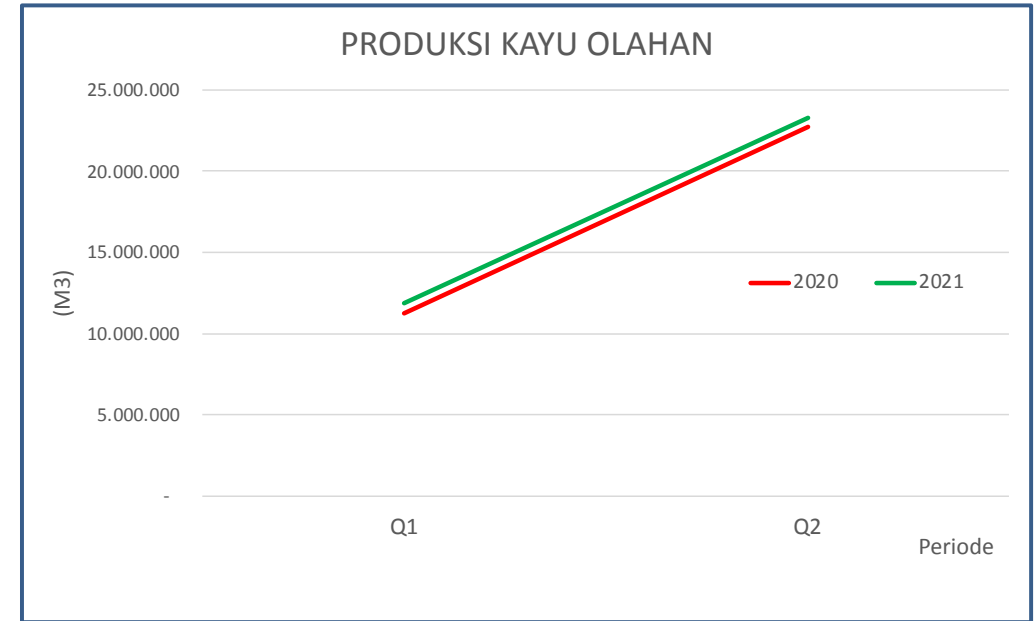
1 PRODUKSI KAYU BULAT



Quarter 1: Januari – Maret
 Quarter 2: April - Juni

- Total produksi kayu bulat HA dan HT pada Q1 dan Q2 Tahun 2021 sebesar 25.620.686 m3 atau meningkat 5,97% dibanding Q1 dan Q2 tahun 2020 sebesar 24.178.259 m3.
- intervensi kebijakan (Insentif fiskal) :
 - ✓ Pembayaran DR dalam Rupiah*
 - ✓ Pengangsuran pembayaran PSDH/DR*
 - ✓ Penghapusan PPN Kayu bulat 10%
 - ✓ Insentif pajak PPH 21, 22 dan 25
 - ✓ Penjadwalan Kembali pembayaran pinjaman perusahaan selama 1 tahun.
- Peningkatan produktivitas hutan melalui penerapan multisitem silvikultur, SILIN dan RIL sekaligus mendukung *Nationally Determined Contribution (NDC)*.

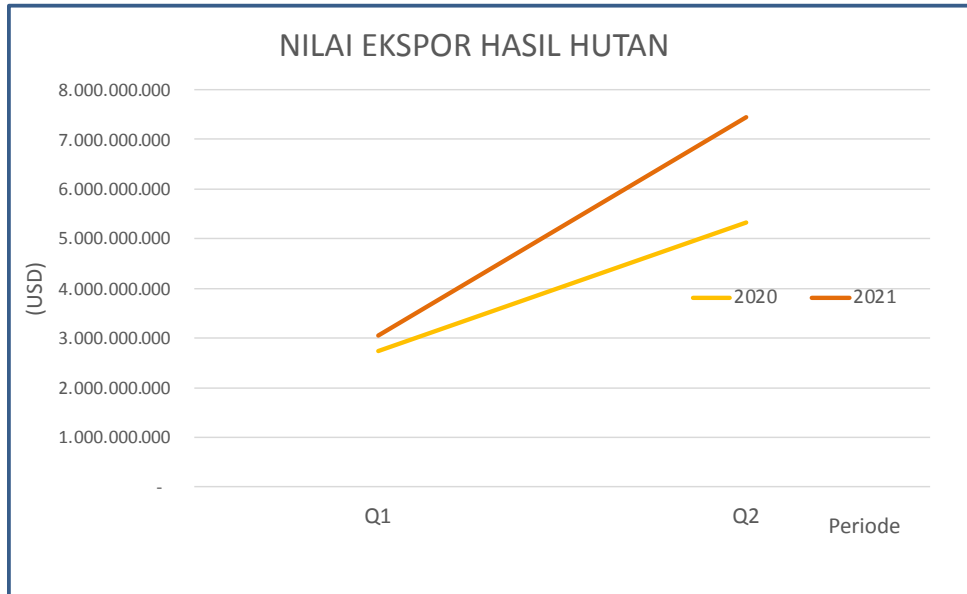
2 PRODUKSI KAYU OLAHAN



Quarter 1: Januari – Maret
 Quarter 2: April - Juni

- Tahun 2021, Total Produksi Kayu Olahan pada Q1 dan Q2 sebesar 23.285.433 m3 atau meningkat 2,43% dibanding Q1 dan Q2 tahun 2020 sebesar 22.733.857 m3.
- Intervensi Kebijakan :
 - ✓ Relaksasi kebijakan fiskal, berupa perizinan impor mesin plywood dalam keadaan tidak baru.
 - ✓ Mendorong Integrasi Perizinan Pengolahan Hasil Hutan dengan Perizinan Pemanfaatan Hasil Hutan (implementasi UU Cipta Kerja).

3 NILAI EKSPOR HASIL HUTAN

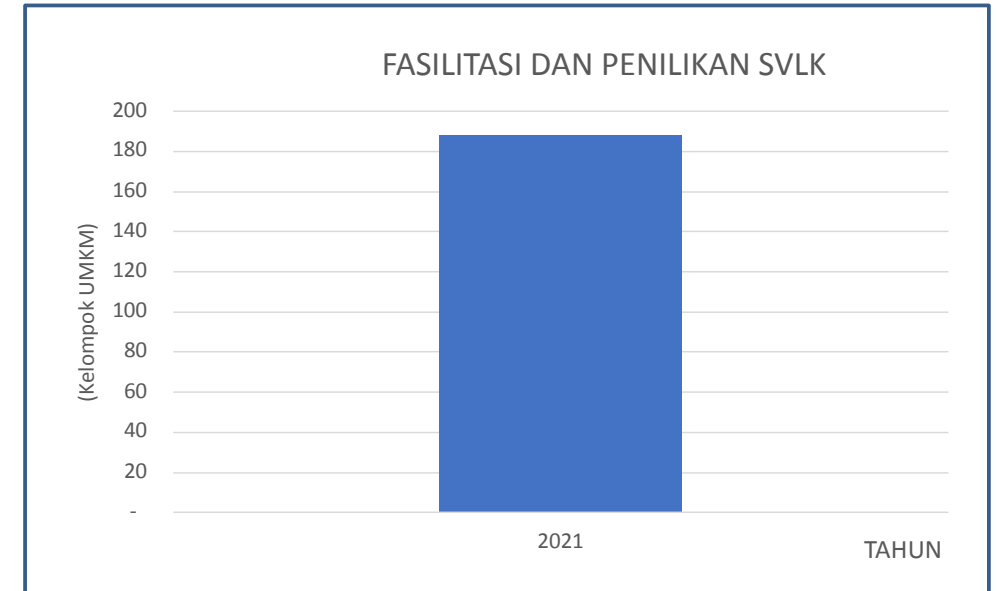


Quarter 1: Januari – Maret

Quarter 2: April - Juni

- Tahun 2021, Total Nilai Ekspor pada Q1 dan Q2 sebesar USD. 7.451.068.926 atau meningkat 40,11% dibanding Q1 dan Q2 tahun 2020 sebesar USD 5.317.872.297.
- Intervensi Kebijakan:
 - Kerjasama Negara Tujuan Ekspor Untuk Pelonggaran Kebijakan *Lockdown* akibat Pandemi COVID-19.
 - Fasilitas Sertifikasi dan Penilaian SVLK Kepada 200 Kelompok UMKM Orientasi Ekspor.

4 FASILITASI SVLK UMKM



Quarter 1: Januari – Maret

Quarter 2: April - Juni

- Tahun 2021, Total Jumlah Kelompok UMKM yang telah dilakukan fasilitasi dan penilaian SVLK pada Q1 dan Q2 sebanyak 188 Kelompok UMKM dari Target 200 Kelompok UMKM
- Fasilitasi sertifikasi/penilaian SVLK bagi 115 UMKM masih dalam proses seleksi umum
- Intervensi Kebijakan:
 - Fasilitasi penilaian SVLK tidak dibatasi hanya untuk penilaian pertama, tapi juga dapat untuk penilaian selanjutnya.
 - Pelaksanaan kegiatan audit SVLK secara *onsite* (lapangan) dapat dilaksanakan dengan metode *remote audit*.

CAPAIAN KINERJA DITJEN PDASRH



RHL MANGROVE

1. Penanaman mangrove (P0) seluas 952 Ha dari target 1.381 Ha.
2. Pemeliharaan (P1 dan P2) berupa penyulaman, pembersihan dari sampah, ranting pohon dsb yang mengganggu tanaman masing-masing 1.000 Ha.



RHL KRITIS SECARA SIPIL TEKNIS

1. Terbangun Dam Penahan sebanyak 145 Unit dari target 433 Unit.
2. Terbangun Gully Plug sebanyak 330 Unit dari target 1.545 Unit.



blok 9_p9_pu7_sulam.pupuk.dangir
-5,19264, 104,5233, 1095,6m, 171°
21/02/2021 09:29:49

RHL KRITIS SECARA VEGETATIF

1. Identifikasi lokasi RHL tahun 2022 seluas 40.000 ha
2. Penanaman (P0) seluas 57.638 Ha dari target 56.000 Ha.
3. Pemeliharaan (P2) tahap kedua berupa penyiangan, pendangiran, pemupukan dan penyulaman seluas 206.000 Ha.

KBR, BIBIT PRODUKTIF, BIBIT BERKUALITAS



KEBUN BIBIT RAKYAT (KBR)

1. Penetapan kelompok KBR sebanyak 872 unit dari target 967 Unit
2. Dari kelompok yang telah ditetapkan, telah dilakukan pencairan tahap I sebanyak 389 kelompok/unit



BIBIT PRODUKTIF

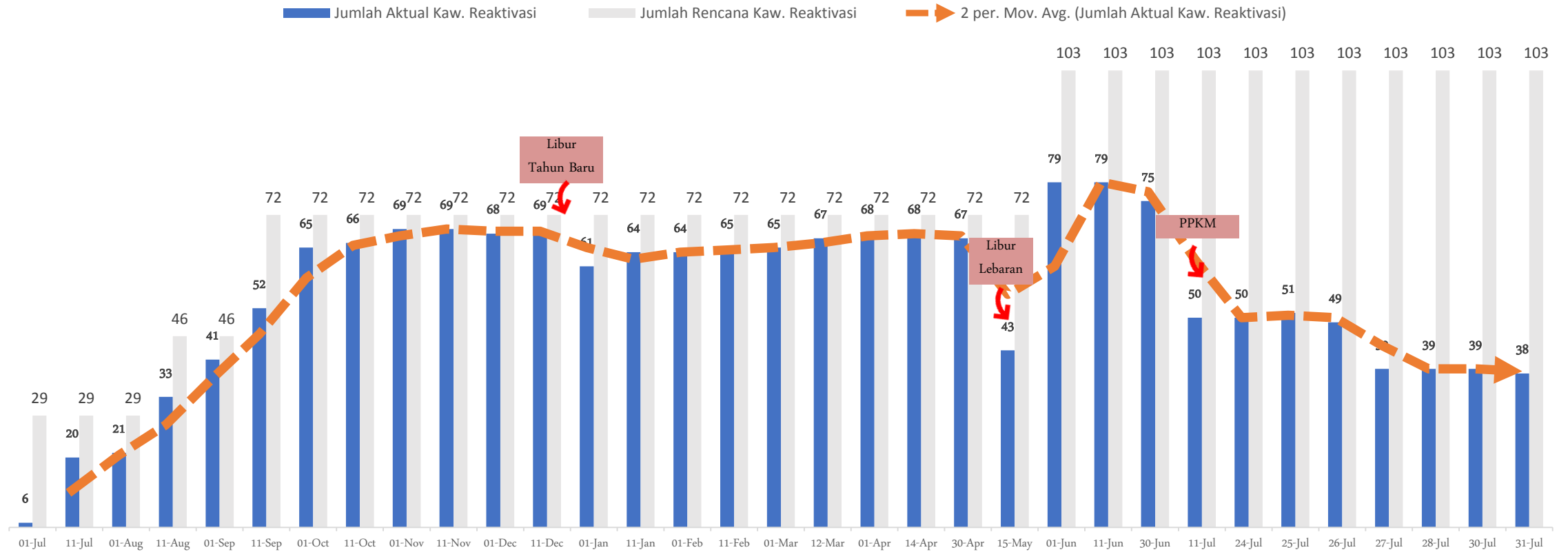
Bibit siap didistribusikan sebanyak 1.787.249 batang dari target 2.462.260 Batang



PERSEMAIAN PERMANEN (PP)

Bibit siap didistribusikan sebanyak 16.801.336 batang dari target produksi 36.515.000 Batang

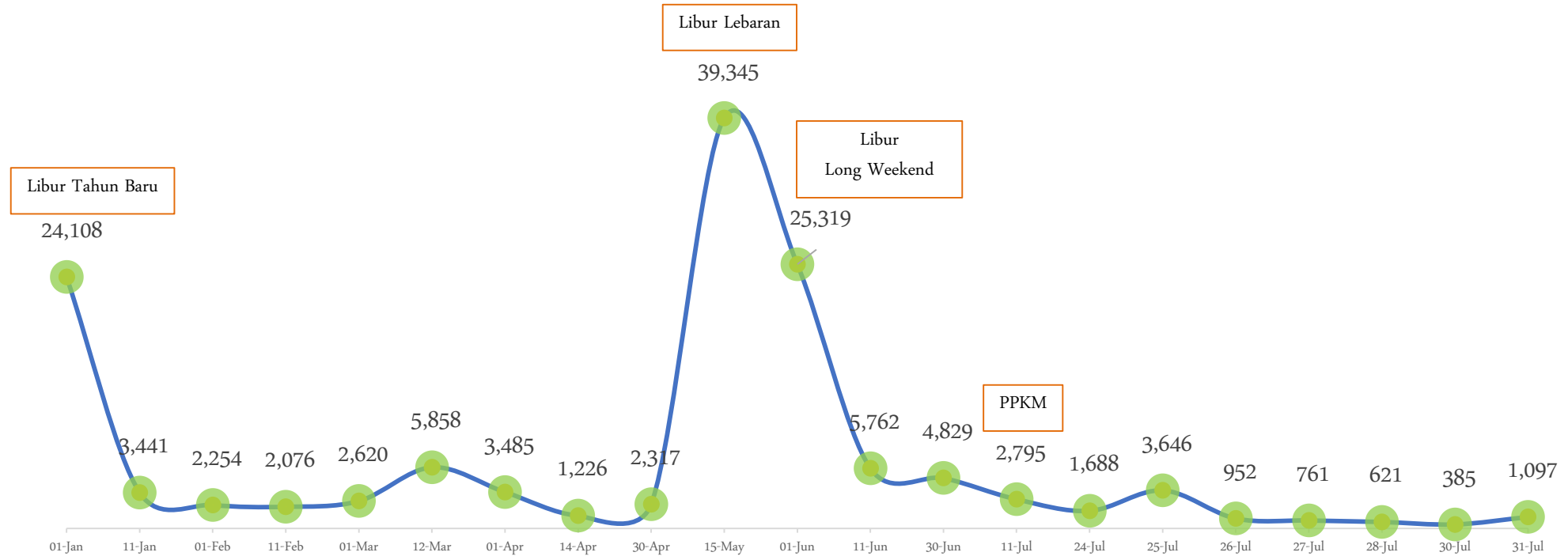
Jumlah Kawasan Teraktivasi



Per 31 Juli 2021, **38 dari 103** kawasan wisata alam yang sudah direaktivasi. Tahap IV reaktivasi sudah dimulai, sehingga sasaran bertambah 31 kawasan menjadi 103 kawasan wisata alam. Sampai saat ini, baru ada 13 dari 31 kawasan WA teraktivasi di Tahap IV. Sejak 3 Juli 2021 diberlakukan PPKM di beberapa lokasi, sehingga jumlah kawasan teraktivasi menurun hingga 38 kawasan.

Jumlah Pengunjung

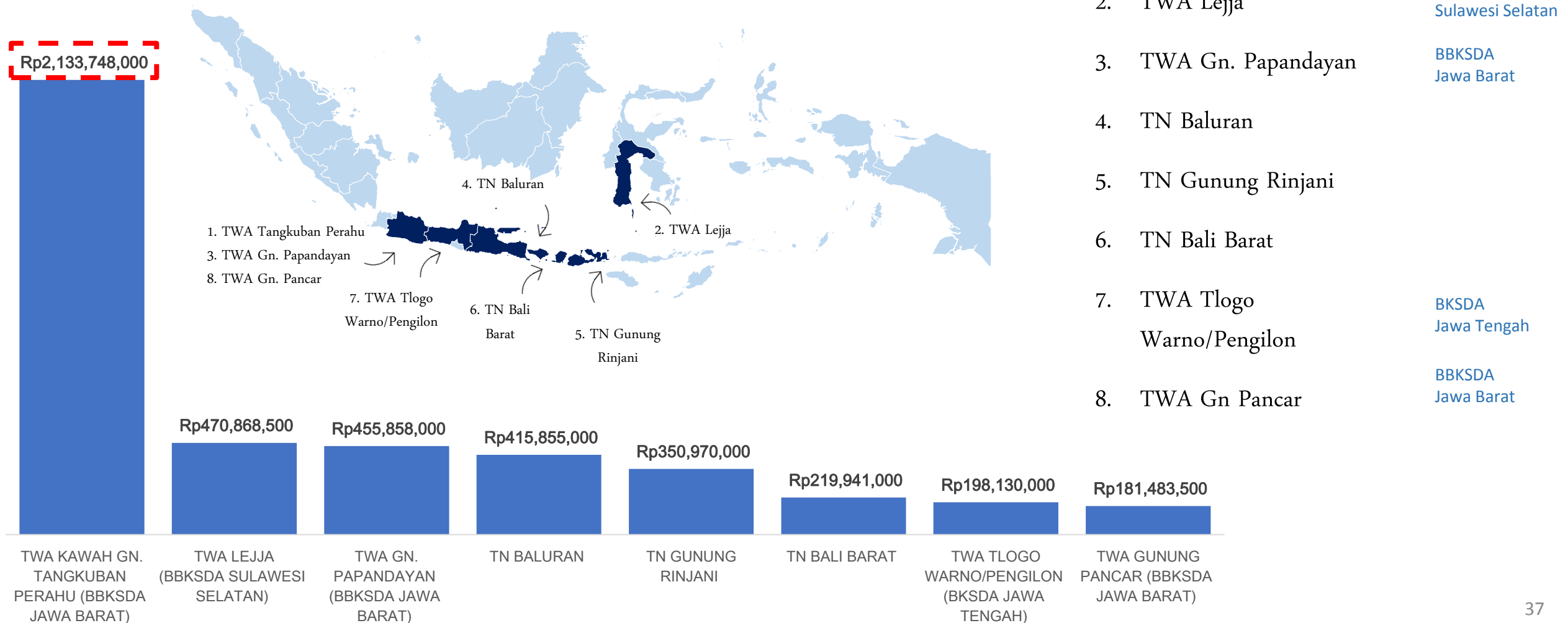
Kawasan Reaktivasi 2021



Sampai dengan 31 Juli 2021, jumlah pengunjung di kawasan konservasi yang telah direaktivasi berkisar antara 1000-5000 orang dalam sehari. Pada 31 Juli jumlah pengunjung kembali naik hingga 1000+ karena akhir pekan.

TOP 8 PENYUMBANG PNBP TERBESAR

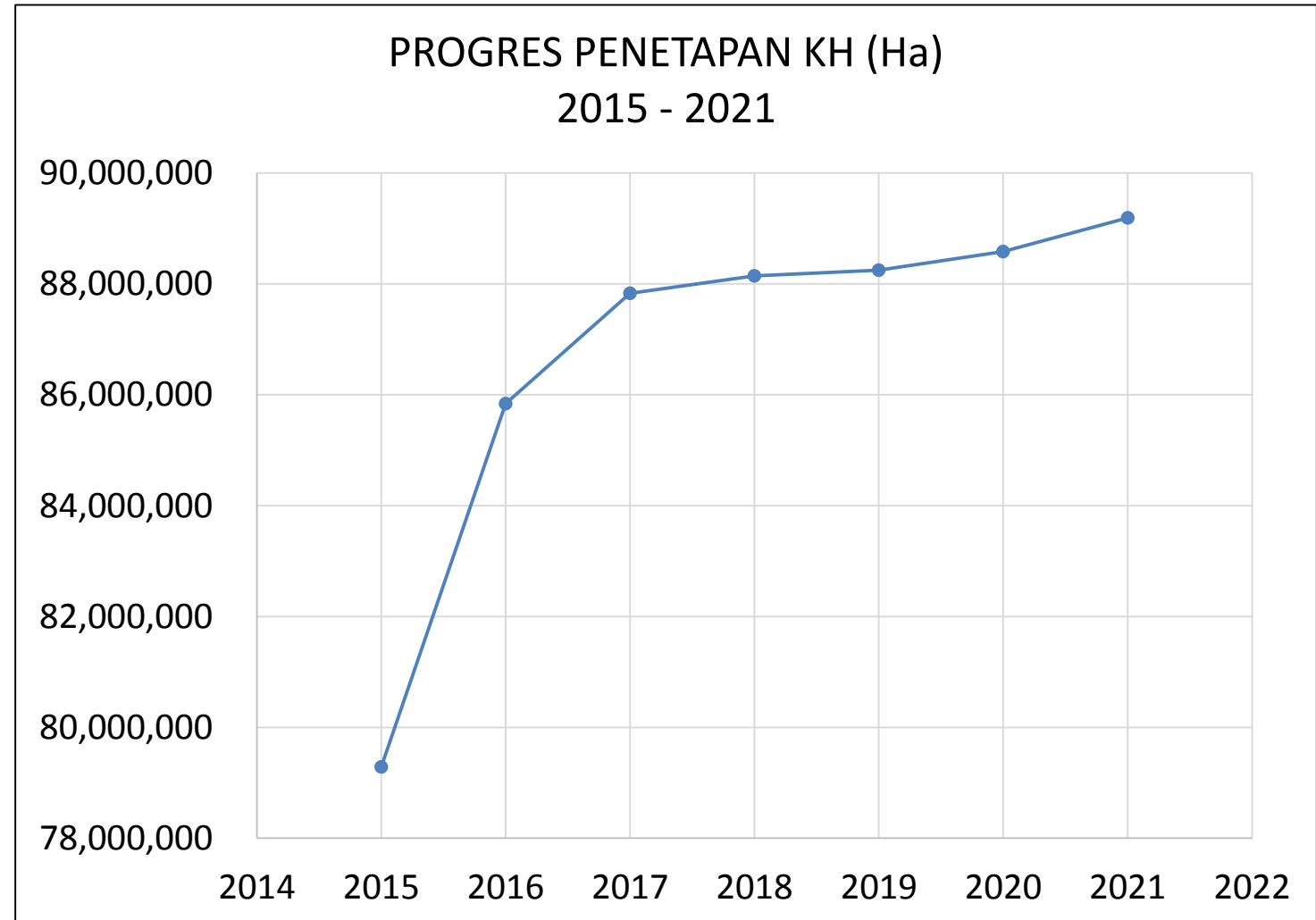
Delapan TN/TWA penyumbang PNBP terbesar pada periode Januari – Agustus 2021 per 14 Agustus 2021



CAPAIAN KINERJA DITJEN PKTL

PROGRES PENETAPAN KAWASAN HUTAN S.D. JULI 2021

S/D TAHUN	LUAS PENETAPAN AKUMULASI (Ha)
2015	79.287.632
2016	85.838.601
2017	87.833.320
2018	88.145.055
2019	88.248.478
2020	88.585.951
2021	89.192.477



PENETAPAN KAWASAN HUTAN s.d JULI 2021 PER PROVINSI

PROVINSI	Luas SK	Unit
Aceh	926.198,05	19
Bali	137.428,10	25
Bangka Belitung	541.821,09	87
Banten	202.427,38	21
Bengkulu	705.347,88	54
DI. Yogyakarta	8.860,94	9
DKI. Jakarta	107.856,20	4
Gorontalo	805.288,76	32
Jambi	1.731.661,52	47
Jawa Barat	952.669,62	142
Jawa Tengah	787.379,02	138
Jawa Timur	971.201,09	146
Kalimantan Barat	6.434.147,08	175
Kalimantan Selatan	1.517.176,50	46
Kalimantan Tengah	4.094.155,81	30
Kalimantan Timur	7.970.231,23	87
Kalimantan Utara	3.567.354,97	23
Kep. Riau	104.105,77	27

PROVINSI	Luas SK	Unit
Lampung	603.237,44	29
Maluku	2.669.735,73	120
Maluku Utara	1.433.667,11	60
Nusa Tenggara Barat	1.187.580,98	62
Nusa Tenggara Timur	1.048.909,75	146
Papua	24.977.248,56	107
Papua Barat	8.121.898,63	39
Riau	2.117.002,32	52
Sulawesi Barat	1.061.994,40	19
Sulawesi Selatan	2.035.298,50	68
Sulawesi Tengah	2.570.986,95	63
Sulawesi Tenggara	3.263.657,61	46
Sulawesi Utara	381.359,44	60
Sumatera Barat	1.413.858,94	51
Sumatera Selatan	2.982.021,41	51
Sumatera Utara	1.758.708,39	48
Grand Total	89.192.477,15	2133

Total Luas Penetapan : 89.192.477 Ha
Jumlah Surat Keputusan Penetapan : 2.133 SK

PROGRES PELAKSANAAN PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN SD JULI 2021

BPKH	KEUANGAN			Target			Realisasi			
	PAGU	REALISASI	%	BL	BF	Total	BL		BF	Total TB Definitif
							TB Sementara	TB Definitif	TB Definitif	
BPKH I MEDAN*	22.612.419.000	1.633.693.800	7,22	2.481		2.481	136	170		170
BPKH II PALEMBANG	8.242.752.000	374.908.008	4,55	706		706	597			-
BPKH III PONTIANAK	8.506.982.000	2.792.869.205	32,83	819	217	1.036	819			-
BPKH IV SAMARINDA	9.705.185.000	2.601.288.283	26,80	589	264	853	416		170	170
BPKH VI MANADO	3.939.741.000	952.205.820	24,17	263	30	293	211		-	-
BPKH VII MAKASSAR	9.506.164.000	5.178.722.400	54,48	816	78	894	724	295	78	373
BPKH X JAYAPURA*	18.586.948.000	9.471.513.387	50,96	1.426	287	1.713	36	912	287	1.199
BPKH XI YOGYAKARTA	7.835.254.000	1.686.916.237	21,53	161	319	480	78		201	201
BPKH XII TANJUNG PINANG	1.576.247.000	1.464.919.628	92,94		285	285			285	285
BPKH XIII PANGKAL PINANG	3.927.049.000	1.332.004.367	33,92	255	27	282	43	51	21	73
BPKH XIV KUPANG	24.185.539.000	6.438.771.756	26,62	2.185	68	2.253	1.406	118		118
BPKH XVI PALU	22.457.804.000	10.324.775.710	45,97	2.626	995	2.626	1.498	450		450
BPKH XVII MANOKWARI	10.380.903.000	2.545.408.000	24,52	543	42	585	501	21		21
BPKH XVIII ACEH	4.182.072.000	2.379.139.658	56,89	241	265	506	235		300	300
BPKH XIX PEKANBARU	4.183.771.000	3.296.511.836	78,79	287	201	488	287	255	146	401
BPKH XX B. LAMPUNG**	3.118.306.000	1.195.704.634	38,34	8		8	8	8		8
BPKH XXI PALANGKARAYA*	21.811.000.000	5.394.146.645	24,73	1.916	1.282	3.198	1.254	722	522	1.244
BPKH XXII KENDARI	4235917000	968124600	22,86	334		334	216			-
TOTAL	188.994.053.000	60.031.623.974	31,76	15.657	4.361	19.022	8.465	3.002	2.011	5.013

• Termasuk penataan batas kawasan hutan dengan anggaran Food Estate

** Anggaran yang tercantum termasuk untuk melaksanakan orientasi batas sepanjang 624 km, dan rekonstruksi batas sepanjang 392 Km

PROGRES TORA S.D. JULI 2021

No	Kriteria	Luas Peta Indikatif Revisi V	Target 2015-2019	Progres Capaian Tahun														Total 2015-2019 (5+6+7+8+9+10+11+12+13)	Persen Capaian		
				2015	2016	2017	2018	2019			2020		2021								
								RTRW*	Add IUPHHK	Perubahan Batas (APL)	Perubahan Batas (APL)	SK Pelepasan Trans	RTRW Sulawesi Tengah	Perubahan Batas (APL)	SK Pelepasan dari HPK Tidak Produktif	Add IUPHHK	Peretujuan PB PPTKH Periode 1 (130 Kab) dan 2 (54 Kab) PB				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16			17	18	14	15		
1	Non-Eksisting (Non-Inver)	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	442.331	437.936	0	341.731	33.392	54.235	0	0	0					0	0	429.358	98%		
2		Hutan Produksi yang dapat DiKonversi (HPK) berhutan tidak produktif	1.129.178	1.590.000	0	0	0	938.878	0	0	0					1.591	0	0	938.878	59%	
3		Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	60.502	67.028	0	0	0	39.229	0	0	0					0	0	39.229	59%		
		Jumlah non eksisting	1.632.011	2.094.964	0	341.731	33.392	1.032.342	0	0	0					1.591			1.407.465	67%	
4	Eksisting (Inver)	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	458.829	502.382	0	41.367	9.342	213.870	0	0	0		2.772				0	0	267.351	53%	
5		Permukiman fasos dan fasum	654.002	642.835	0		0														
6		Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat	364.558	366.504	0	307.516	0		296.061	34.134	19.778	70.184		21.558	8.873		16.895	228.830	1.003.829	63%	
7		Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	1.737.444	590.000	0		0														
		Jumlah eksisting	3.214.833	2.101.721	0	348.883	9.342	213.870	296.061	34.134	19.778	70.184	2.772	21.558	8.873		16.895	228.830	1.271.180	60%	
		TARGET IKU	4.846.844	4.196.685		10%	30%	40%			340.000		46.500					65.000			
		REALISASI (APL) PERTAHUN			0	690.614	42.734	268.105			349.973		72.956					32.023			
		REALISASI (APL) AKUMULASI			0	690.614	733.348	1.001.453			1.351.426		1.424.382					1.456.405			
		PROGRES (APL+KH) AKUMULASI	4.846.844		0	690.614	733.348	1.979.560			2.329.533		2.402.489					2.678.645			
		Persen Capaian Progres			0%	16%	17%	47%			56%		57%					64%			

PROGRES PELAKSANAAN PENATAAN BATAS TORA S.D. JULI 2021

PROVINSI	Keuangan			Target	Realisasi	KETERANGAN
	Pagu	Realisasi	%	Trayek (km)	Trayek (km)	
SUMATERA UTARA	6.431.572.000	3.837.318.942	59,66	959,73	329,44	Proses pelaksanaan penataan batas pada 4 Kab.
SUMATERA SELATAN	4.237.626.000	3.448.628.101	81,38	779	779,79	
KALIMANTAN BARAT	2.068.129.000	331.985.438	16,05	414	0	Proses pelaksanaan penataan batas pada 1 Kab.
KALIMANTAN TIMUR	1.002.000.000	-	0,00	8	0	Proses pelaksanaan penataan batas pada 1 Kab.
KALIMANTAN UTARA				93	0	Proses pelaksanaan penataan batas pada 1 Kab.
KALIMANTAN SELATAN	3.883.108.000	1.268.673.135	32,67	732,2	235	Belum adanya perintah tata batas pada 3 Kab.
SULAWESI UTARA	2.373.935.000	1.730.939.000	72,91	72,54	72,57	
MALUKU UTARA				242,46	248,56	
SULAWESI SELATAN	3.049.531.000	1.205.660.400	39,54	325	0	Proses pelaksanaan penataan batas pada 4 Kab.
SULAWESI BARAT				86	0	Proses pelaksanaan penataan batas pada 1 Kab.
MALUKU	1.675.553.000	12.189.600	0,73	259	0	Belum adanya perintah tata batas pada 1 Kab.
PAPUA	2.532.319.000	112.846.800	4,46	296	0	Belum adanya perintah tata batas pada 4 Kab.
KEP. RIAU	1.500.000.000	-	0,00	208	0	Pelaksanaan tata batas menunggu SK Menteri terkait persetujuan lokasi penataan batas HPK non produktif untuk penyelesaian TORA di 1 Kab.
NTT	990.472.000	-	0,00	117		Belum adanya perintah tata batas pada 2 Kab.
GORONTALO	1.508.680.000	1.414.320.400	93,75	227	227	
SULAWESI TENGAH	2.723.944.000	2.098.641.100	77,04	419	419	
PAPUA BARAT	3.756.919.000	2.787.617.888	74,20	332	332	
ACEH	395.423.000	17.718.600	4,48	24	0	Belum adanya perintah tata batas pada 2 Kab.
RIAU	1.730.817.000	1.421.273.230	82,12	277,729	247	
BENGKULU	736.765.000	115.230.040	15,64	38	0	Belum adanya perintah tata batas pada 3 Kab.
KALIMANTAN TENGAH	5.139.294.000	4.142.478.630	80,60	1145,65	1145,65	
SULAWESI TENGGARA	1.894.149.000	1.529.324.000	80,74	175	164,36	
TOTAL	47.630.236.000	25.474.845.304	53,48	7230,309	4200,37	

CAPAIAN KINERJA BSI

Produk Litbang Inovatif dan Implementatif

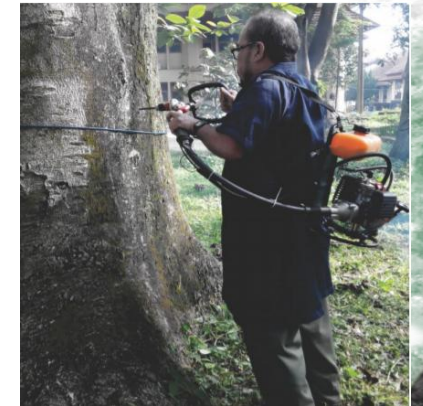
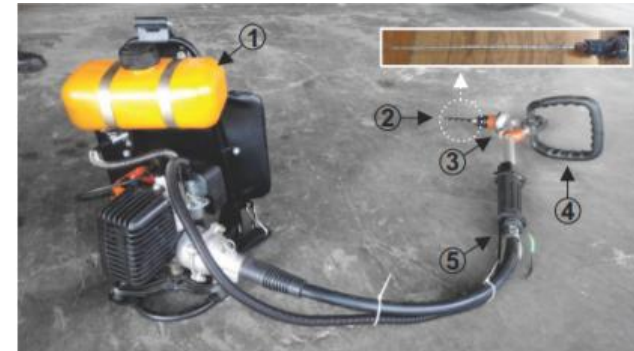
Pengembangan Kayuputih Benih Unggul Sebagai Model Industri Kayuputih Skala Kecil untuk Meningkatkan Produksi Minyak Kayuputih Skala Nasional



Plotting desain dan penanaman di Lamongan, Jawa Timur; Melaksanakan kegiatan distribusi bibit di Lamongan Jawa Timur



Prototipe alat deteksi pohon gerowong mekanis “Algromek”



Penggunaan Algromek untuk kegiatan ITSP (inventarisasi tegakan sebelum penebangan) sangat membantu meningkatkan akurasi jumlah pohon gerowong layak tebang berlabel ID barcode sehingga dapat meningkatkan produksi kayu bulat dari hutan alam. Penggunaan Algromek dapat dilakukan juga pada semua jenis dan lokasi pohon yang diduga berlubang. Sumber: forpro.org

Pendampingan Proses Akreditasi Laboratorium Lingkungan



Tim Puslitbang Kualitas Laboratorium Lingkungan (P3KLL) melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Akreditasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Laboratorium Lingkungan (DLH) dalam rangka program prioritas nasional sertifikasi laboratorium lingkungan di UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, (15 – 18 Juni 2021).

Pemanfaatan Obat-Obatan Berbasis HHBK Oleh Masyarakat Dan Upaya Pemberdayaannya



Sosialisasi kepada masyarakat di Nusa Penida Bali tentang pemanfaatan tanaman obat berbasis HHBK

Penelitian Akar Kuning (*fibraurea tinctoria*)



Eksplorasi penyebaran akar kuning dan pengambilan sampel tanah sebagai data lingkungan habitat akar kuning, yang digunakan sebagai penguat daya tahan tubuh, hepatitis, malaria dan diabetes.



Kegiatan survey potensi wisata alam di KHDTK Kaliurang sebagai jalur tracking dari level sedang sampai ekstrim, Tim juga merencanakan pembangunan Gasebo dan menara di puncak Gandok dengan view Gunung Merapi. Potensi Jasa Lingkungan dan Wisata Alam merupakan salah satu penyumbang PNBP.



TRANSISI BLI MENJADI BSI

PERPRES 33/2021 BRIN
LITBANGJIRAP DIINTEGRASIKAN
KE BRIN
IMPLIKASI:

- Program **litbangjirap** dikoordinasikan BRIN
- Lembaga litbangjirap oleh BRIN
- **Peneliti/teklit BLI** diintegrasikan ke BRIN
- **Pembiayaan** litbangjirap di BRIN

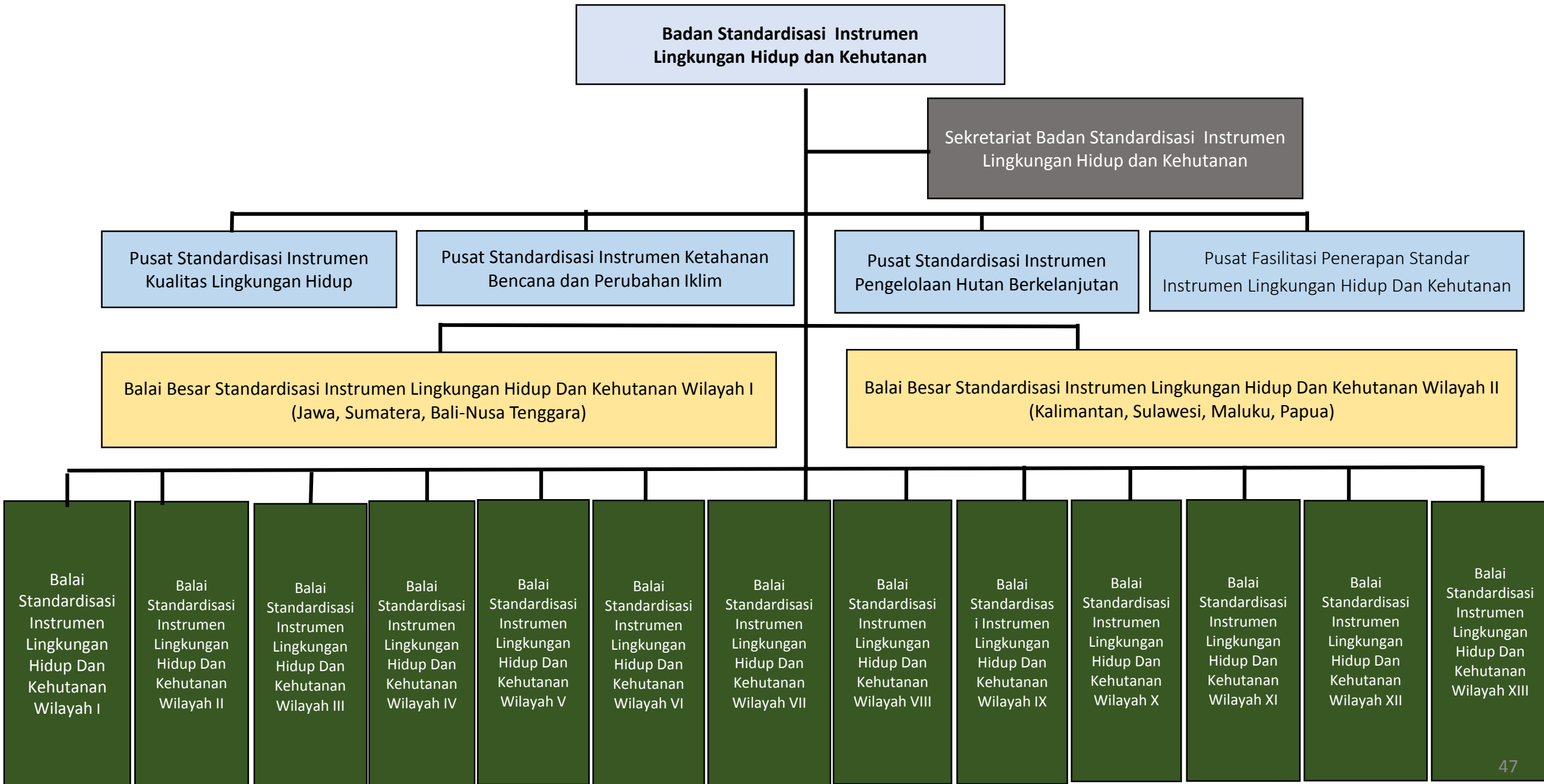


PERPRES 92/2020 KLHK,
PERMENLHK 15/2021 SOTK
KLHK

IMPLIKASI:

- **BLI tidak ada lagi**
- Dibentuk **Lembaga baru** yaitu BSI
- BSI melaksanakan tugas pembangunan dan implementasi **standard LHK**

P.15/2021 STRUKTUR ORGANISASI BSI LHK



MODALITAS BSI



Sumberdaya Manusia

- ❑ PNS **1.373**
- ❑ Tenaga kontrak **384**
- ❑ Peneliti 480, Teklit 216, Prof Riset 27, kepakaran 59 (sebagian besar kepakaran "silvikultur", melaksanakan litbangjirap dari hulu ke hilir)
- ❑ Doktor 116 , Master 407, Sarjana 363, Diploma 55
- ❑ Pedal 16, Anjak 2, PBJ 9, Arsiparis 9, Analis kepegawaian 7, Pranata Humas 1, Pustakawan 18, Prakom 7



Sarana Prasarana

- ❑ **Gedung Kantor:** Kampus BLI Gunung Batu dan Gedung P3KLL Serpong, 15 kantor UPT
- ❑ **BLI mengampu 18 Jurnal ilmiah:** terakreditasi nasional dan 1 jurnal terideks Scopus
- ❑ **BLI mengelola Perpustakaan terakreditasi A,** 14.000 koleksi pustaka
- ❑ **BLI mengelola 83 laboratorium:** 1 rujukan nasional, 77 lab pengujian/analisis, 5 arboretum/ persemaian/ greenhouse
- ❑ **Rujukan** 203.809 koleksi Xylarium (no 1 dunia disusul Belanda & USA), 3.400 Koleksi Mikroba Hutan, 8.000 Koleksi Herbarium
- ❑ **KHDTK** dan Hutan Penelitian: 38 KHDTK luas +/- 34.494 ha
- ❑ 12 satuan kerja berpredikat **Pusat Unggulan Iptek** (PUI) yang memiliki peta jalan litbangjirap yang jelas
- ❑ 12 satker telah terakreditasi **KNAPPP (Komite Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan)**
- ❑ ITPC: **pusat belajar gambut** dunia
- ❑ WMC: the World **Mangrove** Center-inisiatif baru Mangrove dunia



Jaringan Kerja internasional

ASOF, ASOEN, ASEAN, ACIAR, CIFOR, ICRAF, IUFRO, IRP-UNEP, UNFF, AFoCO, Komatsu, ITTO, FAO, World Bank, USAID, APFNet

PROGRES TRANSISI

Sumberdaya BLI menjadi MODALITAS BSI

STRATEGI: REVISI ADMINISTRASI NOMENKLATUR, PENYESUAIAN RO/KRO/Indikator Kinerja:

kegiatan masih berjalan seperti biasa, tidak likuidasi/pembubaran

2021transisi: melanjutkan Prinas BLI, Program Riset dan Inovasi IPTEK, Program Kualitas LH +, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Program dukungan Manajemen (termasuk keg.Fasilitasi Penerapan Standar Instrumen LHK)

2022^{dst}: NSPK, Sertifikasi lembaga (lembaga), Standardisasi lembaga (lembaga), Standardisasi Produk (Produk), Akreditasi Lembaga (lembaga), dukungan manajemen

PROGRAM

ANGGARAN

Berasal dari pagu Badan Litbang dan Inovasi ~ Rp 301 Milyar, 2021 sisa cut off anggaran BLI

ASET

Pemindahan administrasi pencatatan BMN BLI menjadi BMN BSI, Status KHDTK dikelola BSI

SATGAS TRANSISI BSI
TIM MANAJEMEN BSI

SDM

Penataan
Satker

1. Peneliti dan teknisi litkayasa dijajagi status kepegawaiannya di BRIN
2. Penjajagan organisasi riset di BRIN
3. Diskusi tentang bentuk legalitas fungsi peneliti/teklit di KLHK/BSI
4. Birokrasi berbasis fungsi: Penyetaraan jabatan administrator ke jabatan fungsional

Satuan Kerja Daerah menunggu Persetujuan KemPANRB, Satker Daerah masih menjalankan fungsi litbang

01



- PENYEMPURNAAN RENSTRA BSI: Produksi standard, implementasi standard, pengawasan/pengendalian implementasi standard
- PENETAPAN KRO/RO/IKK BSI 2021 & 2022
- PROSES PENERBITAN DIPA BSI 2021
- PENUNJUKKAN PERSONIL DIPA BSI 2021

- KOORDINASI PERSETUJUAN SOTK SATKER DAERAH
- PENATAAN SETBSI & PUSAT-PUSAT



02

03



- Mencari bentuk legalitas peneliti/teklit di KLHK
- Koordinasi status kepegawaian peneliti/teklit di BRIN
- Koordinasi lembaga Litbang LHK di BRIN
- Penataan menjadi birokrasi berbasis fungsional

- PEMBANGUNAN SISTEM KERJASAMA, EVALUASI, PELAYANAN PUBLIK, PENGENDALIAN RISIKO BSI
- PEMBANGUNAN BRANDING BSI
- PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI



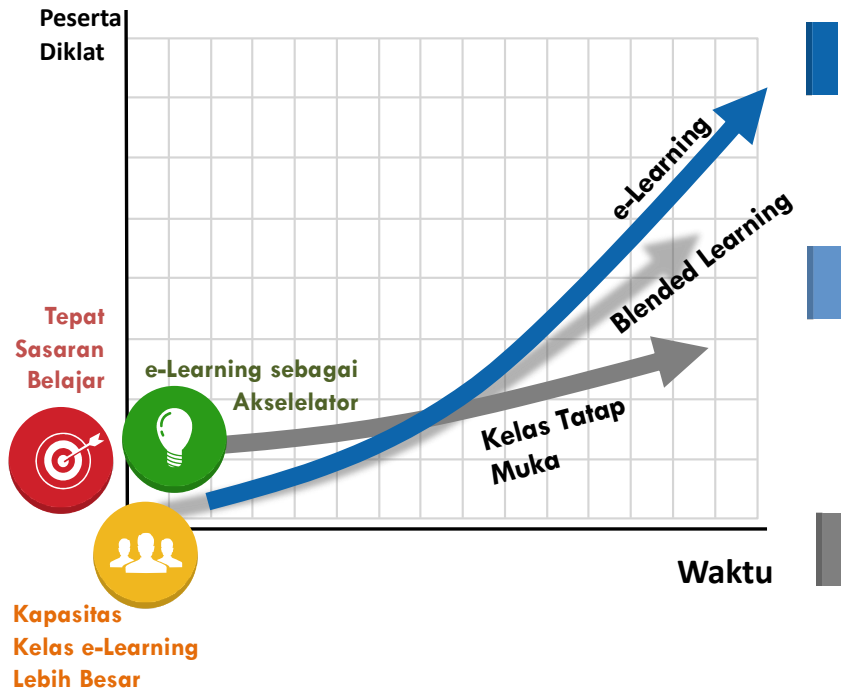
04

LANGKAH
BERIKUTNYA

PENINGKATAN KAPASITAS SDM LHK

Pelaksanaan E-LEARNING

untuk Mengakselerasi Pencapaian Target Pengembangan SDM LHK



E-Learning : membuka kesempatan belajar yang lebih luas karena tidak dibatasi waktu dan tempat untuk belajar.

Kelas Tatap Muka memiliki keterbatasan pada waktu, kapasitas kelas fisik dan pengajar.

Blended Learning : untuk mendapatkan hasil pelatihan yang optimal dengan mengkombinasikan manfaat dan kelebihan dari e-Learning dan kelas tatap muka.

- Peningkatan kapasitas bagi SDM Aparatur, pelatihan keterampilan bagi SDM Non Aparatur/ Masyarakat, dan uji kompetensi
- Akibat Pandemi Covid-19, pelaksanaan pelatihan dilakukan secara virtual melalui **E-Learning**.
- Pelatihan kepada masyarakat yang berada di lokasi sulit jaringan harus dilakukan secara tatap muka, namun karena adanya kebijakan PPKM, maka terdapat beberapa pelatihan yang mengalami penundaan sampai dengan saat ini

1. Pelatihan SDM Aparatur

Target = 1.297 orang
Capaian = 658 orang (50,73%)

2. Pelatihan SDM Non Aparatur

Target = 2.744 orang
Capaian = 2.714 orang (98,91%)

3. Pelatihan Vokasi

Target = 1.338 orang
Capaian = 318 orang (23,77%)

4. Pelatihan Masyarakat

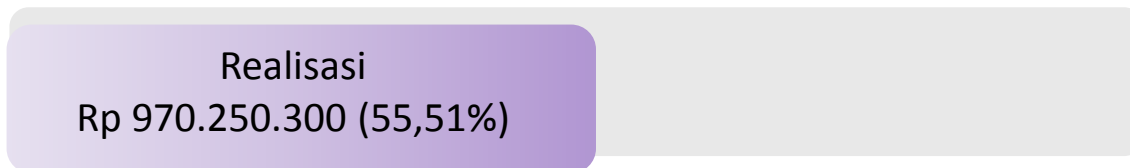
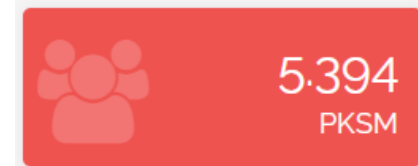
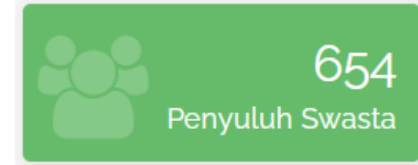
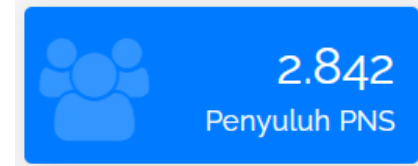
Target = 945 orang
Capaian = 790 orang (83,60%)

5. Uji Kompetensi

Target = 1.000 orang
Capaian = 735 orang (73,50%)

PENYULUH

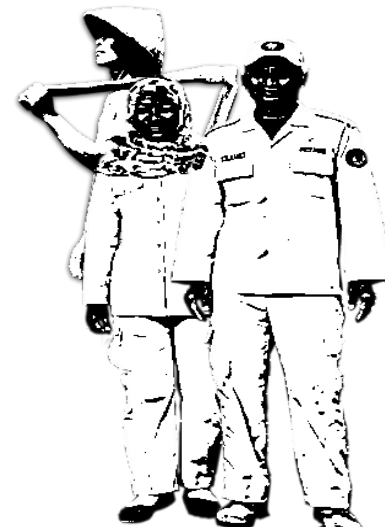
- Total Penyuluh di Indonesia **8.890 orang**
- Peningkatan Kapasitas bagi Penyuluh dengan target 1.000 orang → tercapai 918 orang
- Kegiatan dilakukan secara virtual melalui kegiatan **Temu Teknis Online** berdasarkan regional, **Bimbingan teknis** serta **Asistensi Online Pendamping Kelompok Perhutanan Sosial** dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
- Pelaksanaan Pendampingan (PEN) langsung pada *site* namun saat ini masih terkendala kebijakan PPKM dan kondisi pandemi.
- Masih terdapat kegiatan yang akan dilaksanakan berupa Temu Teknis, Sekolah Lapang, Pemberian Penghargaan kepada Penyuluh melalui Lomba Wana Lestari



Peningkatan Kapasitas Penyuluh Handal
Pagu Rp1.747.985.000



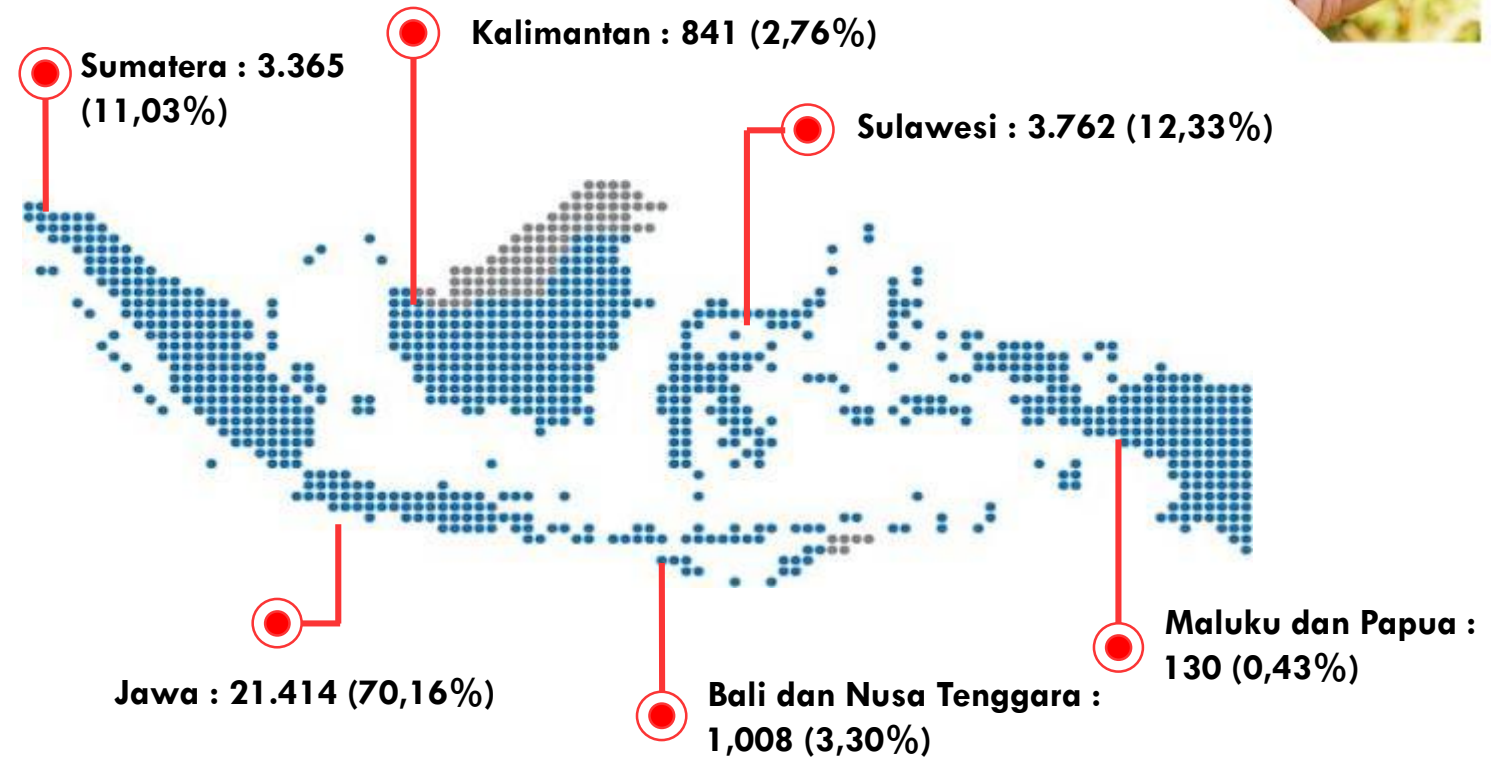
Pendamping Kelompok Hutsos (PEN)
Pagu Rp1.000.000.000



Kelompok Tani Hutan (KTH)



- KTH merupakan sasaran pendampingan dan pemberdayaan masyarakat oleh penyuluh kehutanan.
- Pendampingan KTH dilakukan berdasarkan 3 Kelola, yaitu: **Kelola Kelembagaan, Kelola Kawasan dan Kelola Usaha**, secara serasi dan seimbang
- Jumlah KTH di seluruh Indonesia **30.508** (Agustus 2021)
- Tersebar di 34 provinsi, (Jawa 70,16%, Luar Jawa 29,84%).

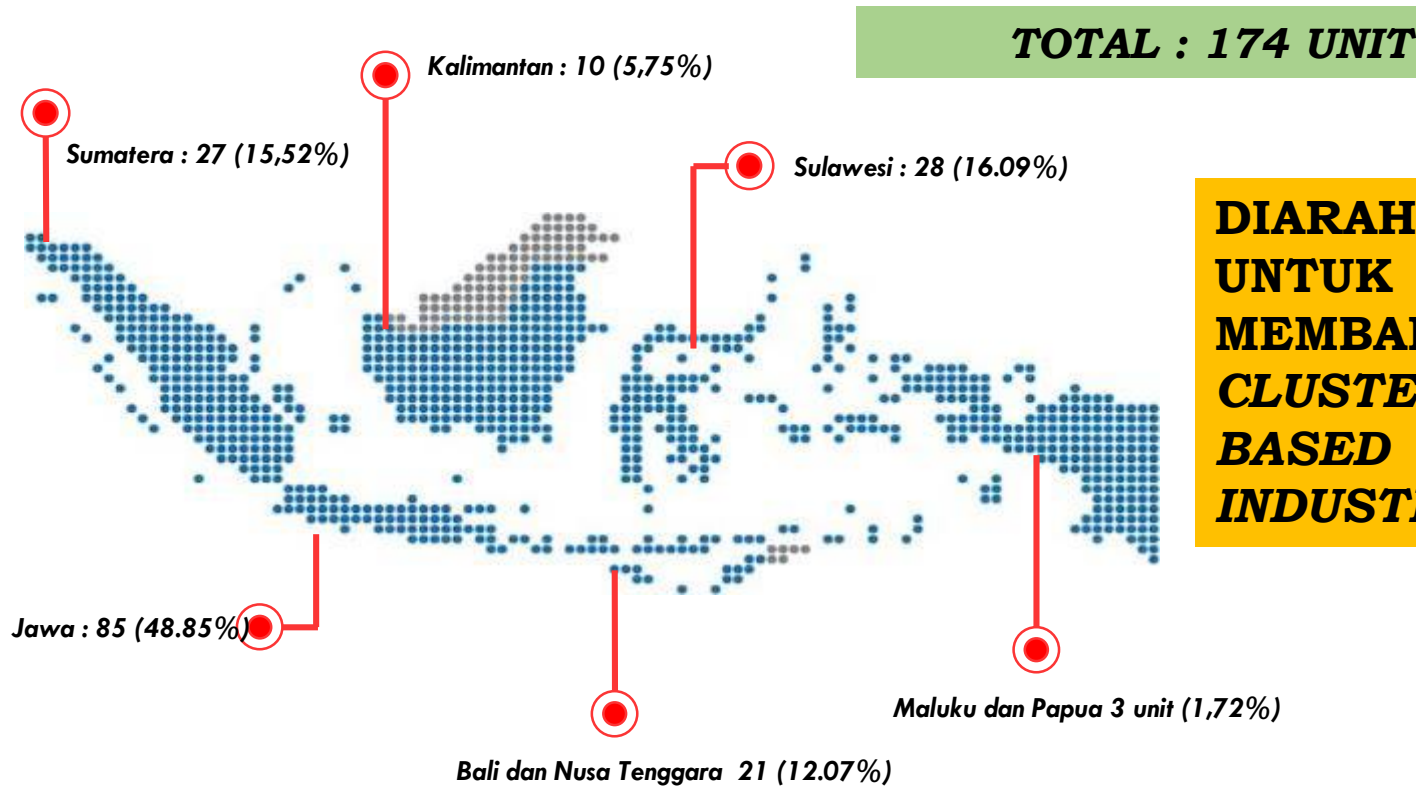


Sebaran KTH berdasarkan wilayah

Sumber : <http://simluh.bp2sdm.menlhk.go.id/> (Agustus 2021)

LP2UKS/WANAWIYATA WIDYAKARYA (PERMENLHK NO. 61/2015)

LP2UKS = Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan; yang dimiliki dan dikelola secara swadaya oleh Kelompok Masyarakat/Perorangan sebagai **tempat pelatihan dan pemagangan** yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan



**DIARAHKAN
UNTUK
MEMBANGUN
CLUSTER
BASED
INDUSTRY**

14 KOMODITI PRIORITAS YANG DIUSAHAKAN

NO.	KOMODITI
1	Lebah Madu
2	HR/Agroforestry
3	Wisata Alam
4	Aren
5	Bambu
6	Mangrove
7	Minyak Atsiri (Nilam, Kayu Putih)
8	Jamur Tiram
9	Kopi
10	Ulat Sutera
11	Gaharu
12	Konservasi Flora/Fauna
13	Cuka Kayu/ Asap Cair
14	Kerajinan/Souvenir

Sebaran LP2UKS berdasarkan wilayah

Sumber : <http://simluh.bp2sdm.menlhk.go.id/> (Agustus 2021)



CAPAIAN PERHUTANAN SOSIAL SAMPAI DENGAN 10 AGUSTUS 2021

Realisasi per Skema

NO	SKEMA	LUAS (HA)
1	HD	1,869,661.36
2	HKM	834,706.05
3	HTR	349,981.58
4	KEMITRAAN KEHUTANAN	
	A. KULIN KK	481,229.56
	B. IPHPS	35,613.23
5	HA*)	1,150,198.00
JUMLAH		4,721,389.78

REALISASI

4.721.389,78 Ha

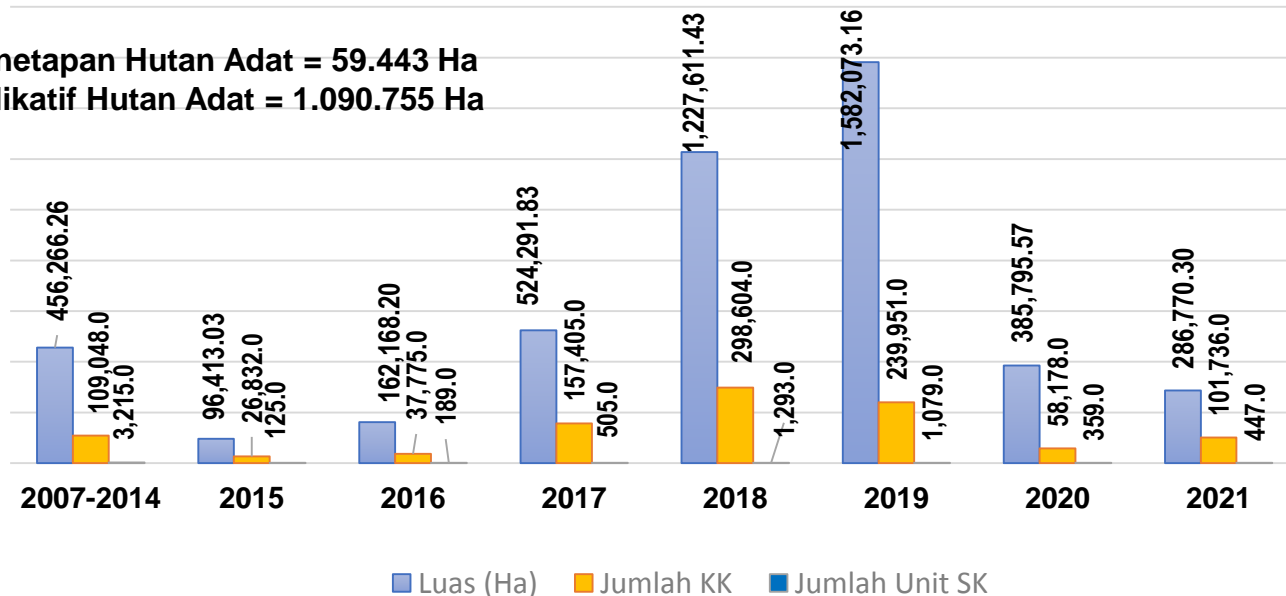
± 1.029.529 KK

7.212 Unit SK

Ijin/Hak

- *)
- Penetapan Hutan Adat = 59.443 Ha
 - Indikatif Hutan Adat = 1.090.755 Ha

Realisasi per Tahun



NO	PROVINSI	REALISASI		JML SK (Unit)	JML KK
		Alokasi	Capaian		
		LUAS (Ha)	LUAS (Ha)		
1	ACEH	440,188	239,473.38	58	20,657
2	SUMATERA UTARA	582,604	70,426.51	136	17,500
3	SUMATERA BARAT	694,252	233,229.16	249	134,646
4	RIAU	1,297,843	126,431.36	82	25,529
5	JAMBI	356,490	200,987.95	408	37,002
6	SUMATERA SELATAN	372,525	120,691.59	181	27,478
7	BENGKULU	148,040	75,152.28	128	16,170
8	LAMPUNG	387,880	221,661.01	360	82,435
9	KEP BANGKA BELITUNG	143,873	41,334.72	373	18,155
10	KEP RIAU	147,766	33,005.00	29	4,724
11	JAKARTA	-	-	-	-
12	JAWA BARAT	32,076	36,802.99	130	20,448
13	JAWA TENGAH	37,107	37,595.59	88	19,520
14	YOGYAKARTA	3,339	1,565.88	45	5,005
15	JAWA TIMUR	148,734	176,736.97	348	119,507
16	BANTEN	10,159	18,509.34	28	10,870
17	BALI	19,574	20,077.91	109	58,064
18	NUSA TENGGARA BARAT	285,098	39,467.55	178	27,036
19	NUSA TENGGARA TIMUR	496,083	55,454.73	218	18,311
20	KALIMANTAN BARAT	1,489,207	609,584.93	200	79,617
21	KALIMANTAN TENGAH	1,136,611	276,271.77	188	28,369
22	KALIMANTAN SELATAN	161,668	67,701.02	149	19,165
23	KALIMANTAN TIMUR	444,691	231,584.36	113	14,314
24	KALIMANTAN UTARA	273,903	501,468.92	76	9,934
25	SULAWESI UTARA	123,897	37,104.35	207	4,460
26	SULAWESI TENGAH	376,337	217,261.62	1,239	29,729
27	SULAWESI SELATAN	444,807	305,394.95	636	62,937
28	SULAWESI TENGGARA	295,867	94,332.32	234	20,201
29	GORONTALO	50,091	24,597.01	152	14,512
30	SULAWESI BARAT	110,905	47,187.82	471	6,296
31	MALUKU	224,472	187,641.72	127	27,830
32	MALUKU UTARA	228,848	166,506.89	140	31,898
33	PAPUA BARAT	669,544	92,841.19	78	7,697
34	PAPUA	2,427,082	113,306.99	54	9,513
TOTAL		14,061,562	4,721,389.78	7,212	1,029,529

PENETAPAN HUTAN ADAT 2016-2021

SUMATERA UTARA

2016

2017

2018

2019

2020

2021

S/D JULI 2021

8
UNIT

9
UNIT

17
UNIT

31
UNIT

10
UNIT

5
UNIT

JAMBI
SULAWESI TENGAH
SULAWESI SELATAN
BANTEN

JAMBI
SULAWESI TENGAH
KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TIMUR

JAMBI
JAWA BARAT
KALIMANTAN BARAT
SULAWESI SELATAN

- BALI
- BANTEN
- JAMBI
- JAWA TENGAH
- KALIMANTAN BARAT
- KALIMANTAN TENGAH
- RIAU
- SULAWESI SELATAN
- SULAWESI TENGAH
- SUMATERA BARAT
- SUMATERA SELATAN

KALIMANTAN BARAT
KALIMANTAN TIMUR
JAMBI
MALUKU
SUMATERA UTARA
SUMATERA SELATAN

BALI
MALUKU

± 7.950 HA
± 4959 KK

± 3.341 HA
± 3284 KK

± 6.309 HA
± 5190 KK

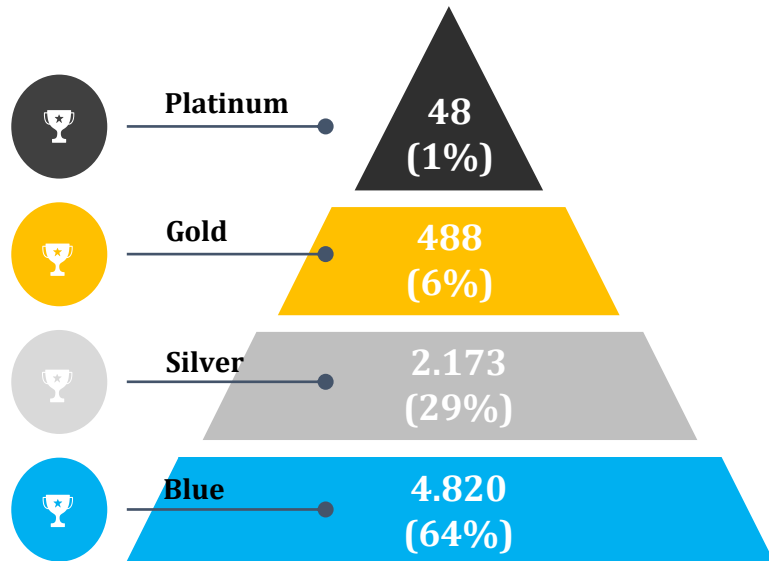
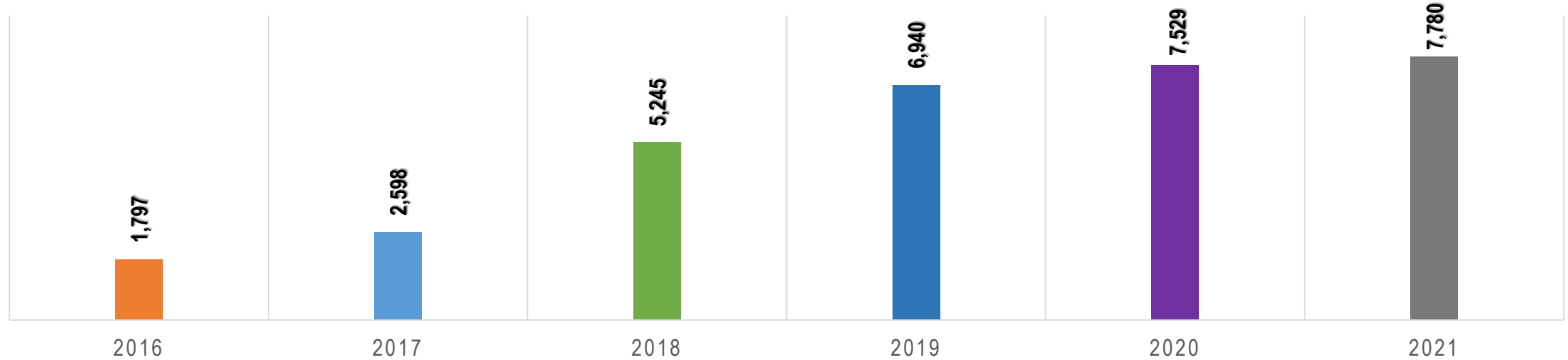
± 17.490 HA
± 23.005 KK

± 21.752 HA
± 2933 KK

± 535 HA
± 2667 KK

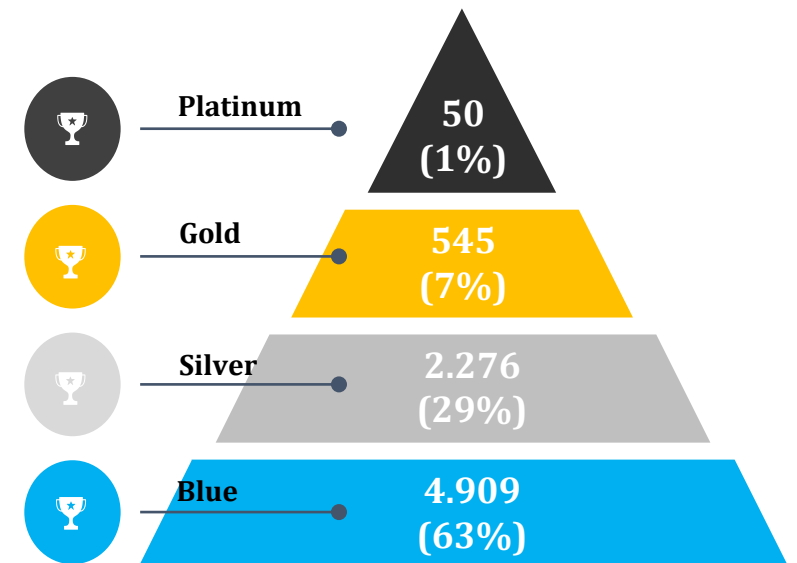
TOTAL 80 UNIT : 59.442 HA; 42.038 KK

PEMBENTUKAN KELOMPOK USAHA PS DAN PENINGKATAN KELAS KUPS

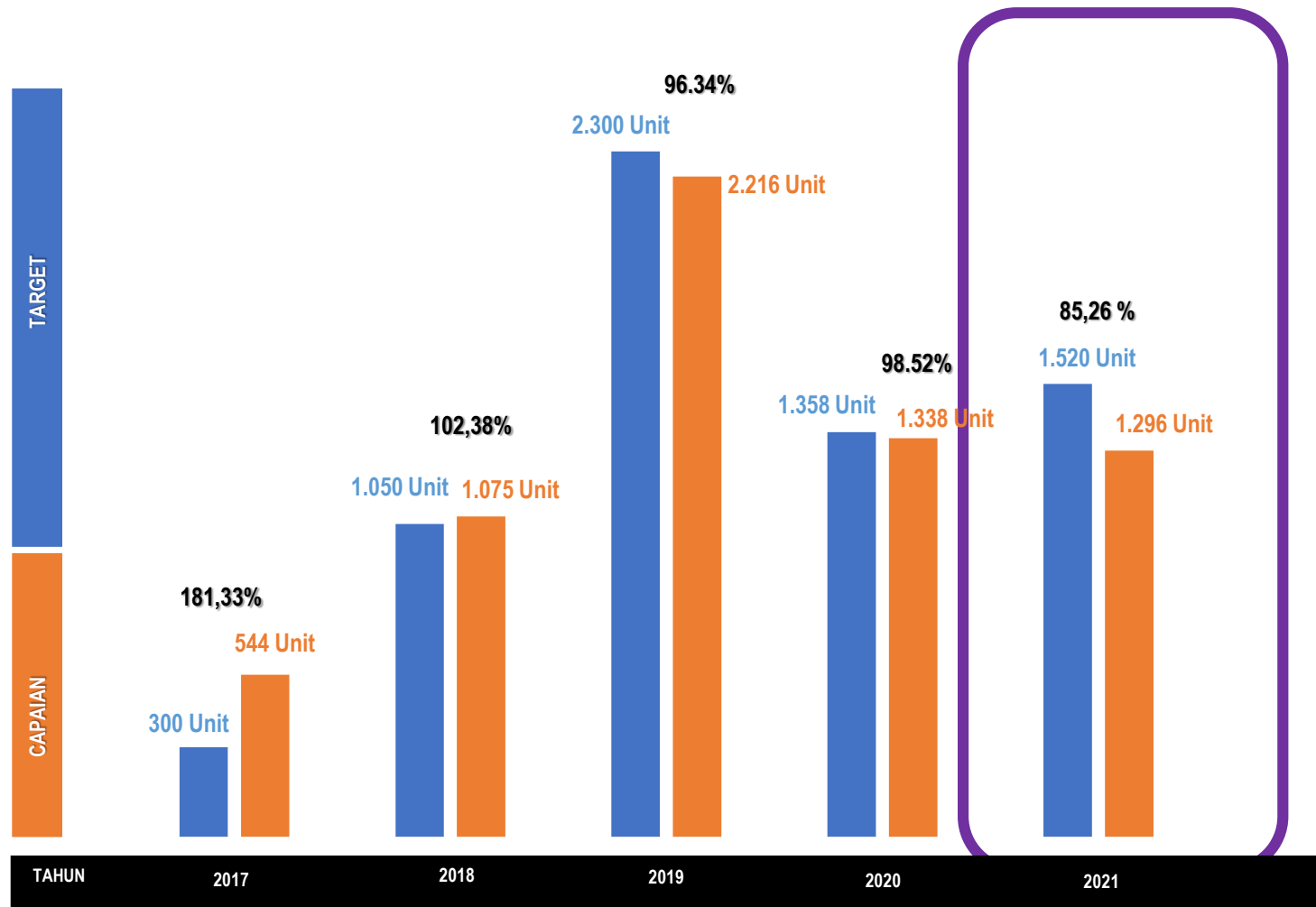


61 KUPS MENINGKAT KELAS

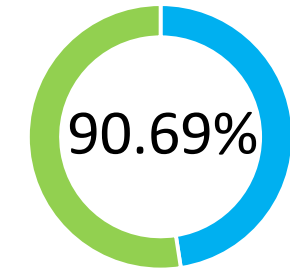
**2 KUPS MENJADI PLATINUM
59 KUPS MENJADI GOLD**



FASILITASI PENINGKATAN NILAI TAMBAH HASIL HUTAN DAN JASA LINGKUNGAN



Bang PeSoNa

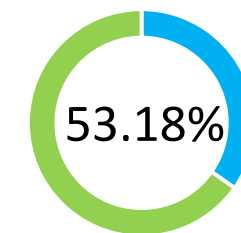


Realisasi Target

Target	1.300
Realisasi	1.179

- 30 Unit Bang Pesona baru akan verifikasi teknis
- 91 Unit Bang Pesona dalam proses verifikasi admin

BEP

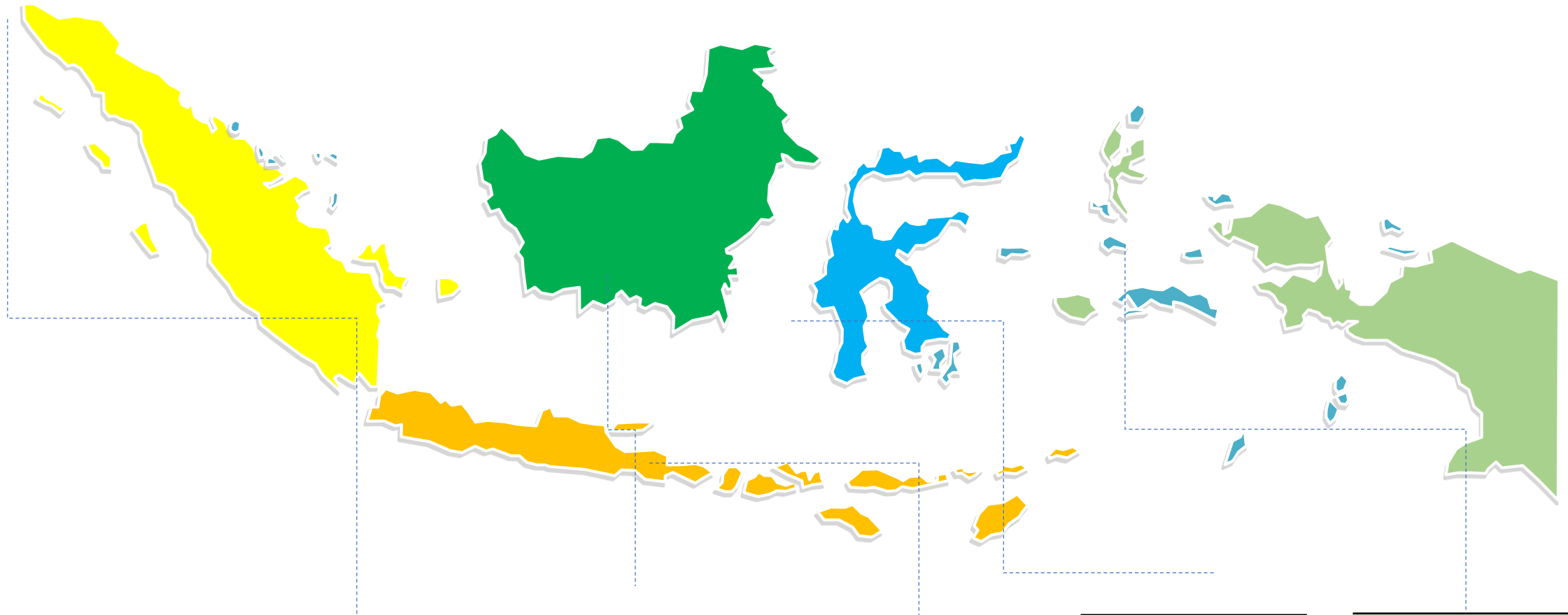


Realisasi Target

Target	220
Realisasi	117

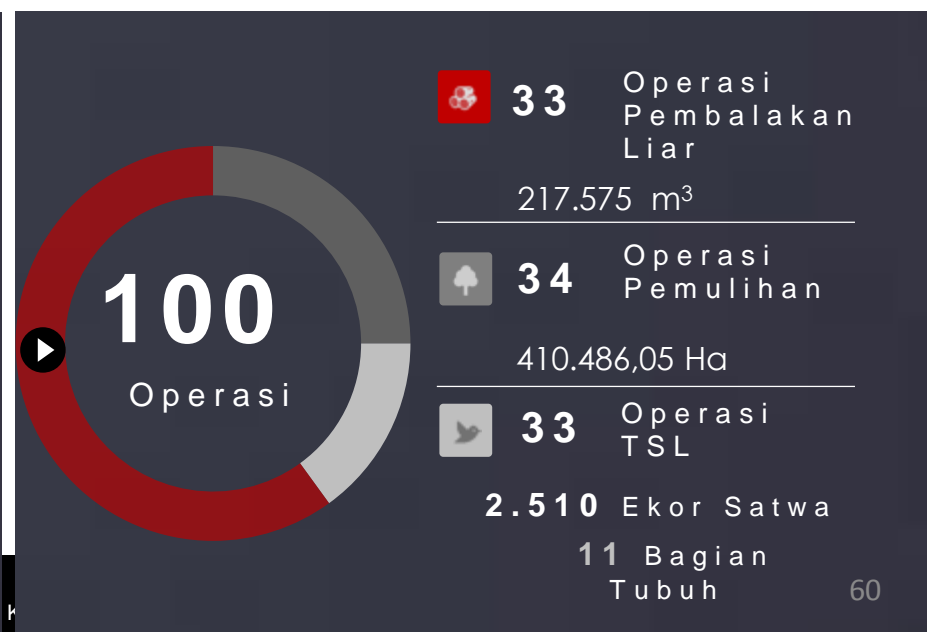
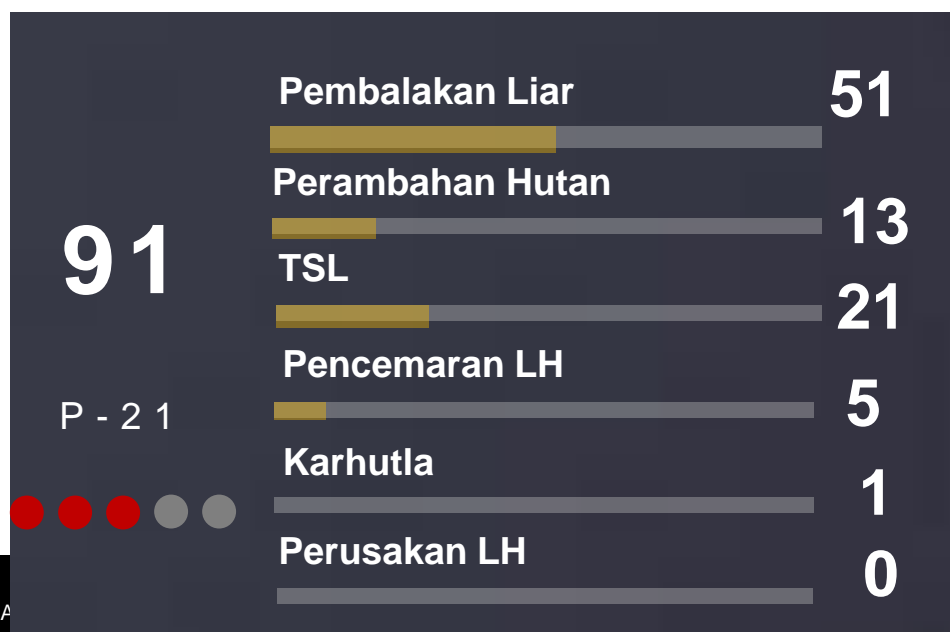
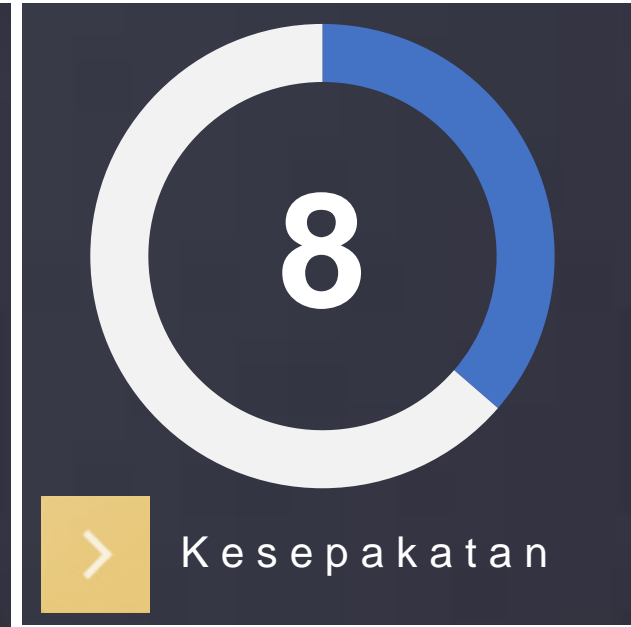
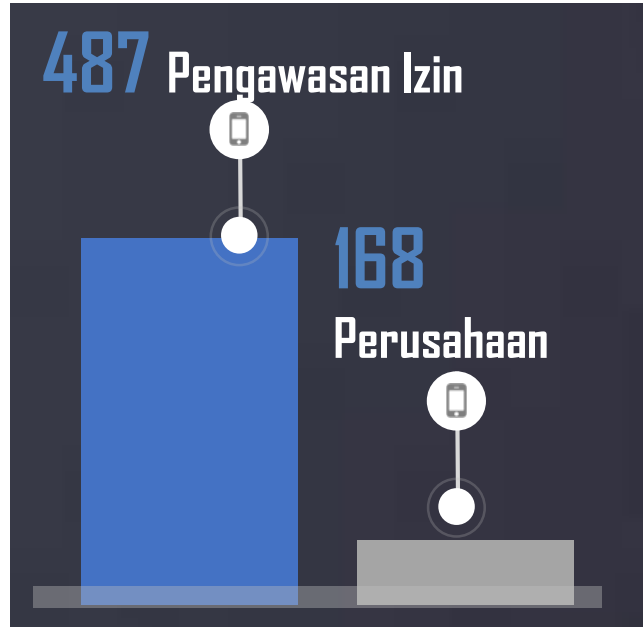
114 Unit AEP dalam Tahap Verifikasi Administrasi, Vertek dan Proses kontrak

CAPAIAN KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA TA. 2021



No	Kegiatan	Sumatera		Kalimantan		Jabalnur		Sulawesi		Maluku & Papua	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Penyusunan Rencana	68	30	76	41	48	50	67	66	31	17
2	Peningkatan KUPS	16	0	14	0	15	10	8	133	8	0
3	AEP	50	42	52	11	45	25	45	28	28	11
4	Bang PeSoNa	-	216	-	146	-	544	-	151	-	122
5	Pembentukan KUPS	-	32	-	28	-	94	-	82	-	26

KINERJA PENEGAKAN HUKUM LHK TAHUN 2021

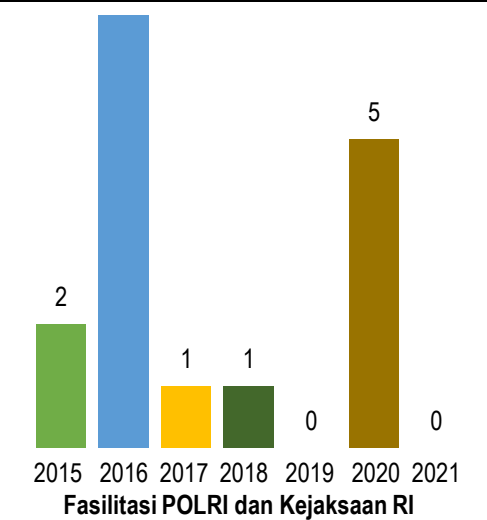
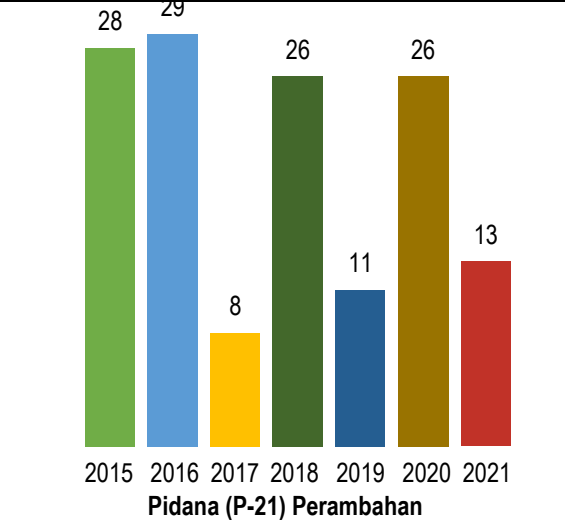
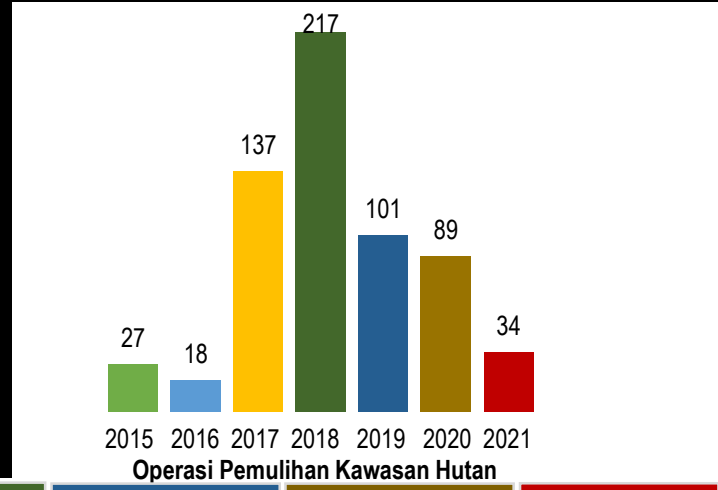


HASIL KERJA PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PERAMBAHAN DAN PEMBALAKAN LIAR TAHUN 2021

623 Operasi Pengamanan Kawasan Hutan
25.456.647,8 Ha

141 Pidana (P-21)

16 Fasilitasi POLRI dan Kejaksaan RI

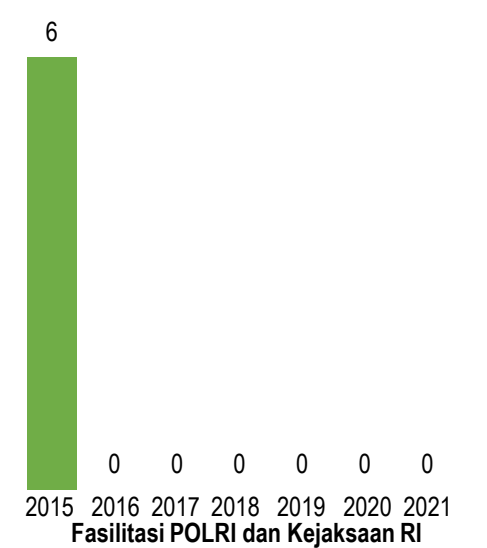
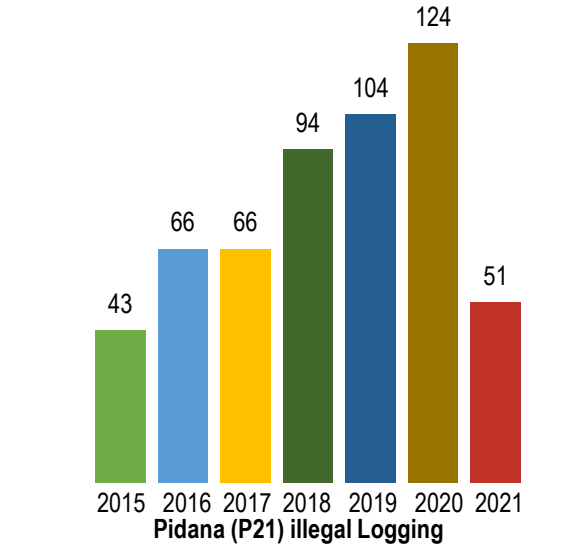
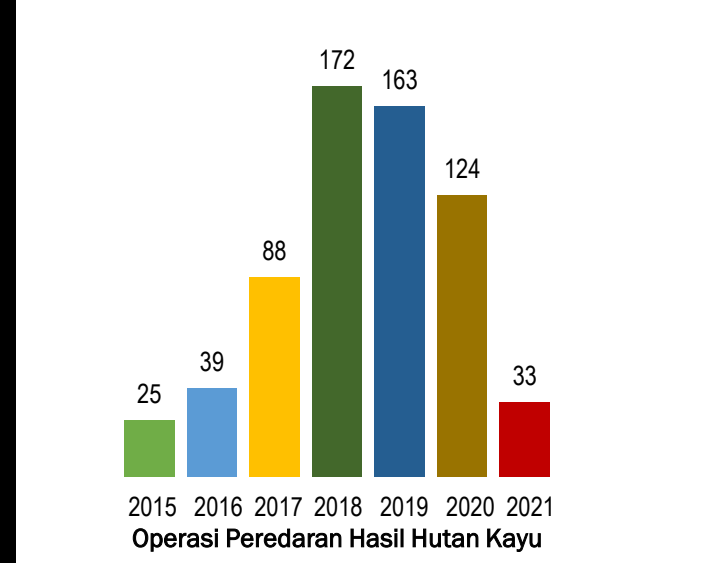


3.072.198	988.529	3.005.360	5.641.925	9.927.442,66	2.412.707,10	410.486,05
-----------	---------	-----------	-----------	--------------	--------------	------------

644 Operasi Pembalakan Liar
256.018,74 m³

548 Pidana (P-21)

6 Fasilitasi POLRI dan Kejaksaan RI



1.041,83	3.642	3.819,76	11.122,58	17.143,34	1.674	217.575
----------	-------	----------	-----------	-----------	-------	---------

PENANGANAN PENGADUAN TAHUN 2021

PENANGANAN PENGADUAN TAHUN 2021

* Data per tanggal 13 Agustus 2021

A. Aduan Berdasarkan Status Penanganan

Keterangan	Baru	Menunggu Persetujuan	Selesai	Verifikasi Administratif	Verifikasi Lapangan	Grand Total
JABALNUSRA		6	61	8	19	94
KALIMANTAN	18		45	1	45	109
MAPUA			17	1		18
PPSA	89		120	13	10	232
SULAWESI	42	1	8	1	14	66
SUMATERA	78	7	23		21	129
Grand Total	227	14	274	24	109	648

B. Aduan berdasarkan kategori aduan

Keterangan	Kehutanan	Lingkungan Hidup	Grand Total
JABALNUSRA	49	45	94
KALIMANTAN	73	36	109
MAPUA	3	15	18
PPSA	75	157	232
SULAWESI	32	34	66
SUMATERA	89	40	129
Grand Total	321	327	648

C. Aduan berdasarkan kategori Terlapor

Keterangan	Non Perusahaan	Perusahaan	Grand Total
JABALNUSRA	50	44	94
KALIMANTAN	62	47	109
MAPUA	1	17	18
PPSA	102	130	232
SULAWESI	35	31	66
SUMATERA	66	63	129
Grand Total	316	332	648

TINDAK LANJUT UU CK

Telah dibentuk Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Undang-Undang tentang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Undang-Undang tentang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh bidang dalam Kelompok Kerja yang meliputi:

- a. Kelompok Kerja I sosialisasi;
- b. Kelompok Kerja II *inventory* dan analisis konsekwensi implementasi regulasi;
- c. Kelompok Kerja III standardisasi dan penerapan standard;
- d. Kelompok Kerja IV asistensi perizinan berusaha berbasis *risiko risk based approach*;
- e. Kelompok Kerja V konsolidasi data dan penyelesaian keterlanjuran;
- f. Kelompok Kerja VI pengembangan dan integrasi sistem tata kelola;
- g. Kelompok Kerja VII penataan kawasan dan tata kelola hutan;
- h. Kelompok Kerja VIII finalisasi perhutanan sosial;
- i. Kelompok Kerja IX pengembangan kelembagaan dan asistensi daerah (nilai-nilai, rencana, program, tim kerja dan lain-lain); serta
- j. Kelompok Kerja X transisi regulasi dan pengendalian konsekwensi/ekses.

Pokja V Konsolidasi Data dan Penyelesaian Keterlanjuran

- Koordinator : Direktur Penegakan Hukum Pidana.
- Anggota : 1. Direktur Usaha Hutan Produksi
2. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan,;
3. Direktur Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati;
4. Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan.
5. Kepala Sub Direktorat Penerapan Sanksi Administrasi, Ditjen PHLHK.
6. Kepala Sub Direktorat Penyidikan Perusakan Lingkungan Hidup dan Kebakaran Hutan dan Lahan, Ditjen PHLHK.
7. Kepala Sub Direktorat Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, Ditjen PKTL.
8. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan, Ditjen PKTL.
9. Dr. Sigit Nugroho, S.Si. M.T.
10. Kepala Seksi Penyidikan Perambahan Hutan Wilayah I, Dirjen PHLHK.

Untuk penanganan keterlanjuran telah dibentuk Tim Satuan Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Implementasi Undang-Undang tentang Cipta Kerja Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tim Satlakwasdal UU CK) melalui SK Menteri LHK Nomor: SK.203/Menlhk/Setjen/KUM./5/2021 yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal KLHK.

TINDAK LANJUT UU CK : IMPLEMENTASI KERJA TIM POKJA

SK Menteri LHK RI Nomor: SK.359/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2021 tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : SK.359/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2021

TENTANG

DATA DAN INFORMASI KEGIATAN USAHA YANG TELAH TERBANGUN DI
DALAM KAWASAN HUTAN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG
KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penetapan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan perlu dilakukan inventarisasi data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan;
 - bahwa data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas kegiatan usaha perkebunan, pertambangan, dan kegiatan lainnya meliputi minyak dan gas bumi, panas bumi, tambak, pertanian, permakimian, wisata alam, industri, dan/atau sarana dan prasarana;
 - bahwa sesuai Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penetapan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Data dan Informasi Kegiatan Usaha yang Telah Terbangun di Dalam Kawasan Hutan yang Tidak Memiliki Perizinan di Bidang Kehutanan.

- 4 -

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau pemutakhiran data dan informasi kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan yang tidak memiliki perizinan di bidang kehutanan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2021

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

SITI NURBAYA

- Selain Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
- Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
 - Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
 - Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
 - Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan;
 - Direktur Jenderal Pengawasan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

51 Subjek Hukum telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri

2 Subjek Hukum telah membayar Sanksi Administratif sebesar Rp. 3.303.510.000

26 Subjek Hukum dalam proses verifikasi administrasi

Sisanya dalam proses dimintakan kelengkapan berkas

**HASIL PENANGANAN
KETERLANJURAN**

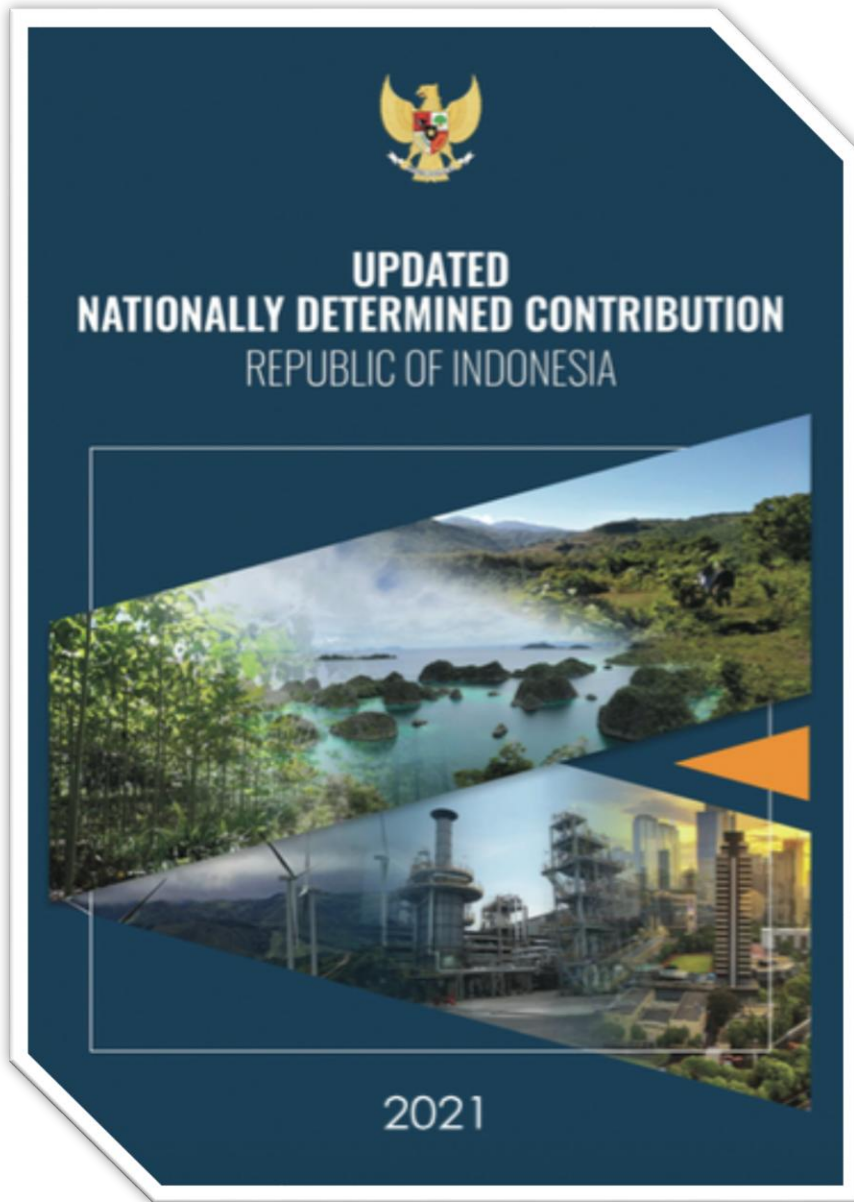
2 PERUSAHAAN

PROSES PENGURUSAN PASAL 110B

- 1 Tercantum dalam Surat Keputusan Menteri
- 2 Perusahaan diminta melengkapi administrasi termasuk citra satelit resolusi tinggi
- 3 Dilakukan verifikasi teknis (penafsiran citra satelit), verifikasi lapangan, dan penghitungan denda administratif
- 4 Penerbitan Sanksi Administratif
- 5 Pengurusan legal basis usaha (Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Hutan Produksi)

TOTAL DENDA

Rp 3.303.510.000,00



UPDATED NDC



Tidak mengubah angka target penurunan emisi GRK sebesar 29% sampai dengan 41% pada tahun 2030



Update informasi sesuai dengan kondisi saat ini, misalnya berkaitan dengan visi-misi Kabinet Indonesia Maju 2019;



Penjelasan terhadap hal yang masih perlu informasi rinci, misalnya terkait elemen adaptasi dan *means of implementation* serta kerangka transparansi;



Komitmen (baru, apabila tersedia) misalnya komitmen terkait oceans dalam elemen adaptasi.

INDONESIA – Long Term Strategy For Low Carbon and Climate Resilience 2050



1

Long-Term Vision (LTV)

Role of LTS-LCCR 2050

- aligning the climate goals and targets with national, sub-national and international objectives including SDGs
- NPS, innovation, enabling communities

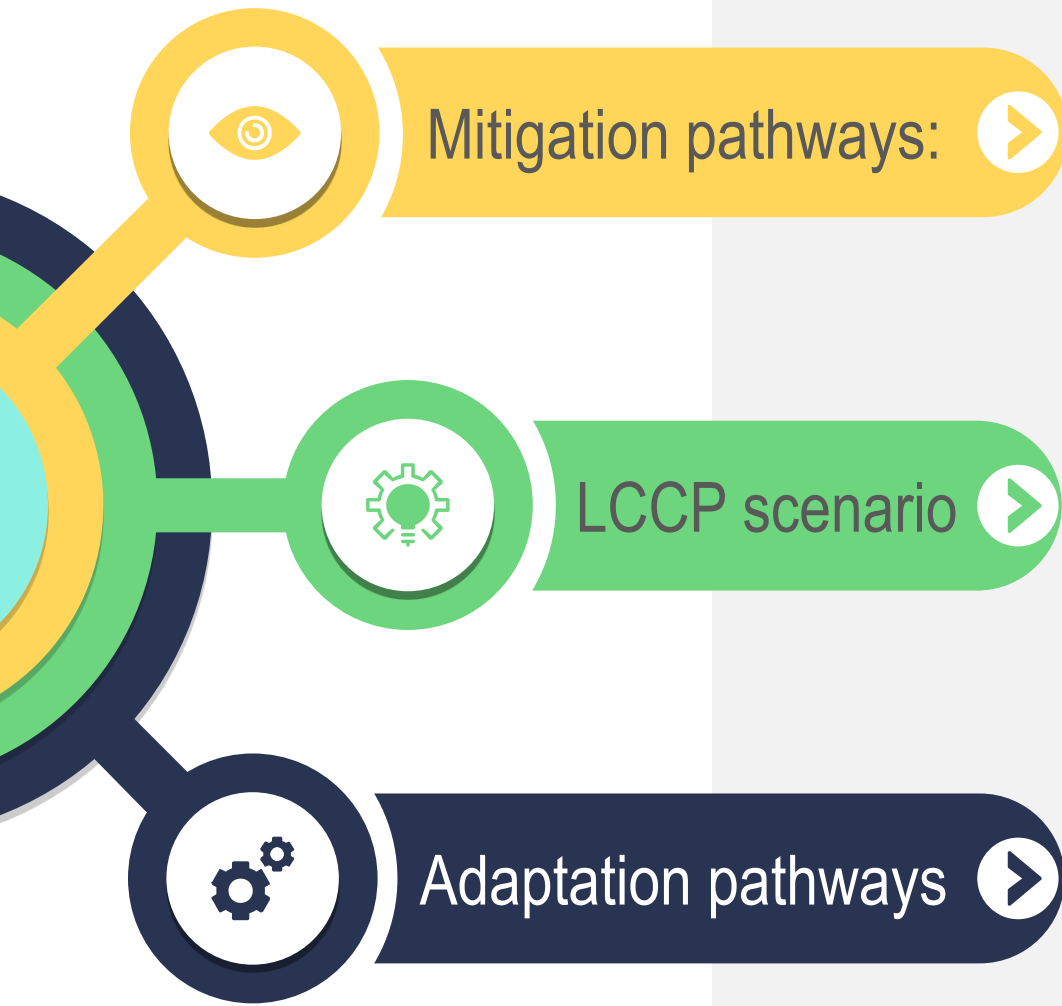
Mitigation

- three pathway scenarios on 5 sector categories (AFOLU, energy, waste, IPPU)
 - **CPOS**: extended NDC/current policy scenario
 - **TRNS**: transition scenario
 - **LCCP**: low carbon scenario compatible with Paris Agreement target

Adaptation

- the goal to reduce the impact of climate change on national GDP through increasing resilience on:
 - 4 basic necessities: food, water, energy, and environmental health
 - 3 following target areas of resilience : economy, social and livelihood, ecosystem and landscape

Visi Indonesia 2045
towards a developed and prosperous Indonesia:
(a) HRD and science and technology advancement,
(b) sustainable economic development, (c)
equitable development, and (d) strengthening
national resilience and public sector governance.



Mitigation pathways:

Under LCCP, Indonesia foresees to reach the peaking of GHGs emissions with **net sink in forestry and land uses (FOLU) in 2030**, and to progress towards net-zero emission by 2060 or sooner.

LCCP scenario

Indonesia **need to significantly reduce emission from energy sector to close to zero and increase removals in forestry and land uses**, which require transformational changes in energy and food and land-use systems that need to address a large number of targets with potential trade-offs among them.

Adaptation pathways

to reduce the impact of climate change on national GDP by 3.45% in 2050.

Skenario LCCP *peaking time* 2030 untuk semua sektor



Peaking time 5 sektor di tahun 2030 dengan tingkat emisi GRK pada 2050 sebesar 540 Mton CO₂e.

- Perubahan iklim mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat sehingga perlu dilakukan perlindungan sebagai bagian dari hak masyarakat (Pasal 65 ayat (1) UU 32/2009).
- Paris Agreement telah di ratifikasi melalui UU No 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan *Paris Agreement To The United Nations Framework Convention on Climate Change*, yang memuat kewajiban Pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi GRK untuk membatasi kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2° C hingga 1,5° C dari tingkat suhu pra industrialisasi
- Karbon mempunyai nilai ekonomi yang penting dan memiliki dimensi internasional utamanya berupa manfaat ekonomi sebagai refleksi pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan sesuai mandat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945



Nilai Ekonomi Karbon (NEK) atau ***Carbon Pricing*** adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi.

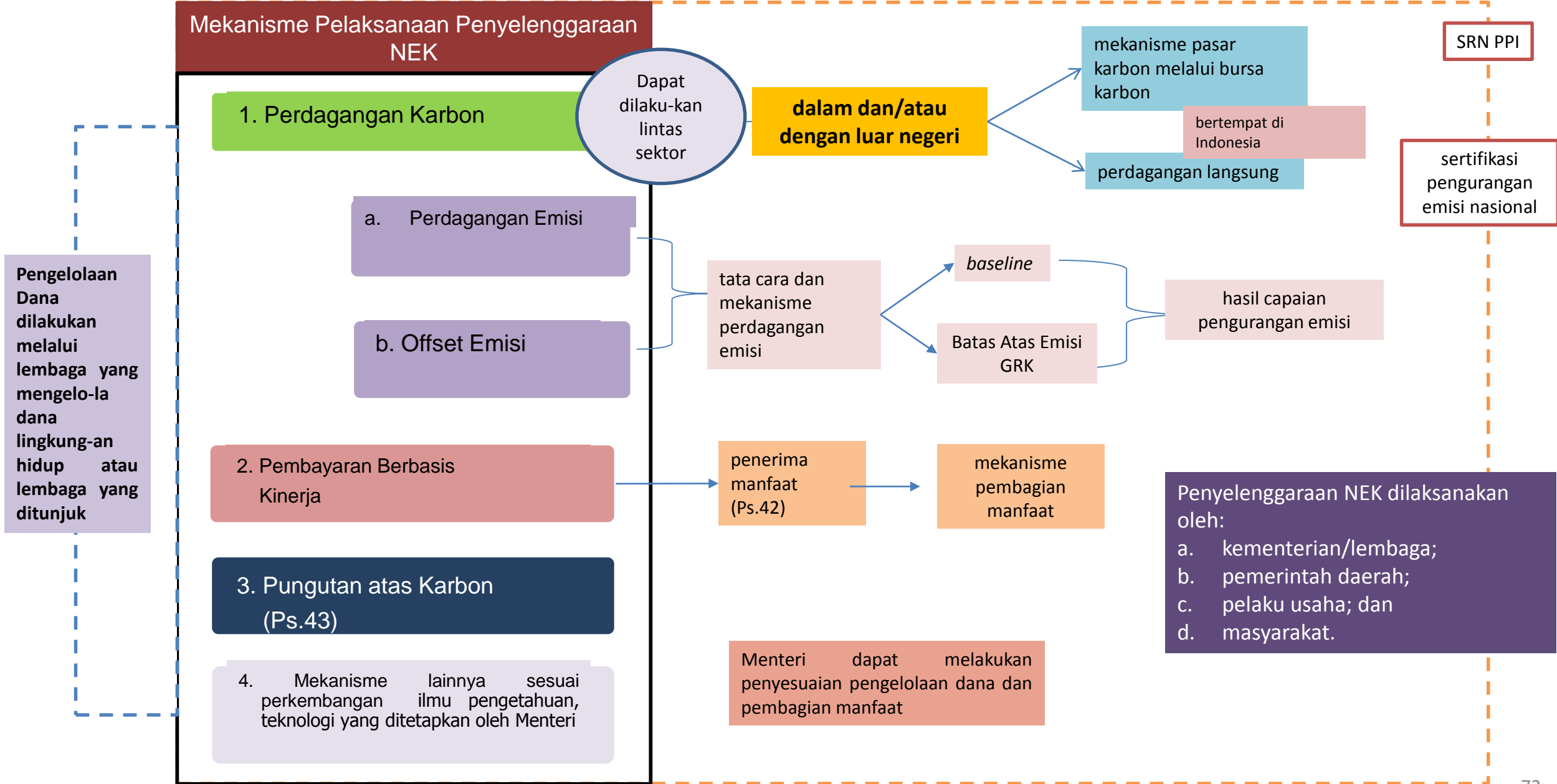
ALUR SUBSTANSI RPERPRES PENYELENGGARAAN NILAI EKONOMI KARBON UNTUK PENCAPAIAN TARGET NDC DAN PENGENDALIAN EMISI KARBON DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL



R-perpres tentang Instrumen NEK untuk mengelola kebutuhan dan harapan publik (kerja antara birokrasi dan society)

1. Memberikan landasan hukum bagi NDC Indonesia dan instrumen NEK yang dapat mendukung upaya pencapaian target NDC;
2. Memberikan panduan tentang tata laksana penyelenggaraan NEK;
3. Memberikan koridor untuk menata kembali aktifitas NEK (termasuk CDM, JCM, Perdagangan karbon, dll);
4. Memberikan opsi insentif bagi para pemangku kepentingan yang berperilaku baik, khususnya dalam pengendalian perubahan iklim;
5. Memberikan landasan hukum bagi penerapan instrumen pendanaan lingkungan hidup yang inovasi;
6. Mendukung kinerja kegiatan usaha berwawasan lingkungan dalam penerapan instrumen keuangan (*Bond*, *SUKUK*, *blended finance*, dll)

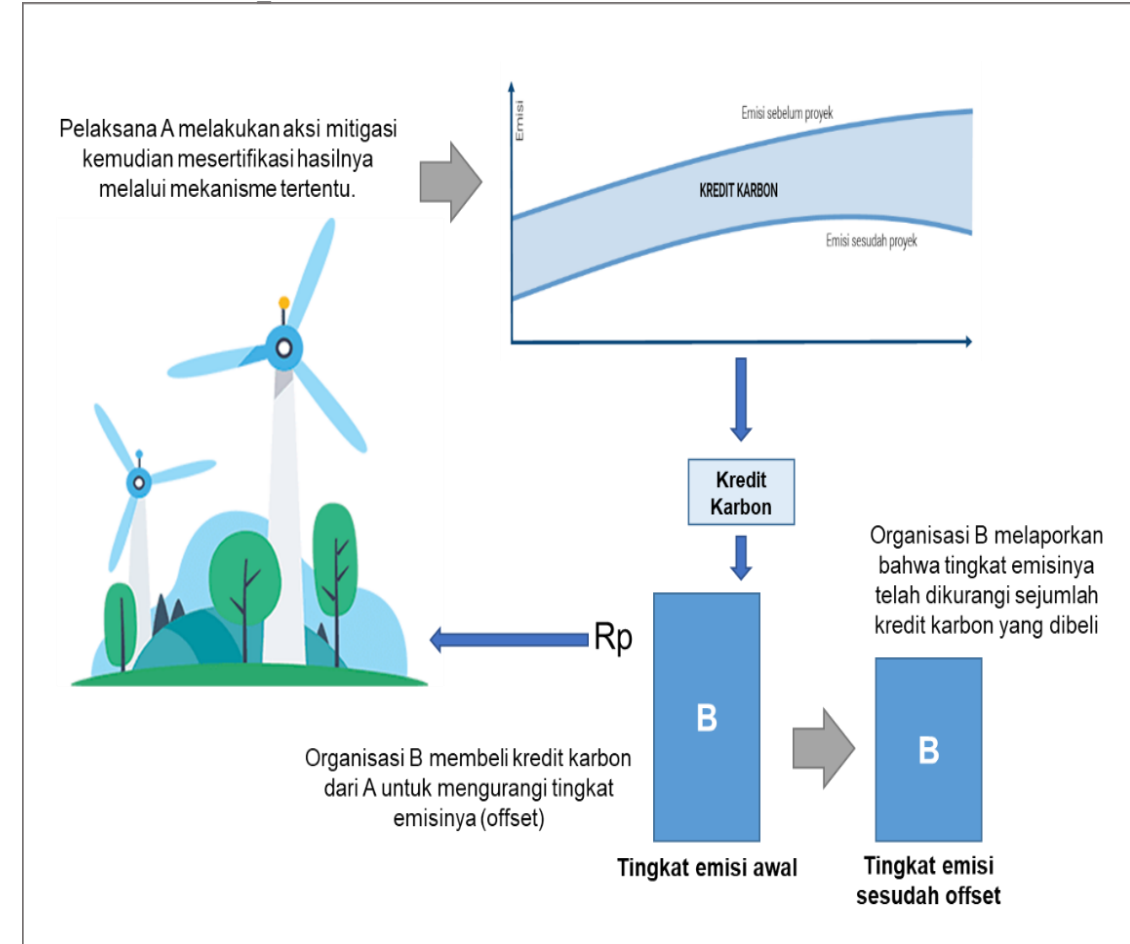
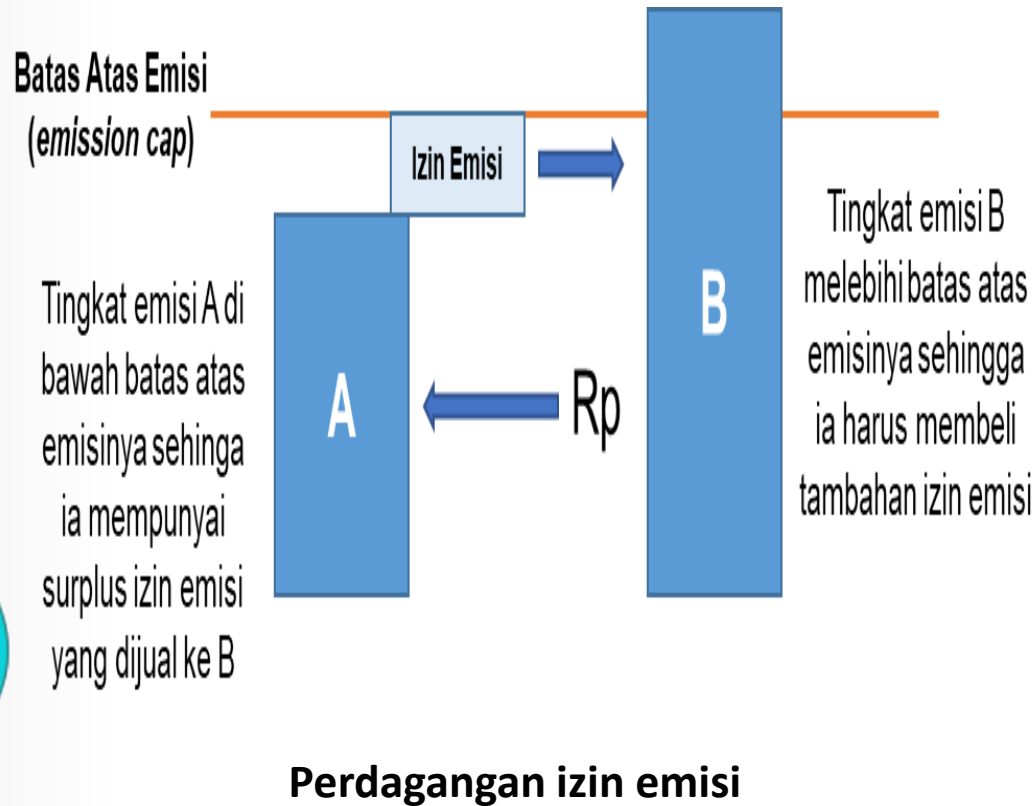
SKEMA PENYELENGGARAAN INSTRUMEN NEK SECARA UMUM



KRITERIA

Jenis-jenis Instrumen Nilai Ekonomi Karbon

- Pada prinsipnya, semua jenis emisi GRK dapat diperdagangkan yakni karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), nitrat oksida (N₂O), hidrofluorokarbon (HFCs), perfluorocarbons (PFCs), dan sulfur heksafluorida (SF₆).
- unit perdagangan karbon biasanya menggunakan satuan “setara-ton-CO₂” (*ton CO₂ equivalent*)



Offset emisi GRK

VALUASI NILAI KARBON

Key Points

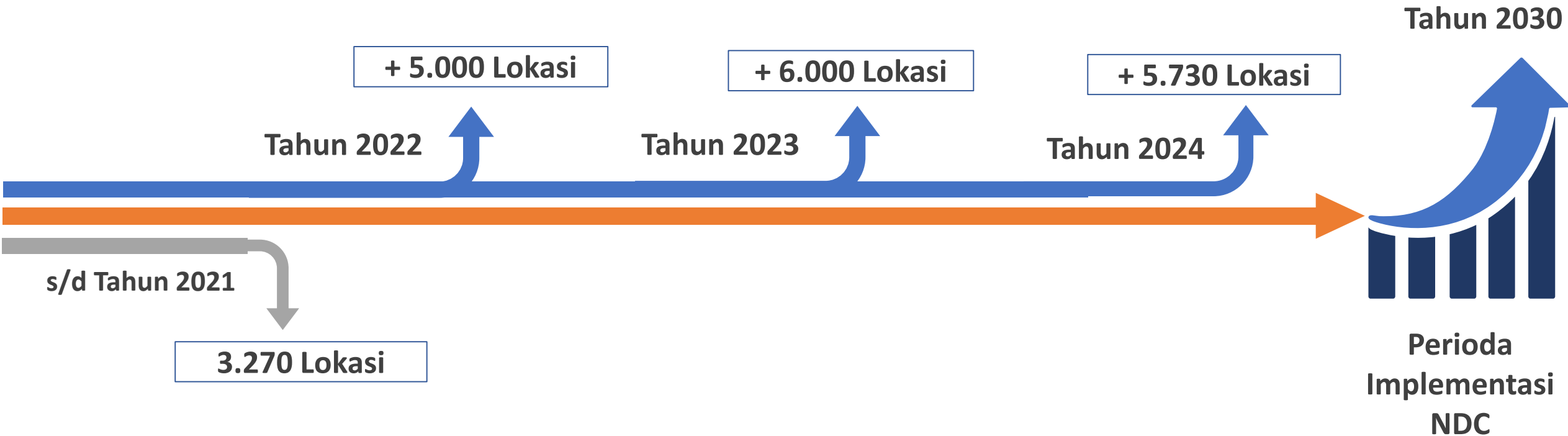
“Penetapan nilai ekonomi karbon, baik yang dilakukan melalui skema perdagangan karbon, pembayaran atas kinerja, pungutan atas karbon/carbon tax, dan mekanisme lain sesuai perkembangan iptek, akan ditetapkan oleh Menteri dan harus menjadi pilar kebijakan dalam mengantisipasi perubahan iklim. Di dalam penyelenggaraanya harus berdasarkan peta jalan NDC, strategi pencapaian NDC sektor, batas atas emisi, keefektifan waktu dan efisiensi biaya, serta perkembangan iptek dan kapasitas sector”

Pelaksanaan NEK akan dilakukan di semua sektor yang tercakup dalam NDC, yaitu:

- energi;
- limbah;
- proses industri dan penggunaan produk;
- pertanian;
- kehutanan; dan
- sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kapasitas nasional.



Target ProKlim s/d Tahun 2024



Catatan : luasan Lokasi minimal setingkat RW/Dusun dan maksimal setingkat Desa/Kelurahan atau wilayah khusus yang komunitasnya telah melaksanakan kegiatan pengendalian perubahan iklim

Strategi Pelaksanaan Program menuju 20.000 Kampung Iklim



Contoh Desa Penyangga KK, PS Skema HD Penerima Trophy ProKlim Utama Tahun 2020

Desa Mensiau, Kecamatan Batang Lupar, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat



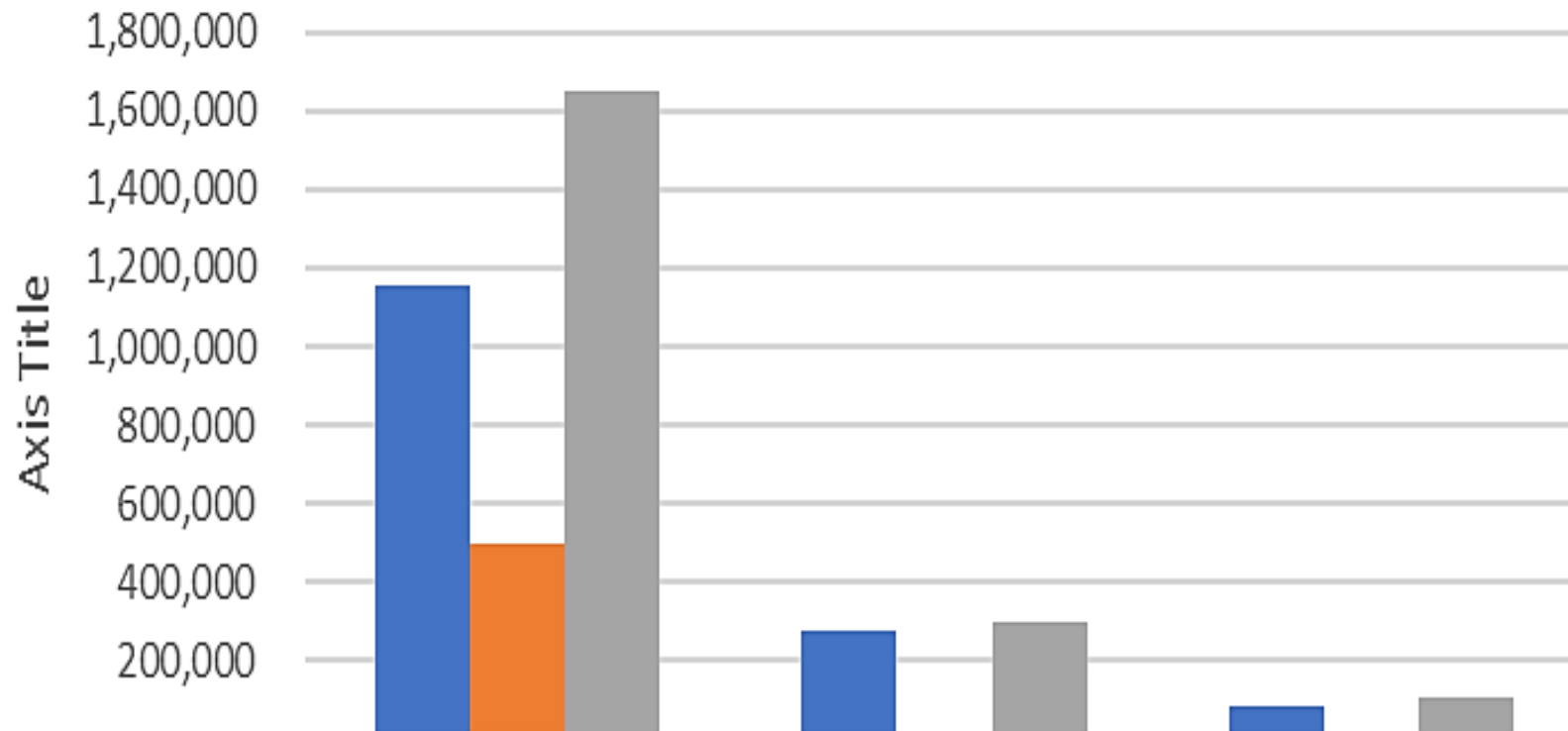
Contoh Verifikasi ProKlim Tahun 2021 Di lokasi Desa Penyangga KK

Dusun II Kabo Jaya Desa Swarga Bara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur
Provinsi Kalimantan Timur



GRAFIK PERBANDINGAN LUAS KARHUTLA 2019 -2021

Luas Karhutla Periode 2019 - 2021

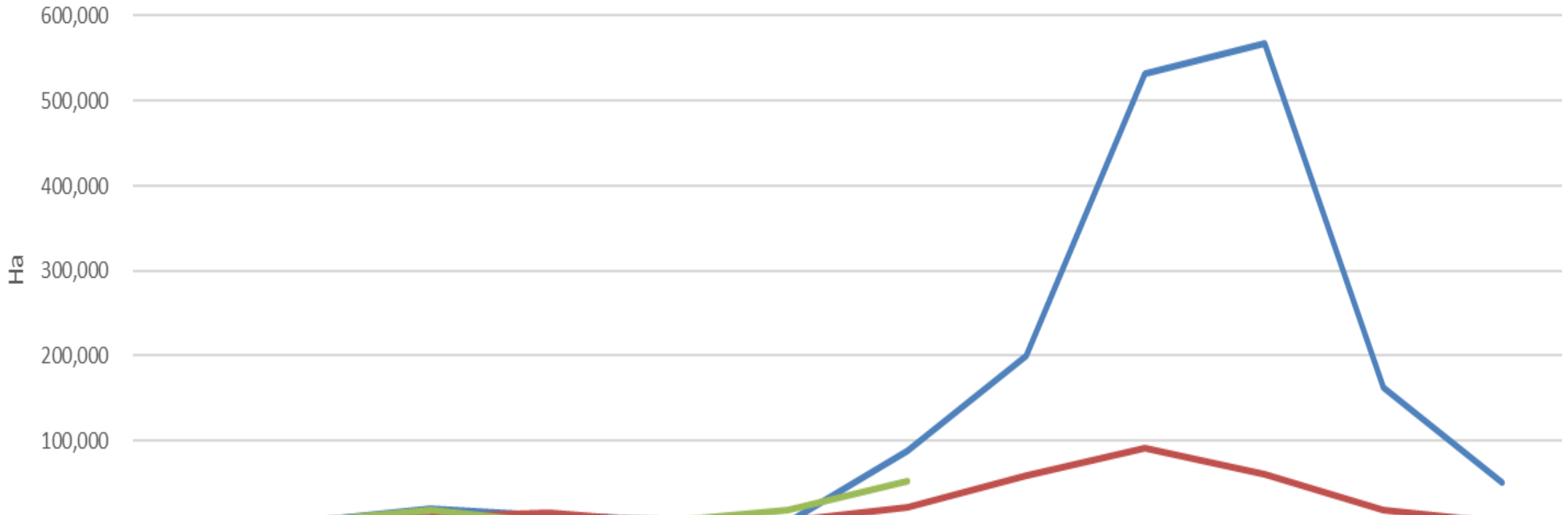


- Penurunan luas areal terbakar 2020 jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2019 terjadi penurunan **82%** atau turun seluas 1.352.316 Ha.
- Luas areal terbakar 2021 jika dibandingkan pada periode yang sama tahun 2020 (Jan-Juli) terjadi kenaikan **38,4%** atau naik seluas 40.588 Ha.

Ket : Luas tahun 2021 periode Januari – Juli 2021

GRAFIK LUAS KARHUTLA 2019 -2021

Luas Karhutla Periode 2019 - 2021

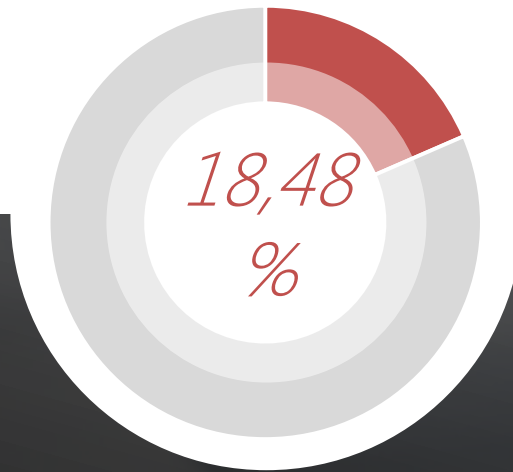


	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
2019	223	5,553	20,498	11,219	7,893	3,448	88,174	200,186	532,452	567,338	162,231	50,282
2020	2,710	7,043	9,619	15,627	3,818	5,065	21,319	58,239	90,836	61,217	17,732	3,717
2021	43	4,839	19,083	4,696	5,882	18,034	53,214					

Ket : Luas tahun 2021 periode Januari – Juli 2021

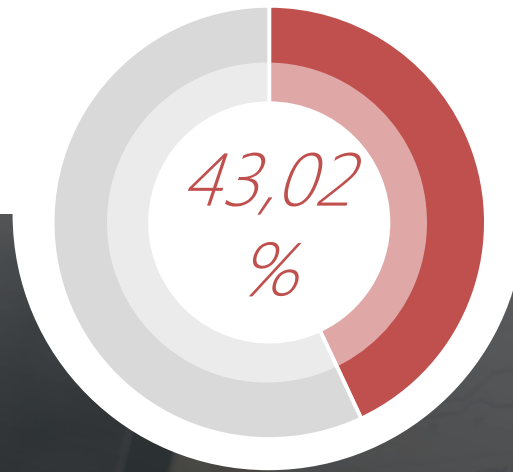
Capaian Kinerja Pengelolaan sampah

Capaian Kinerja Pengelolaan Sampah adalah Capaian Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Capaian dibawah ini adalah Capaian pada tahun 2020 yang terdiri dari 289 Kabupaten/kota se-Indonesia, sedangkan untuk capaian kinerja Tahun 2021 masih dalam proses penginputan data dari pihak daerah Kab/Kota se-Indonesia.



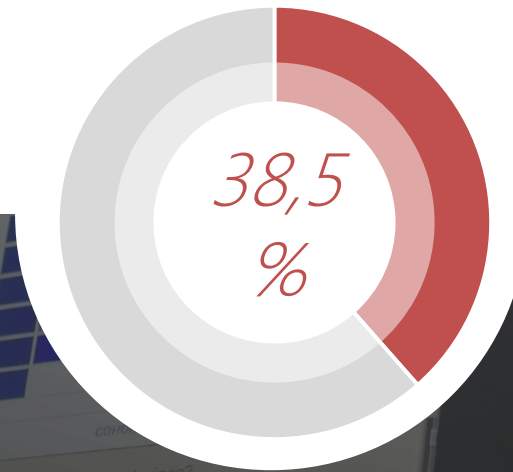
Pengurangan Sampah

6.187.202,79 Ton/tahun



Penanganan Sampah

14.406.928,14 Ton/tahun



Sampah Tidak Terkelola

12.892.923,82 Ton/tahun

PROGRESS PEMBANGUNAN SARPRAS PENANGANAN SAMPAH



Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Lokasi Prioritas



Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Destinasi Wisata Prioritas dan Taman Nasional



Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di DAS Citarum



Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Destinasi Wisata Prioritas (PEN)

Kegiatan	Target	Progress
<p>Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Lokasi Prioritas</p>	<p>4 Unit (Kota Metro, Kabupaten Pariaman, Kudus dan Lombok Barat)</p>	<p>Sudah mulai pembangunan dengan rincian : - Metro Lampung 58% - Kudus 30% - Pariaman 5% - Lombok Barat 5%</p>
<p>Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Destinasi Wisata Prioritas dan Taman Nasional</p>	<p>1 Unit (Kabupaten Belitung Timur)</p>	<p>Ditunda karena refocusing anggaran</p>
<p>Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di DAS Citarum</p>	<p>3 Unit (Kabupaten Karawang, Sumedang dan Subang)</p>	<p>Ditunda karena refocusing anggaran</p>
<p>Pembangunan Fasilitas Penanganan Sampah di Destinasi Wisata Prioritas (PEN)</p>	<p>2 Unit (Kabupaten Minahasa Utara dan Magelang)</p>	<p>Magelang mulai pembangunan (5%) sementara untuk Minahasa Utara proses lelang</p>

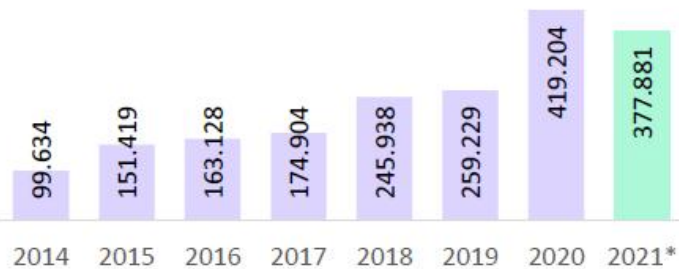
Sirkular Ekonomi Sampah

Peluang Melimpah dari Mengelola Sampah

Perkembangan Jumlah Bank Sampah (unit)



Pertumbuhan nasabah bank sampah (orang)



Jumlah omzet bank sampah (Rp. Miliar)



SUMBER ENERGI LISTRIK

15 ton sampah per hari diolah untuk menghasilkan bauran energi 7,5 MW



CAMPURAN CAIRAN ASPAL

3-5 ton sampah plastik diolah menjadi jalan sepanjang 1 km



KONVERSI MENJADI BBM

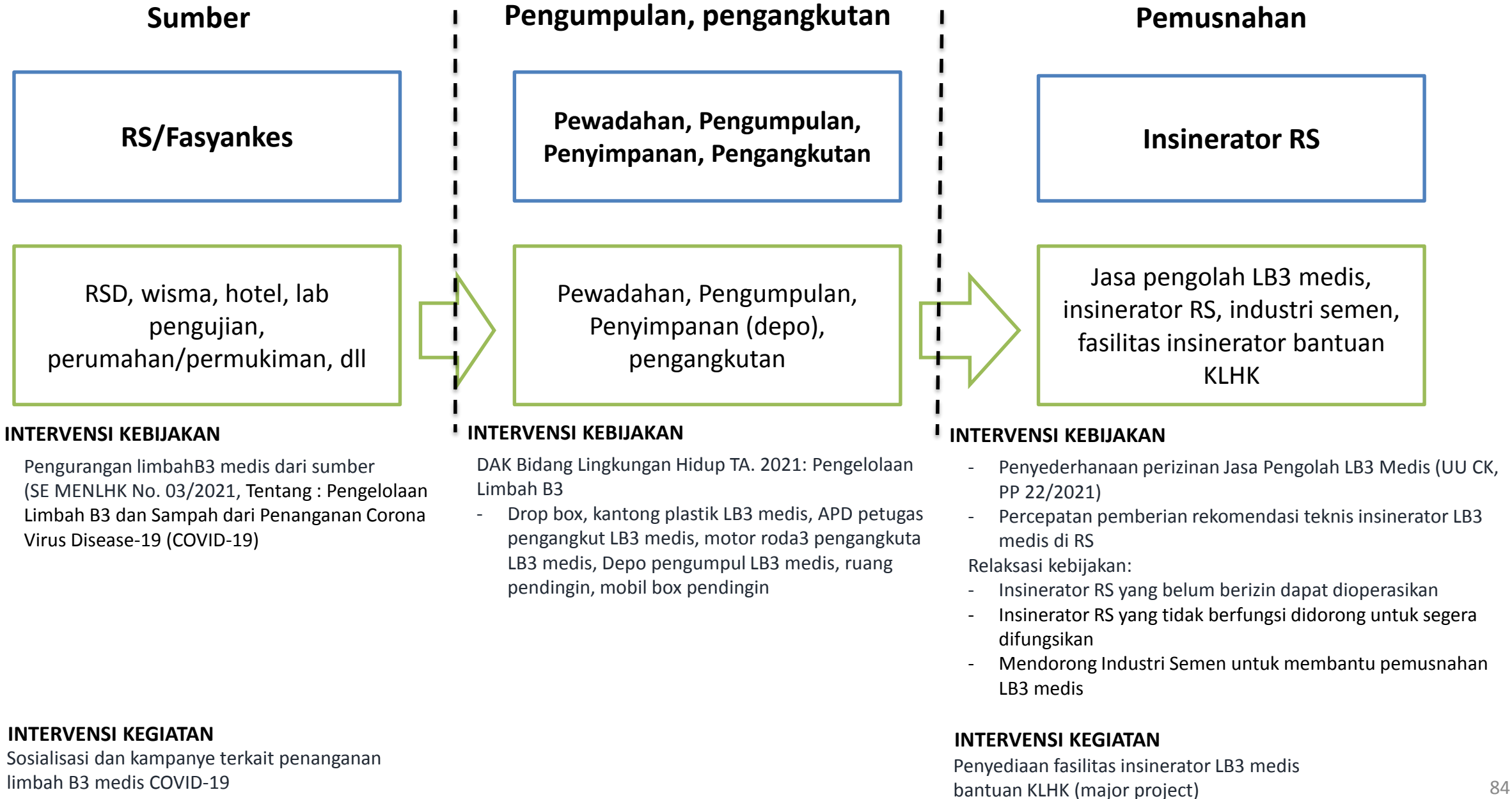
1 Kg sampah plastik diolah 1 liter bahan bakar minyak



Bank Sampah Induk (BSI) Baiman sudah mampu memproduksi bijih plastik daur ulang, selain usaha pemilahan barang bekas dan pembuatan pupuk kompos. Membina sebanyak 234 bank sampah yang ada di kota Banjarmasin.

Dari keuntungan usaha, BSI Baiman turut berpartisipasi dalam upaya pencegahan COVID-19 dengan menyumbang APD dan Paket kesehatan pribadi (*healt personal kit*) kepada masyarakat

KEBIJAKAN KLHK DALAM PERCEPATAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 MEDIS COVID-19



PEMBANGUNAN INSINERATOR SEBAGAI SALAH SATU FASILITAS YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENDUKUNG PENGOLAHAN LIMBAH B3 MEDIS COVID-19

(Progres Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan TA 2021)

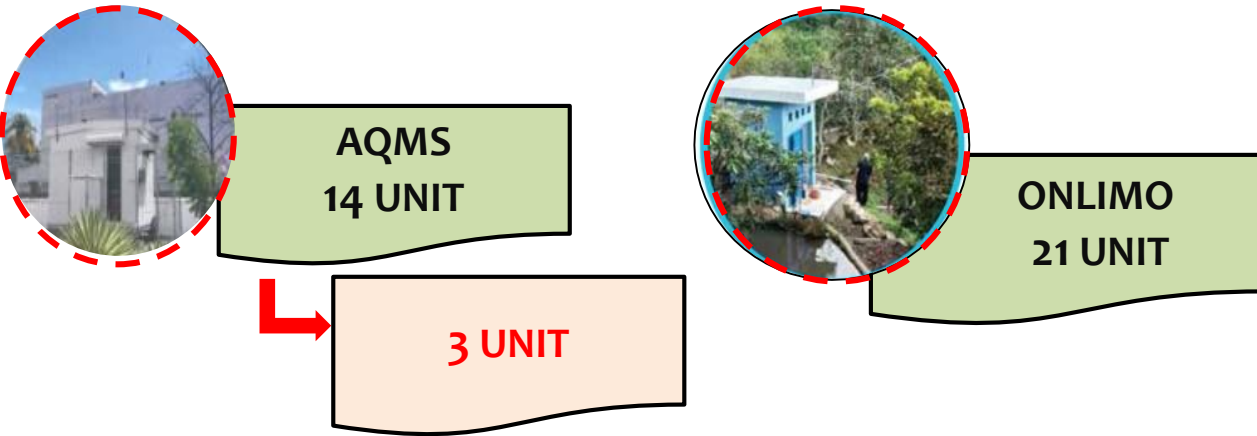
	Kegiatan	Target	Progress Kinerja (%)
	Pembangunan fasilitas di Provinsi Bangka Belitung	1 Unit	36,0
	Pembangunan fasilitas di Provinsi NTT	1 Unit	27,0
	Pembangunan fasilitas di Provinsi Papua Barat	1 Unit	43,0
	Pembangunan fasilitas di Provinsi Sulawesi Barat	1 Unit	26,0
	Pembangunan fasilitas di Provinsi Maluku* (refocusing)		16,0

CAPAIAN KINERJA PPKL

Rincian Output (Fisik)	Target	% Output (s.d Juli)
Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis (Unit)	21	45%
Alat Pemantauan Kualitas Udara Otomatis (Unit)	12	22%
Instalasi Pengolahan Air Limbah di DAS Citarum (Unit)	10	45%
Instalasi Pengolahan Air Limbah (Unit)	43	25%
Layanan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (Daerah (Prov/Kab/Kota))	12	55%
Lahan Bekas Pertambangan Rakyat yang Dipulihkan (Unit)	30	54%
Lahan Gambut Terdegradasi dipulihkan di Areal Penggunaan Lainnya (Hektar)	1,500	32%
Fasilitasi Desa Mandiri Peduli Gambut (Desa)	1	79%
Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa (PEN) (Desa)	30	1%
TOTAL		

PERUBAHAN TARGET KINERJA TAHUN 2021

SARANA PEMANTAUAN *REALTIME*



SARANA PENGENDALIAN PENCEMARAN



- Infrastruktur Hijau di DAS Citarum
- 10 Unit → **9 Unit**
- Infrastruktur Hijau di DAS Prioritas
- 43 Unit
- Infrastruktur Hijau di Pesisir dan Laut
- 10 Unit

PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN



Rekapitulasi Kegiatan Restorasi Gambut Tahun 2021 - BRGM

Provinsi Riau

KHG	Pelaksana	Rencana			Progres			Progres
		R1	R2	R3	R1	R2	R3	
SM kerumutan	Penugasan	5		4	1			Masih menunggu bahan geomembran, rencana tanggal 4 agustus dimulai kembali pekerjaan
TWA Sungai Dumai	Penugasan		65	2				Akan dilakukan verifikasi untuk pembayaran termin 2. Kegiatan revitalisasi (R3) sudah mulai pekerjaan pembersihan lahan, sebagian besar adalah budidaya sagu
SM Giam Siak Kecil	Penugasan			2				
KHG Pulau Bengkalis	Penugasan	15		4	12			
KHG Pulau Tebing Tinggi	Penugasan	7		2	4			
KHG Pulau Rangsang	Penugasan	8		3	6			
KHG Pulau Padang	Penugasan			24			24	
Sub Total		30	65	41	23	0	41	
KHG	Pelaksana	Rencana			Progres			Progres
		R1	R2	R3	R1	R2	R3	
KHG S. Rokan – S. Siak Kecil	TP	57		13	27		13	R1 semua sudah kontrak swakelola, kendala ketersediaan bahan cerucuk dan akses, tapi masih sesuai target. R3 sudah pembayaran Termin I Pemeliharaan, sudah dilakukan pembersihan lahan dan penyulaman
KHG S. Bangko – S. Rokan Kana	TP	18		2	4		2	
KHG Pulau Rupa	TP	25		2	10		2	
KHG Pulau Bengkalis	TP		25			25		
Sub Total		100	25	17	41	25	17	

Provinsi Jambi

KHG	Pelaksana	Rencana			Progres			Progres
		R1	R2	R3	R1	R2	R3	
KHG Sungai Batanghari - Sungai Air Hitam Laut	Penugasan	75			29			Proses verifikasi fisik dan administrasi setelah pencairan tahap 1
KHG Sungai Batanghari - Sungai Air Hitam Laut	Penugasan		50			0		Proses Pencairan tahap 1
KHG Sungai Batanghari - Sungai Air Hitam Laut	Penugasan			10			10	Proses verifikasi fisik dan administrasi setelah pencairan tahap 1
KHG Sungai Mendahara - Sungai Batanghari	Penugasan			1			1	Proses verifikasi fisik dan administrasi setelah pencairan tahap 1
Sub Total		75	50	11	29	0	11	
KHG	Pelaksana	Rencana			Progres			Progres
		R1	R2	R3	R1	R2	R3	
KHG Sungai Batanghari - Sungai Kumpeh	TP	12		1	1			R1: Proses verifikasi fisik dan administrasi tahap 1 R2: Pengesahan rantek dan verifikasi usulan pokmas R3: 9 paket dalam tahap pelaksanaan tahap 1, 3 paket akan SPKS minggu 1 agustus
KHG Sungai Air Hitam Laut - Sungai Buntu Kecil	TP	5	25	1	1			
KHG Sungai Batanghari - Sungai Air Hitam Laut	TP	9	25		1			
KHG Sungai Pangabuan - Sungai Baung	TP	23		1	1			
KHG Sungai Mendahara - Sungai Batanghari	TP			4				
KHG Sungai Baung - Sungai Betara	TP			5				
Sub Total		49	50	12	4	0	0	

Provinsi Sumatera Selatan

KHG	Pelaksana	Rencana			Progres			Progres
		R1	R2	R3	R1	R2	R3	
KHG Sungai Saleh - Sungai Sugihan	Penugasan	23	50	9	1			R1 Sekat Kanal dalam proses pembangunan fisik R1 Penimbunan kanal sudah selesai pelelangan dan telah terpilih pelaksana R2 pelaksanaan pendangiran dan pembasmian hama penyakit R3 verifikasi fisik dan administrasi tahap 1
Sub Total		23	50	9	1	0	0	

KHG	Pelaksana	Rencana			Progres			Progres
		R1	R2	R3	R1	R2	R3	
Sungai Ngirawan - Sungai Sembilang	TP	4		2	1			R1 Sekat Kanal dalam proses pembangunan fisik dan beberapa telah selesai proses lelang R2- P2 50 Ha: proses pencairan termin 1 R2- P0 20 Ha: Penyusunan dokumen R3 Persiapan SPKS tgl 7 Agustus 2021
Sungai Kalumpang	TP	88		9	4			
Sungai Musi - Sungai Rawas	TP	100		6	8			
Sungai Saleh - Sungai Sugihan	TP	6		4	2			
Sungai Musi - Sungai Blidah	TP	24		3	1			
Sungai Burnai - Sibumbang	TP		70					
Sub Total		222	70	24	16	0	0	

Provinsi Kalimantan Barat

No	Pelaksana	KHG	Rencana			Progres SPKS			Keterangan
			R1 SK (unit)	R2 (Ha)	R3 (Paket)	R1 SK (unit)	R2 (Ha)	R3 (Paket)	
1	Tugas Pembantuan	Sungai Punggur Besar-Sungai Kapuas	42		9	23		9	1. R1 sekat kanal kontraktual sebanyak 89 unit proses pemilihan pelaksana. 80 unit swakelola sudah SPKS.
		Sungau Kapuas-Sungai Ambawang	2		2	2		2	
		Sungai Punggur Besar-Sungai Ambawang	10		3	10		3	
		Sungai Penyangkat-Sungai Selat Maya	81		10	45		9	2. R2 Penanaman (P0) di KHG S.Sambas besar-S.Seiyung dalam proses persiapan pokmas
		Sungai Terentang - Sungai Kapuas	3		1			1	
		Sungai Selat Maya - Sungai Aping	31		4				3. R3 sebanyak 5 pokmas dalam proses pembuatan rekening Pokmas
		Sungai Mempawah - Sungai Peniti		50			50		
		Sungai Sambas Besar - Sungai Seiyung		25					
Sub Total			169	75	29	80	50	24	

Provinsi Kalimantan Tengah

No	Pelaksana	KHG	Rencana			Progres SPKS			Keterangan
			R1 SK (unit)	R2 (Ha)	R3 (Paket)	R1 SK (unit)	R2 (Ha)	R3 (Paket)	
1	Tugas Pembantuan	Sungai Buluh Besar - Sungai Seruyan			14				1. R1 Sekat kanal kontraktual sebanyak 134 unit proses tayang lelang 2. R2 sudah SPKS untuk luasan 200 Ha 3. R3 sebanyak 15 pokmas dalam proses kelengkapan berkas Pokmas
		Sungai Pukun - Sungai Seruyan			1				
		Sungai Pukun - Sungai Mentaya	134		29			29	
		Sungai Katingan - Sungai Sebangau		250			250		
Sub Total			134	250	44	0	250	29	
2	Penugasan	Sungai Buluh Besar - Sungai Seruyan	11	100	4	11	100	4	1. R1 dalam proses pembuatan sekat kanal 2. R2 Proses pencairan tahap 1 sebesar 60% 3. R3 dalam proses pelaksanaan
		Sungai Buluh Besar		100			100		
Sub Total			11	200	4	11	200	4	

Provinsi Kalimantan Selatan

No	Pelaksana	KHG	Rencana			Progres SPKS			Keterangan
			R1 SK (unit)	R2 (Ha)	R3 (Paket)	R1 SK (unit)	R2 (Ha)	R3 (Paket)	
1	Tugas Pembantuan	Sungai Balangan - Sungai Batang Alai	5			5			Proses pengerjaan fisik, menunggu bahan geomembran.
		Sungai Barito - Sungai Tapin			2			2	
		Sungai Utar - Sungai Serapat			3			3	
		Sungai Balangan - Sungai Balangan			1			1	
Sub Total			5	0	6	5	0	6	

Provinsi Papua

No	Pelaksana	KHG	Rencana			Progres SPKS			Keterangan
			R1 SK (unit)	R2 (Ha)	R3 (Paket)	R1 SK (unit)	R2 (Ha)	R3 (Paket)	
1	Tugas Pembantuan	KHG Sungai Kuis - Sungai Bapai			5			5	Sebanyak 5 Pokmas yang belum SPKS dalam proses persiapan berkas
		KHG S. Jaman Kawarga - S. Samaleki Digul			27			27	
		KHG Sungai Kumbe - Sungai Bian kab. Merauke			5				
Sub Total			0	0	37	0	0	32	
2	Penugasan	Sungai Ifuleki Bian - Sungai Lekiage Sentuf			1			1	Proses verifikasi fisik untuk pencairan tahap 2
		Sungai Aleki Male - Ifuleki Bian			1			1	
		Sungai Alekikos Bakian - Sungai Ifuleki Bian							
		Sungai Ifuleki Bian - Sungai Lekiage Sentuf							
		Sungai Ifuleki Bian - Sungai Dalik			1			1	
Sub Total			0	0	4	0	0	4	
Total			0	0	41	0	0	36	

Realisasi dan Progres Fisik Kegiatan Percepatan Rehabilitasi Mangrove (PRM) di 9 Provinsi – Update 23 Agustus 2021

PROVINSI	BPDAS/BKSDA	TARGET PENANAMAN (refocusing)	IDENTIFIKASI (ha)	REALISASI FISIK						
				RANTEK (ha)	KELOMPOK	SPKS (ha)	HOK	TENAGA KERJA	PENANAMAN (ha)	PROSES PENANAMAN (ha)
Sumatera Utara	Wampu Sei Ular	3,235	3,239	2,829	33	2,829	271,584	54,317	674	2,829
Sumatera Utara	Asahan Barumon	4,100	6,167	4,100	71	2,418	107,232	21,446	44	1,117
Riau	Indragiri Rokan	5,050	7,865	5,033	133	4,928	471,168	94,234	1,022	4,908
Kepulauan Riau	Sei Jang Duriangkang	2,700	2,700	989	36	989	94,944	18,989	905	989
Bangka Belitung	Baturusa Cerucuk	3,400	3,426	2,429	86	2,429	222,624	44,525	727	2,319
Bangka Belitung	BKSDA Sumatera Selatan	500	500	500	11	500	48,000	9,600	49	500
Kalimantan Barat	Kapuas	1,000	1,000	523	34	498	32,928	6,586	107	343
Kalimantan Timur	Mahakam Berau	5,226	5,500	5,036	38	3,284	315,264	63,053	446	3,284
Kalimantan Utara	Mahakam Berau	1,289	2,000	350	10		-	-		
Papua	Memberamo	1,500	1,500	1,282	39	880	67,200	13,440	846	700
Papua Barat	Remu Ransiki	1,500	1,500	1,450	22	846	94,368	18,874	387	983
TOTAL		29,500	35,397	24,521	513	19,601	1,725,312	345,062	5,206	17,972

BAGIAN 3

RKA K/L Tahun 2022



PESAN UTAMA

PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN



Pembangunan LHK tahun 2022 merupakan sequen lanjutan dari :

2020 . Adaptasi di tengah pandemi, terus mengawal jaman yang berubah

2021 . Menebalkan modal sosial, memperkuat kinerja positif pembangunan LHK

2022

Memperkuat Sumbangan Tapak untuk Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural

SASARAN UTAMA KLHK 2022

1

Menjaga kecenderungan positif pertumbuhan PDB

2

Menumbuhkan ekspor dan meningkatkan produksi hasil hutan, untuk mendukung surplus neraca perdagangan non migas

3

Terus bergerak meningkatkan kapasitas produksi kelompok tani hutan sebagai upaya membantu pemerataan ekonomi wilayah

4





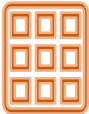
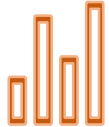
1.Mendorong ekonomi sirkular untuk pengelolaan sampah dan limbah, paralel dengan mengurangi beban lingkungan.

KINERJA UTAMA PEMBANGUNAN LHK 2022

PILAR LINGKUNGAN

LINGKUNGAN HIDUP DAN HUTAN YANG SEMAKIN TANGGAP TERHADAP PERUBAHAN IKLIM :

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup, penurunan emisi, menjaga laju penyusutan hutan, pemulihan DAS, dan perlindungan kawasan dengan nilai konservasi tinggi

	69,22 poin Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	17,22 persen Penurunan Emisi GRK yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah
	0,38 juta hektar Penurunan Laju Deforestasi
	65 poin Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah
	35.000 hektar Luas Lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya
	11,5 juta hektar Luas Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi

KINERJA UTAMA PEMBANGUNAN LHK 2022

PILAR EKONOMI

PEMANFAATAN SUMBER DAYA HUTAN DAN LINGKUNGAN SESUAI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN :

Meningkatkan sumbangan LHK pada produk domestik bruto (PDB), meningkatkan ekspor hasil hutan, dan meningkatkan sumbangan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)



Rp.109 triliun
Kontribusi Sektor LHK
Terhadap PDB Nasional



US\$14 miliar
Peningkatan Nilai Ekspor Hasil Hutan,
TSL, dan Bioprospecting



Rp.4,4 triliun
Peningkatan Nilai PNBP Fungsional KLHK

KINERJA UTAMA PEMBANGUNAN LHK 2022

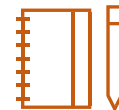
PILAR SOSIAL

FUNGSI DAN DISTRIBUSI MANFAAT HUTAN YANG BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN :

Meningkatkan upaya pemantapan kawasan hutan, melanjutkan capaian tanah obyek reforma agraria dari kawasan hutan, dan akses kelola hutan kepada masyarakat



2,7 juta hektar
Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan



125 ribu hektar
Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA



200 ribu hektar
Luas Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat

KINERJA UTAMA PEMBANGUNAN LHK 2022

PILAR TATA KELOLA

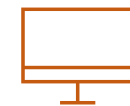
Tata kelola dan inovasi pembangunan yang semakin berdaya saing



2,3 poin
Indeks Efektifitas
Pengelolaan Kawasan Hutan



1.053 kasus
Jumlah Kasus LHK yang Ditangani
melalui Penegakan Hukum



3,60 poin
Indeks Sistem Pemerintah
Berbasis Elektronik



80 produk
Hasil Litbang yang Inovatif
dan/atau Implementatif



75 poin
Indeks Produktivitas
dan Daya Saing SDM LHK



81 poin
Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi



WTP
Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan
KLHK



Level 3
Maturitas SPIP KLHK

PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN LHK TA 2022



Berdasarkan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-634/MK.02/2021 dan S.516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07.2021 tanggal 23 Juli 2021 perihal Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2022.

x (Rp. 1.000,-)

NO	UNIT KERJA ESELON I / PROGRAM	BELANJA OPERASIONAL			BELANJA NON OPERASIONAL						PAGU ANGGARAN TA 2022
		PEGAWAI	BARANG	JUMLAH	RM	RMP	PNBP	HLN	SBSN	JUMLAH	
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8	9	10	11=6+7+8+9+10	12=5+11
1	SEKRETARIAT JENDERAL	125.996.396	158.433.661	284.430.057	188.580.128	3.313.987	-	19.690.247	-	211.584.362	496.014.419
2	INSPEKTORAT JENDERAL	30.121.768	5.458.348	35.580.116	35.790.332	-	-	-	-	35.790.332	71.370.448
3	DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	105.856.340	27.699.511	133.555.851	113.301.742	-	50.389.000	29.734.884	-	193.425.626	326.981.477
4	DITJEN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN	200.464.351	75.245.549	275.709.900	918.962.318	6.962.621	572.581.579	55.207.954	-	1.553.714.472	1.829.424.372
5	DITJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	767.632.515	265.186.160	1.032.818.675	337.769.462	6.714.681	175.000.000	63.534.048	148.131.041	731.149.232	1.763.967.907
6	DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	160.181.306	48.324.861	208.506.167	91.924.172	-	85.408.000	-	-	177.332.172	385.838.339
7	BADAN STANDARDISASI DAN INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	207.944.105	52.525.636	260.469.741	20.234.072	2.958.000	8.051.573	10.000.000	-	41.243.645	301.713.386
8	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	118.582.635	43.670.195	162.252.830	101.122.269	-	11.850.169	589.150	8.523.000	122.084.588	284.337.418
9	DITJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	42.279.348	17.684.922	59.964.270	118.229.092	3.310.000	38.955.000	59.632.817	-	220.126.909	280.091.179
10	DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	132.614.437	30.886.691	163.501.128	119.232.268	-	42.604.679	-	-	161.836.947	325.338.075
11	DITJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	53.526.277	37.937.302	91.463.579	102.064.577	-	65.160.000	12.840.200	-	180.064.777	271.528.356
12	DITJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	27.353.647	9.490.268	36.843.915	209.491.203	-	-	-	-	209.491.203	246.335.118
13	DITJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	30.608.565	12.742.196	43.350.761	189.344.524	-	-	-	-	189.344.524	232.695.285
JUMLAH		2.003.161.690	785.285.300	2.788.446.990	2.546.046.159	23.259.289	1.050.000.000	251.229.300	156.654.041	4.027.188.789	6.815.635.779
14	BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE	8.700.000	4.295.525	12.995.525	291.790.150	-	-	-	-	291.790.150	304.785.675
JUMLAH KLHK + BRGM		2.011.861.690	789.580.825	2.801.442.515	2.837.836.309	23.259.289	1.050.000.000	251.229.300	156.654.041	4.318.978.939	7.120.421.454

BELANJA PEGAWAI

Rp. 2.011.861.690.000,-

Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Dialokasikan untuk :

1. Gaji Pegawai
2. Tunjangan Kinerja Pegawai

Seluruh pegawai pusat dan daerah

BELANJA OPERASIONAL

Rp. 789.580.825.000,-

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal

Dialokasikan untuk :

1. Operasional Kantor (ATK, Pencetakan Kop Surat, Pengiriman surat dinas, dll)
2. Pemeliharaan Aset Kantor (Gedung, Kendaraan, Peralatan Kantor, dll)
3. Sewa Langganan Daya dan Jasa (Listrik, Telpon, Air, dll) pada satker pusat dan daerah

BELANJA NON OPERASIONAL

Rp. 4.318.978.939.000,-

Pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal

(x Rp.1.000,-)

NO	UNIT ESELON I	NON OPERASIONAL		
		PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS BIDANG	TOTAL
1	SEKRETARIAT JENDERAL	5.047.500	206.536.862	211.584.362
2	INSPEKTORAT JENDERAL	-	35.790.332	35.790.332
3	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI	51.107.957	142.317.669	193.425.626
4	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN	1.432.014.500	121.699.972	1.553.714.472
5	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM DAN EKOSISTEM	571.007.039	160.142.193	731.149.232
6	DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	110.570.937	66.761.235	177.332.172
7	BADAN STANDARDISASI DAN INSTRUMEN LHK	15.845.256	25.398.389	41.243.645
8	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM	88.736.444	33.348.144	122.084.588
9	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	121.190.653	98.936.256	220.126.909
10	DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LHK	126.006.620	35.830.327	161.836.947
11	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	138.948.612	41.116.165	180.064.777
12	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN B3	106.965.000	102.526.203	209.491.203
13	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	173.981.727	15.362.797	189.344.524
14	BADAN RESTORASI GAMBUT DAN MANGROVE	291.790.150	-	291.790.150
TOTAL		3.233.212.395	1.085.766.544	4.318.978.939

KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL KLHK TAHUN 2022

- 1** PN 1 : Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
- 2** PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
- 3** PN 3 : Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
- 4** PN 6 : Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL 1 PADA KLHK TAHUN 2022

Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Rill, dan Industrialisasi, :

- Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir
- Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok



Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi, :

- Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung
- Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
- Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau

Dukungan anggaran
Rp 452.287.205.000,-

HIGHLIGHT DUKUNGAN LHK UNTUK PRIORITAS NASIONAL

PN 1

MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

Kementerian LHK mendukung program prioritas : (1) peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kegiatan prioritas diantaranya : pemantapan kawasan berfungsi lindung, pengelolaan hutan berkelanjutan dan pemeliharaan dan konservasi sumberdaya air; dan (2) peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi. Dengan kegiatan prioritas diantaranya : peningkatan daya saing destinasi dan industry pengolahan pariwisata.

- **50**
titik mata air yang dipulihkan
- **170**
bangunan pengendali kerusakan perairan darat
- **15**
danau dan segmen sungai yang dikendalikan kerusakannya
- **37**
Layanan Perizinan Industri Primer Hasil Hutan Kayu 6.000 m³/tahun ke atas
- **20**
destinasi wisata alam prioritas yang dikembangkan

ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL 2 PADA KLHK TAHUN 2022



Pembangunan Wilayah Kalimantan :

1. Pengembangan Kawasan Strategis
2. Pengembangan Sektor Unggulan
- 3. Pengembangan Kawasan Perkotaan**
4. Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi
5. Kelembagaan dan Keuangan Daerah

HIGHLIGHT DUKUNGAN LHK UNTUK PRIORITAS NASIONAL

PN 2

MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK
MENGURANGI KESENJANGAN DAN MENJAMIN
PEMERATAAN

Kementerian LHK mendukung program prioritas pembangunan wilayah Kalimantan untuk mendukung pembangunan ibu kota negara

750 hektar

Rehabilitasi hutan dan lahan di ibu kota negara dan DAS sekitarnya

500 hektar

Pemulihan ekosistem di area ibu kota negara

41.400 hektar

Penyiapan lahan untuk ibu kota negara

68.000 hektar

Dukungan penataan ibu kota negara dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi

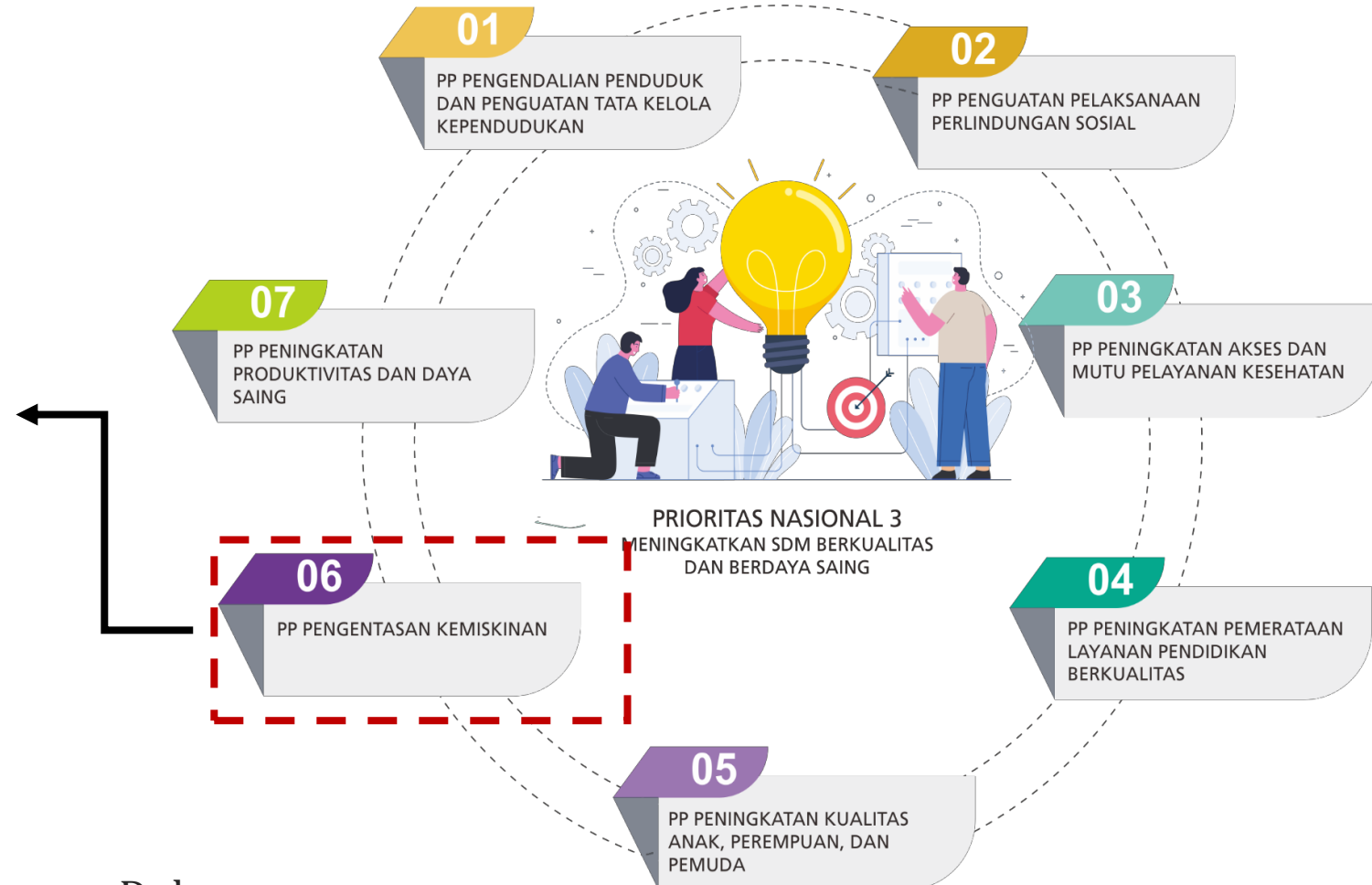
ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL 3 PADA KLHK TAHUN 2022

Arah Kebijakan PP 6 adalah :

1. Pendampingan kelompok miskin dan rentan untuk usaha produktif
2. Peningkatan keberantaraan akses pelaku usaha miskin dan rentan terhadap pasar, kapasitas kewirausahaan dan teknis, sumber permodalan
3. Akses penduduk miskin dan rentan pada aset produktif lainnya
4. Dukungan yang inklusif bagi kelompok penduduk miskin dan rentan

Diturunkan melalui **Kegiatan Prioritas** berupa :

1. Keberantaraan Usaha dan Dampak Sosial
2. Reforma Agraria
3. Perhutanan Sosial



HIGHLIGHT DUKUNGAN LHK UNTUK PRIORITAS NASIONAL

PN 3

MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

Kementerian LHK mendukung program prioritas : (1) pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas perhutanan sosial, reforma agraria, dan keberantaraan usaha dan dampak sosial; dan (2) peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas Pendidikan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri.

200.000 Hektar

Izin akses kelola perhutanan sosial dalam skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, kemitraan konservasi dan IPHPS

125.000 Hektar

SK pelepasan kawasan hutan untuk tanah obyek reforma agraria

42 Kelompok

Kelompok usaha perhutanan sosial yang ditingkatkan kelasnya menjadi gold/platinum

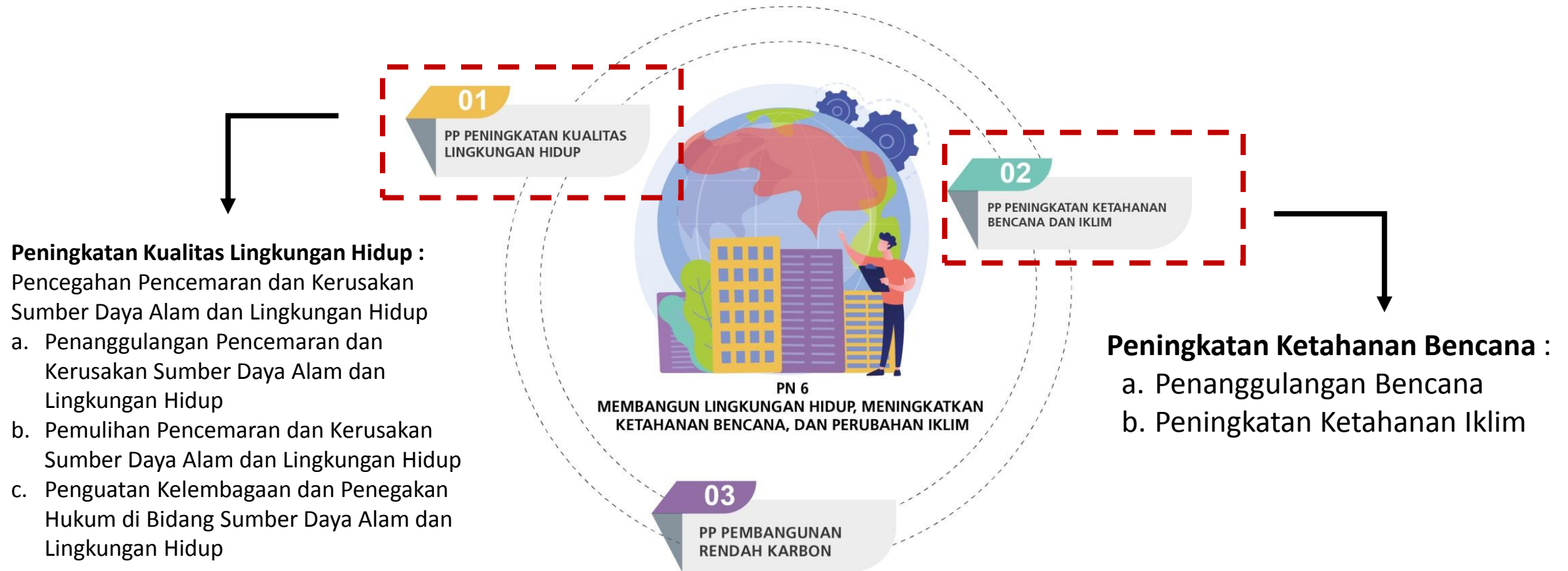
90 Kelompok

Kelompok tani hutan mandiri yang dibentuk

481 orang

Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat

ANGGARAN PRIORITAS NASIONAL 6 PADA KLHK TAHUN 2022



HIGHLIGHT DUKUNGAN LHK UNTUK PRIORITAS NASIONAL

PN 6

**MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP,
MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA
DAN PERUBAHAN IKLIM**

Kementerian LHK mendukung program prioritas : (1) peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas pencegahan pencemaran, penanggulangan pencemaran, pemulihan dan penguatan kelembagaan penegakan hukum; (2) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan (3) pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas pemulihan lahan berkelanjutan.

3.000 Badan Usaha

Usaha dan kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan

17,89 juta ton

Sampah nasional yang dikelola

300 ribu hektar

Lahan gambut yang dipulihkan

182 kasus

Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani

1.250 hektar

Luas rehabilitasi mangrove

KEGIATAN ANGGARAN BERBASIS MASYARAKAT TA 2022

A. BELANJA YANG DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT

x (Rp. 1.000,-)

NO	UNIT ESELON I	ANGGARAN BERBASIS MASYARAKAT	PAGU
1	Direktorat Jenderal PHPL	Bantuan UMKM untuk kegiatan SVLK	25.386.327
2	Direktorat Jenderal PDASHL	Kebun bibit rakyat dan penyediaan bibit produktif	150.000.000
3	Direktorat Jenderal KSDAE	Kemitraan konservasi, peningkatan usaha ekonomi produktif di sekitar KK, dan pemulihan ekosistem bersama masyarakat	121.457.801
4	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Pengembangan KTH menuju KTH mandiri dan pengembangan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS	3.050.000
5	Direktorat Jenderal PSKL	BangPesona	44.000.000
6	Direktorat Jenderal PSLB3	Fasilitas pengolahan emas bebas merkuri, fasilitas pelayanan kesehatan, Fasilitas pengembangan Budidaya Magot, Pembangunan PDU.	99.025.000
7	Direktorat Jenderal PPKL	Fasilitas Desa Mandiri Peduli Gambut, Pemulihan kerusakan lahan akses terbuka	39.126.387
TOTAL			482.045.515

B. BIMTEK/SOSIALISASI KEGIATAN KEMENTERIAN LHK TA 2022

NO	UNIT ESELON I	TOPIK BIMTEK/PELATIHAN
1	Ditjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung	Pemulihan Hutan dan Lahan melalui KBR, Bibit Berkualitas dan Bibit Produktif
2	Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif/Kemitraan Konservasi
3	Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Sosialisasi Kawasan Hutan, TORA, penggunaan kawasan hutan, dan izin lingkungan
4	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Kemandirian Kelompok Tani Hutan (KTH)
5	Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan	Peningkatan Kapasitas Kelompok Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
6	Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3	Pengelolaan sampah dan peningkatan nilai ekonomi sampah
7	Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Pencegahan dan pengendalian pencemaran air limbah melalui Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
8	Badan Restorasi Gambut dan Mangrove	Restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove



Kementerian LHK pada tahun 2022 berkomitmen untuk tetap melakukan perbaikan terhadap bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan sosialisasi kegiatan kepada tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan pemuda melalui kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan.

MEKANISME BIMTEK/SOSIALISASI KEGIATAN KEMENTERIAN LHK TA 2022



Bimtek/Sosialisasi akan dilaksanakan di lapangan/lokasi kegiatan KLHK di Kabupaten/Kota



Bimtek/Sosialisasi akan dilaksanakan dalam 1 (satu) hari dengan kegiatan : pembukaan, pelaksanaan bimtek/sosialisasi, pemberian bantuan, dialog, dan lain-lain



Bimtek/sosialisasi dihadiri antara lain kelompok masyarakat, kelompok tani, tokoh masyarakat/tokoh adat, pemuda dan/atau kelompok Wanita, dan lain-lain



Masyarakat memperoleh bantuan transpot, uang saku dan konsumsi sesuai dengan ketentuan standar APBN



Pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi menerapkan protokol kesehatan

MENJADI BEKAL DAN MODAL SOSIAL

Dalam membentuk birokrasi yang responsif terhadap perubahan jaman sesuai P.15 Tahun 2021

P.15 TAHUN 2021

Transformasi untuk peran baru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menuntun perubahan dan memperkuat pesan pembangunan LHK

INTERNALISASI UUCK

Reformasi struktural yang mendorong kemudahan berusaha

PERUBAHAN PARADIGMA

Dari timber management ke lanskap management

MULTIUSAHA KEHUTANAN

Untuk menciptakan keseimbangan industri pengolahan bahan baku dan mendorong multiplier effect

SIRKULAR EKONOMI

Untuk mentransformasikan pengelolaan lingkungan hidup dan menciptakan wirausahawan kreatif

TRANSFORMASI ARSITEKTUR KINERJA PASCA P.15/2021



Transformasi arsitektur kinerja dibutuhkan untuk mengakomodir terbitnya Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No.	SEMULA		MENJADI	
	PROGRAM	UKE I/UKE II	PROGRAM	UKE I/UKE II
1	Program Dukungan Manajemen	Sekretariat pada 13 UKE I, Pusrenbang BP2SDM, Itwil 1-4, Itves	Program Dukungan Manajemen	Sekretariat pada 13 UKE I, Pusrenbang BP2SDM, Itwil 1-4, Itves
2	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	PHPL, PDASHL, KSDAE, PKTL, BP2SDM, PSKL, PHLHK	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	PHL, PDASRH, KSDAE, PKTL, BSI LHK, BP2SDM, PSKL, PHLHK
3	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	BP2SDM	Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	BP2SDM
4	Program Kualitas Lingkungan Hidup	PDASHL, KSDAE, PKTL, BLI, PHLHK, PSLB3, PPKL, BRGM	Program Kualitas Lingkungan Hidup	PDASRH, KSDAE, PKTL, BSI LHK, PHLHK, PSLB3, PPKL, BRGM
5	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PPI	Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	PPI, BSI LHK
6	Program Riset dan Inovasi IPTEK	BLI	-	-

Penyesuaian Pagu per Program TA 2022

(angka dalam ribu rupiah)

No	Program	SEB Pagu Anggaran	Penyesuaian	Keterangan
1	Program Dukungan Manajemen	3.383.341.015	3.371.770.135	BOP pada BP2SDM direalokasi ke Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan
2	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	2.673.958.414	2.697.067.489	Penambahan Anggaran dari BOP pada BP2SDM dan sebagian anggaran pada Program Riset dan Inovasi Iptek di BLI setelah menjadi BSI LHK
3	Program Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi	89.703.000	89.703.000	-
4	Program Kualitas Lingkungan Hidup	776.268.245	776.268.245	-
5	Program Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	171.348.612	185.612.585	Penambahan Anggaran dari sebagian anggaran pada Program Riset dan Inovasi Iptek di BLI setelah menjadi BSI LHK
6	Program Riset Dan Inovasi Iptek	25.802.168	0	Sesuai Perpres No. 92 tahun 2020 tentang KLHK fungsi litbangjirap akan diintegrasikan ke BRIN
TOTAL		7.120.421.454	7.120.421.454	

PENYESUAIAN PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN LHK 2022 MENURUT PROGRAM


(angka dalam ribu rupiah)

NO	UNIT KERJA ESELON I / PROGRAM	PROGRAM DUKUNGAN DUKUNGAN MANAJEMEN MANAJEMEN	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN HUTAN BERKELANJUTAN	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN VOKASI	PROGRAM KUALITAS KUALITAS LINGKUNGAN LINGKUNGAN HIDUP HIDUP	PROGRAM KETAHANAN KETAHANAN BENCANA BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM	PAGU ANGGARAN ANGGARAN TA 2022
1	Sekretariat Jenderal	496.014.419	-	-	-	-	496.014.419
2	Inspektorat Jenderal	71.370.448	-	-	-	-	71.370.448
3	Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari	152.345.563	174.635.914	-	-	-	326.981.477
4	Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai Dan Rehabilitasi Hutan	322.739.290	1.496.828.240	-	9.856.842	-	1.829.424.372
5	Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem	1.112.674.161	638.873.795	-	12.419.951	-	1.763.967.907
6	Ditjen Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan	245.770.567	122.822.001	-	17.245.771	-	385.838.339
7	Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	274.079.649	11.538.195	-	1.831.569	14.263.973	301.713.386
8	Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	175.187.944	19.446.474	89.703.000	-	-	284.337.418
9	Ditjen Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan	91.607.709	188.483.470	-	-	-	280.091.179
10	Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	186.922.075	44.439.400	-	93.976.600	-	325.338.075
11	Ditjen Pengendalian Perubahan Iklim	100.179.744	-	-	-	171.348.612	271.528.356
12	Ditjen Pengelolaan Sampah, Limbah, Dan Bahan Berbahaya Dan Beracun	71.169.483	-	-	175.165.635	-	246.335.118
13	Ditjen Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan	58.713.558	-	-	173.981.727	-	232.695.285
14	Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove	12.995.525	-	-	291.790.150	-	304.785.675
	JUMLAH	3.371.770.135	2.697.067.489	89.703.000	776.268.245	185.612.585	7.120.421.454

Pengusulan Pagu Tambahan Tahun 2022



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan


MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 Juni 2021

Nomor : S.225/MENLHK/SETJEN/SET.1/6/2021
Lampiran :
Hal : Usulan Kegiatan dan Tambahan Anggaran Mendukung Pengembangan UMKM TA 2022


Yth.
1. Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
2. Menteri Keuangan RI
di Jakarta

Menindaklanjuti Pertemuan Multi Pihak Pembahasan Isu Strategis Pengembangan UMKM pada 25 Mei 2021 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2022, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Kementerian LHK mendukung pengembangan UMKM, meliputi:
 - Pengembangan kapasitas kelompok masyarakat dalam rangka ekowisata;
 - Pengurangan sampah secara nasional melalui Bank Sampah;
 - Peningkatan kapasitas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS);
 - Fasilitasi dan Pembinaan SLVK UMKM Kehutanan;
 - Pembentukan Koperasi Kelompok Tani Hutan.
- Berkenaan dengan poin 1, Anggaran Tambahan yang dibutuhkan sebesar **Rp523.269.327.000,-** untuk mohon dapat diakomodir dalam Pagu Anggaran TA 2022.
- Terlampir kami sampaikan matriks rencana kinerja dan usulan tambahan anggaran untuk pengembangan UMKM TA 2022.

Demikian kami sampaikan, mohon pertimbangan dan dukungan Yth. Saudara Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI.

Terima kasih atas perkenan pertimbangan dan persetujuan serta kerjasama yang baik.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Dr./I/ Siti Nurbaya, M.Sc.

Tembusan disampaikan kepada:
1. Yth. Menko Bidang Perekonomian;
2. Yth. Menko Bidang Kematangan dan Investasi;
3. Yth. Menteri Sekretaris Negara RI;
4. Yth. Kepala Kantor Staf Presiden.


MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 Juni 2021

Nomor : S.226/MENLHK/SETJEN/SET.1/6/2021
Lampiran :
Hal : Usulan Kegiatan dan Tambahan Anggaran Major Project Food Estate TA 2022

Yth.
1. Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
2. Menteri Keuangan RI
di Jakarta

Menindaklanjuti Pertemuan Multi Pihak Pembahasan Major Project Food Estate pada 24 Mei 2021, dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2022, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Kementerian LHK mendukung percepatan Major Project Food Estate, meliputi:
 - Penyediaan kawasan hutan untuk Food Estate melalui: (a) perubahan peruntukan kawasan hutan, (b) pemanfaatan kawasan hutan dengan kawasan hutan untuk ketahanan pangan (KHKP), serta (c) pemanfaatan kawasan hutan dengan perhutanan sosial dan sistem multi usaha.
 - Penataan kapasitas lingkungan berupa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Pendampingan AMDAL, pemulihan dan pemanfaatan kawasan hidrologis gambut untuk produksi pangan, model usaha pelestarian sumber daya alam, serta mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
 - Pemanfaatan kawasan hutan untuk produksi pangan berupa agroforestry, pendampingan Kelompok Tani Hutan, pembinaan pasar dan industri rakyat.
 - Penataan koridor satwa untuk menjamin kelangsungan kehidupan liar.
- Berkenaan dengan poin 1, Anggaran Tambahan yang dibutuhkan sebesar **Rp1.107.227.372.000,-** untuk mohon dapat diakomodir dalam Pagu Anggaran TA 2022.
- Terlampir kami sampaikan matriks rencana kinerja dan usulan tambahan anggaran untuk Major Project Food Estate TA 2022 pada 5 (lima) Provinsi.


Demikian kami sampaikan, mohon pertimbangan dan dukungan Yth. Saudara Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan RI.

Terima kasih atas perkenan pertimbangan dan persetujuan serta kerjasama yang baik.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Dr./I/ Siti Nurbaya, M.Sc.

Tembusan disampaikan kepada:
1. Yth. Menko Bidang Perekonomian;
2. Yth. Menko Bidang Kematangan dan Investasi;
3. Yth. Menteri Sekretaris Negara RI;
4. Yth. Kepala Kantor Staf Presiden.


MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

18 Juni 2021

Nomor : S.240/MENLHK/SETJEN/SET.1/6/2021
Sifat : Penting, Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Penambahan Pagu Anggaran Kementerian LHK TA 2022

Kepada Yth.
1. Menteri Keuangan
2. Menteri PPN/Kepala Bappenas
Jakarta

Menindaklanjuti hasil Rapat Kerja Kementerian LHK dengan Komisi IV DPR RI pada hari Kamis, 10 Juni 2021, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

- Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas Pagu Indikatif Kementerian LHK TA 2022 sebesar Rp 7.120.421.454.000,00. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI menilai bahwa dalam rangka mendukung kinerja pembangunan dan perbaikan di sektor lingkungan hidup dan kehutanan perlu adanya penambahan anggaran terutama pada kegiatan yang mendukung perekonomian di tingkat tapak serta kegiatan yang mendukung peningkatan target penerimaan PNB bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
- Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi IV DPR RI mendukung atas usulan penambahan pagu lingkup Kementerian LHK TA 2022 sebesar **Rp 5.969.574.415.000,00** yang terbagi kedalam 7 (tujuh) kelompok kegiatan yaitu :
 - Major Project Food Estate sebesar Rp 1.107.227.372.000,00.
 - Major Project Pengembangan UMKM sebesar Rp 523.269.327.000,00.
 - Dukungan penerapan denda administratif bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp 48.565.000.000,00.
 - Pencegahan pencemaran lingkungan sebesar Rp 60.000.000.000,00.
 - Pemberian Akses Kelola Hutan Sosial (Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa) sebesar Rp 234.294.710.000,00.
 - Dukungan Pelaksanaan COP-4 Minamata sebesar Rp 100.004.997.000,00.
 - Dukungan Rehabilitasi Mangrove di 9 Provinsi (lokus Badan Restorasi Gambut dan Mangrove) sebesar Rp 3.896.213.009.000,00.Rincian detail setiap kelompok kegiatan terlampir.



Kementerian LHK sudah mengirimkan 3 (tiga) Surat kepada **Menteri Keuangan** dan **Menteri PPN/Bappenas** terkait dengan Usulan Penambahan Pagu Anggaran Kementerian LHK TA 2022.

USULAN PENAMBAHAN PAGU ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN LHK TA 2022

x (Rp. 1.000,-)

No	Usulan Kegiatan	Usulan Penambahan Pagu
1	Percepatan Program <i>Food Estate</i>	1.107.227.372
2	Pengembangan UMKM	523.269.327
3	Dukungan Penerapan Denda Administratif LHK	48.565.000
4	Pencegahan Pencemaran Lingkungan	60.000.000
5	Pemberian Akses Kelola Hutan Sosial (Jawa dan Luar Pulau Jawa)	234.294.710
6	Dukungan Pelaksanaan COP-4 Minamata	100.004.997
7	Dukungan Rehabilitasi Mangrove di 9 Provinsi (BRGM)*	3.896.213.009
8	Proyek Strategis Nasional Percepatan Penyelesaian Pengukuhan Kawasan Hutan	400.026.238
TOTAL		6.369.597.653

*Catatan :

1. Kegiatan Pemeliharaan Tahun 2021 dan Penanaman Po Tahun 2022
2. Telah disusun Rantek 50.000 Ha

PERMOHONAN PERSETUJUAN PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN LHK TA 2022

(x Rp.1.000,-)

NO	UNIT KERJA ESELON I	PAGU INDIKATIF TA 2022
1	SEKRETARIAT JENDERAL	496.014.419
2	INSPEKTORAT JENDERAL	71.370.448
3	DITJEN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI	326.981.477
4	DITJEN PENGENDALIAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN HUTAN LINDUNG	1.829.424.372
5	DITJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM	1.763.967.907
6	DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN	385.838.339
7	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI	301.713.386
8	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	284.337.418
9	DITJEN PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN	280.091.179
10	DITJEN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	325.338.075
11	DITJEN PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM	271.528.356
12	DITJEN PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH, DAN BAHAN BERACUN BERBAHAYA	246.335.118
13	DITJEN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	232.695.285
14	BADAN RESTORASI GAMBUT	304.785.675
TOTAL		7.120.421.454

BAGIAN 4

Usulan Program yang akan didanai DAK Berdasarkan Kriteria Teknis Komisi IV DPR RI



ARAH KEBIJAKAN DAK FISIK TA 2022

Tujuan: Meningkatkan pemerataan kuantitas dan kualitas layanan publik antar-daerah



Melanjutkan penguatan fokus kegiatan DAK yang **berdampak langsung** pada pertumbuhan ekonomi sebagai **respon dampak pandemi Covid-19**.



Melanjutkan penguatan atas **pemerataan layanan dan penyediaan infrastruktur dasar** di daerah.



Mempercepat pencapaian target Prioritas Nasional melalui kebijakan DAK Penugasan berbasis **Tematik**:

- **Pariwisata dan IKM**;
- **Food Estate** dan **Sentra Produksi Pangan**; dan
- **Konektivitas Kawasan** untuk Pembangunan Inklusif di wilayah **Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua**).



Mendukung pemulihan pelaku **UMKM dan Koperasi** melalui menu **DAK Fisik UMKM** (pelaksanaan UU Cipta Kerja) dan **DAK Fisik Perdagangan**.



Mempertajam penentuan lokasi prioritas berbasis sektoral dan regional.

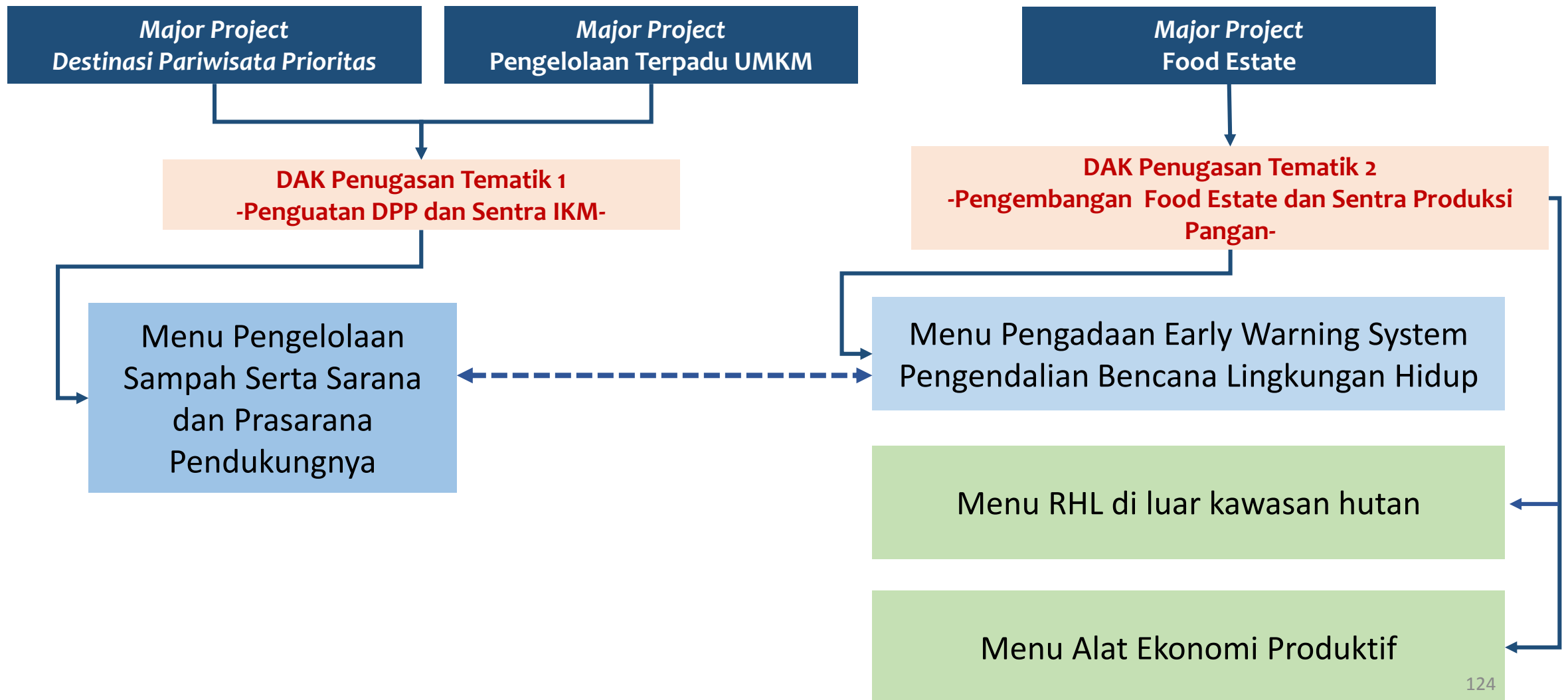


Memperkuat **sinergi** pemanfaatan DAK Fisik dengan kegiatan yang didukung oleh **sumber pendanaan lainnya (Belanja K/L, Pinjaman, KPBU)**.



Meningkatkan **akuntabilitas pengelolaan DAK Fisik** antara lain melalui penguatan pengelolaan berbasis kinerja secara berkelanjutan dan meningkatkan **kualitas pengawasan**.

Menu Kegiatan DAK Fisik Penugasan LHK Mendukung Tematik Program Tahun 2022

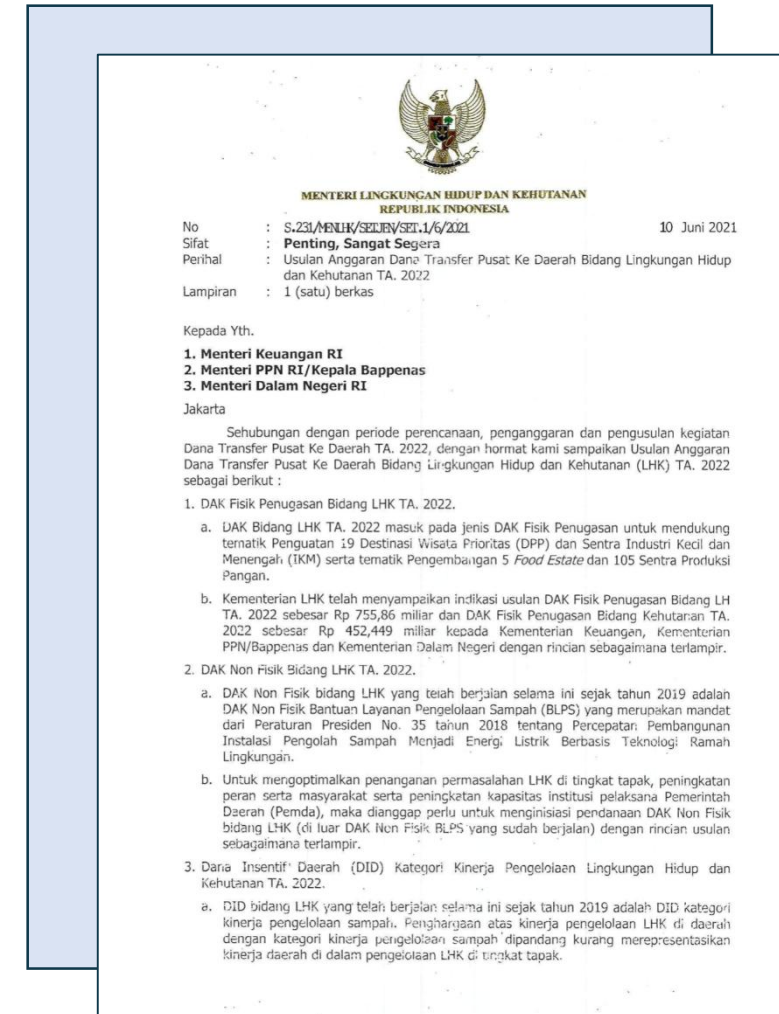


Usulan Dana Transfer Ke Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2022



“ Melalui surat nomor S.231/MENLHK/SETJEN/SET.1/6/2021 Tanggal 10 Juni 2021, Kementerian LHK menyampaikan usulan anggaran Dana Transfer Pusat ke Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) TA 2022 pada 3 (tiga) mekanisme yaitu :

1. DAK Fisik Penugasan Bidang LHK
2. DAK Non Fisik Bidang LHK
3. Dana Insentif Daerah (DID) Kategori Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Sasaran dan Target DAK Kehutanan TA. 2022

OUTCOME	IMMEDIATE OUTCOME	OUTPUT
<p>Bidang Kehutanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan luas lahan kritis (5 Food Estate dan 105 Sentra Produksi Pangan serta daerah) 2. Peningkatan produksi pangan alternatif dari kawasan hutan 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan <p>Penugasan Tematik II:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya cadangan pangan nasional 2. Meningkatnya produksi pangan 3. Meningkatnya kesejahteraan petani, 4. Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian, 5. Meningkatnya kualitas aksesibilitas menuju daerah pengembangan Food Estate 6. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana dalam pengembangan Food Estate 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah tanaman di lahan kritis dan mangrove yang direhabilitasi meningkat 2. Peningkatan sumber benih unggul 3. Tertampungnya jumlah sedimen 4. Peningkatan resapan air 5. Keterpakaian alat ekonomi produktif 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Luas hutan dan lahan di luar kawasan hutan 2. Bertambahnya Luas rehabilitasi hutan mangrove di luar Kawasan hutan 3. Bangunan konservasi tanah dan air yang terbangun 4. Jumlah sumber benih unggul yang dibangun 5. Tersedianya jumlah alat ekonomi produktif

Kriteria Lokasi Prioritas Bidang Kehutanan

- Lokasi prioritas dari DAK Bidang kehutanan adalah daerah (provinsi) yang termasuk dalam lokasi 5 *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan), 7 Provinsi Pendukung *Food Estate*, serta 19 provinsi sentra produksi perikanan yang memiliki keterkaitan geospasial (dalam satuan lanskap ekologis dan hidrologis), *on farm* (keterkaitan sarana produksi), serta *off farm* (konektivitas pasar);
- Pada 5 *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dan daerah pendukung, memperhatikan luasan lahan kritis dan area yang memiliki izin perhutanan sosial.

Target Output DAK Fisik Bidang Kehutanan TA. 2022

No.	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan	Indikasi Target 2022	Satuan Output
1.	Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif	Sarpras alat ekonomi produktif KTH Madya, KUPS Gold/Silver	703	unit
2.	Rehabilitasi hutan dan lahan di luar Kawasan hutan	1. Penanaman hutan rakyat	16.258	ha
		2. Rehabilitasi mangrove	267	ha
		3. Pembuatan DAM Penahan	1.004	unit
		4. Pembuatan <i>Gully plug</i>	1.980	unit
		5. Pembuatan Sumur resapan	3.302	unit
		6. Pembangunan sumber benih unggul (5 ha/unit)	8	unit

* Indikasi Alokasi DAK Fisik Kehutanan TA. 2022 sebesar Rp 350 miliar untuk 26 Dinas Kehutanan Provinsi (indikasi) yang merupakan lokus FE dan SPP

Sasaran dan Target DAK LH TA. 2022

OUTCOME	IMMEDIATE OUTCOME	OUTPUT
<p>Bidang Lingkungan Hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan circular economy pengelolaan persampahan 2. Peningkatan pemanfaatan data kualitas air sebagai pengambilan kebijakan di dalam pengembangan 5 food estate dan sentra produksi pangan <p>Penugasan Tematik II :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya cadangan pangan nasional 2. Meningkatnya produksi pangan di lokasi Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dan sentra produksi pertanian dan perikanan 3. Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan dan pembudidaya ikan di lokasi Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dan sentra produksi pertanian dan perikanan 4. Meningkatnya nilai tambah komoditas pertanian, kelautan dan perikanan di lokasi Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dan sentra produksi pertanian dan perikanan 5. Meningkatnya kualitas aksesibilitas menuju daerah pengembangan Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dan daerah pendukungnya 6. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana dalam pengembangan Food Estate (Kawasan Sentra Produksi Pangan) dan sentra produksi pertanian dan perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan persentase pengurangan timbulan sampah 26 % 2. Data kualitas air sungai yang tersedia dan terpublikasikan (data) 3. Data kualitas air dan merkuri yang tersedia dan termanfaatkan (data) 	<p>PENUGASAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah alat pemantauan kualitas air otomatis, kontinyu, dan online yang terpasang dan beroperasi dalam rangka mendukung Tematik 2 (225 unit) 2. Jumlah alat laboratorium pengujian kualitas air dan merkuri yang tersedia dan beroperasi dalam rangka mendukung Tematik 2 (45 paket)

Lokasi Prioritas Bidang LH

Bidang LH mendukung Tematik Penguatan Destinasi Wisata Prioritas dan Sentra IKM

- Kawasan pengembangan 19 Destinasi Wisata Prioritas (DPP) dan sentra Industri Kecil Menengah (IKM)
- Memiliki Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota tentang Kebijakan dan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada);
- Memiliki kapasitas pengelolaan sampah di atas atau sama dengan 70% dan di bawah 90%;
- Operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah menggunakan metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*) atau sekurang-kurangnya lahan urug terkendali (*controlled landfill*);
- Kab/kota yang memiliki indeks kualitas lingkungan hidup perkotaan/kebersihan masuk kategori baik dengan nilai Adipura > 73;

Bidang LH mendukung Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan

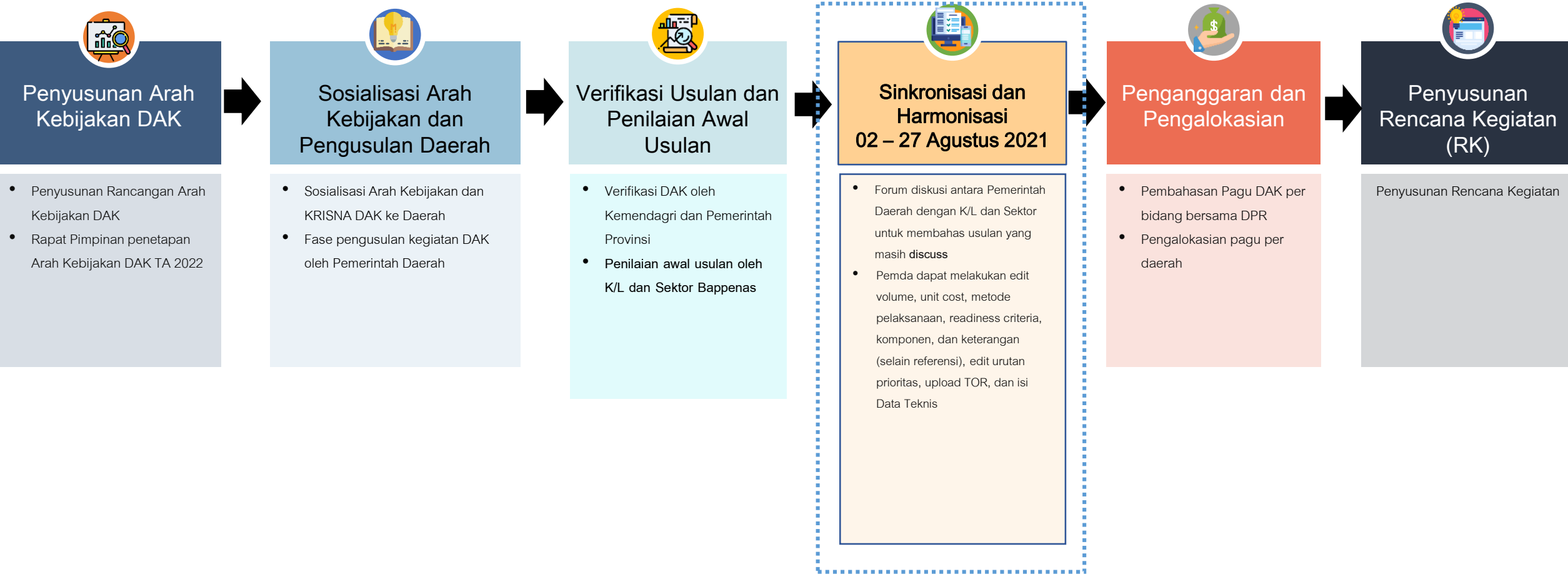
- Kawasan 5 lokasi pengembangan food estate dan 105 sentra produksi pangan
- Kab/Kota pada DAS Prioritas dan sungai tercemar berat
- Kab/Kota yang merupakan lokus renaksi penanganan Merkuri (sesuai PermenLHK No. 81/2019)
- Kab/Kota yang telah memiliki laboraorium lingkungan yang telah operasional dan terakreditasi atau uji profisiensi

Target Output DAK Fisik Bidang LH TA.2022

No	Menu Kegiatan	Rincian Menu Kegiatan	Indikasi Target 2022	Satuan Output
1.	<i>Early warning system</i> pengendalian lingkungan hidup bencana	1) Pengadaan alat/sistem pemantauan kualitas air secara kontinyu, otomatis dan online (Onlimo)	225	unit
		2) Peralatan laboratorium untuk uji kualitas air dan merkuri	45	paket

* Indikasi Alokasi DAK Fisik LH TA. 2022 sebesar Rp 350 miliar untuk 5 Dinas LH Provinsi dan 204 DLH Kab/Kota (indikasi) yang merupakan lokus FE dan SPP serta DPP dan SIKM

Tahapan Perencanaan-Penganggaran DAK Fisik TA. 2022



Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik Bidang LHK Tahun 2022 berlangsung pada 19 – 25 Agustus 2021

TINDAK LANJUT PENGUSULAN PROGRAM DAK PASCA RAPAT KERJA 23 JUNI 2021



MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

No : S.246/MENLHK/SETJEN/SET.1/6/2021 24 Juni 2021
Sifat : **Penting, Sangat Segera**
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Rapat Kerja Komisi IV DPR RI Dengan Menteri LHK
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

1. Menteri Keuangan RI
 2. Menteri PPN RI/Kepala Bappenas
 3. Menteri Dalam Negeri RI
- Jakarta

Menyusuli Surat Kami sebelumnya No. S.231/MENLHK/SETJEN/SET.1/6/2021 tanggal 10 Juni 2021 perihal sebagaimana pada pokok surat (salinan terlampir) dan tindak lanjut hasil Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri LHK pada tanggal 23 Juni 2021, dengan hormat kami sampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. DAK Fisik Penugasan Bidang LHK TA. 2022.
 - a. DAK Bidang LHK TA. 2022 masuk pada jenis DAK Fisik Penugasan untuk mendukung tematik Penguatan 19 Destinasi Wisata Prioritas (DPP) dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta tematik Pengembangan 5 *Food Estate* dan 105 Sentra Produksi Pangan.
 - b. Kementerian LHK telah menyampaikan indikasi usulan DAK Fisik Penugasan Bidang LHK TA. 2022 sebesar Rp 755,86 miliar dan DAK Fisik Penugasan Bidang Kehutanan TA. 2022 sebesar Rp 452,449 miliar kepada Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri dengan rincian sebagaimana terlampir.
2. DAK Non Fisik Bidang LHK TA. 2022.
 - a. DAK Non Fisik bidang LHK yang telah berjalan selama ini sejak tahun 2019 adalah DAK Non Fisik Bantuan Layanan Pengelolaan Sampah (BLPS) yang merupakan mandat dari Peraturan Presiden No. 35 tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
 - b. Untuk mengoptimalkan penanganan permasalahan LHK di tingkat tapak, peningkatan peran serta masyarakat serta peningkatan kapasitas institusi pelaksana Pemerintah Daerah (Pemda), maka dianggap perlu untuk menginisiasi pendanaan DAK Non Fisik bidang LHK (di luar DAK Non Fisik BLPS yang sudah berjalan) dengan rincian usulan sebagaimana terlampir.
3. Komisi IV DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran DAK Fisik Penugasan Bidang LHK TA. 2022 dan penambahan menu Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan pengelolaan Ekoriparian pada DAK Fisik Penugasan Bidang LH TA. 2022 dan usulan DAK Non Fisik Bidang LHK TA. 2022 (salinan laporan singkat terlampir).



Melalui surat nomor S.246/MENLHK/SETJEN/SET.1/6/2021 Tanggal 24 Juni 2021, Kementerian LHK menyampaikan usulan program DAK Fisik dan Non Fisik Tahun 2022 sebagaimana arahan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI untuk mendukung program-program unggulan yaitu :

1. Perhutanan Sosial
2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan
3. Peningkatan Ekonomi Sirkular Pengelolaan Sampah dan Limbah
4. Ekoriparian
5. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)

TANGGAPAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS ATAS SURAT MENTERI LHK NOMOR S.246



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Nomor : B. 529 /M.PPN/D.3/PP.01.01/07/2021
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Tanggapan atas Usulan Anggaran Dana
Transfer Pusat ke Daerah Bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA
2022

Jakarta, 30 Juli 2021

Yth. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
di Jakarta

Menanggapi usulan anggaran Dana Transfer Pusat ke Daerah Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2022 yang telah disampaikan melalui surat nomor S.231/MENLHK/SETJEN/SET.1/6/2021, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2022 masuk dalam Tematik Pengembangan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) serta Tematik Food Estate dan Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan. Berdasarkan hasil Pembahasan Pagu Indikatif DAK Fisik dan Nonfisik tahun 2022 antara Kementerian PPN/Bappenas dengan Kementerian Keuangan, disampaikan bahwa pagu indikatif untuk DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan TA 2022 masing-masing sebesar Rp350 miliar.
2. Kementerian LHK sebagai pengampu DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu mencermati kembali usulan yang telah disampaikan di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) berdasarkan pagu indikatif yang telah disampaikan oleh Kementerian Keuangan. Untuk DAK Fisik Penugasan bidang Lingkungan Hidup, khususnya pada menu Pengadaan Alat Pemantauan Kualitas Air Otomatis (Onlimo) agar dapat difokuskan pada kabupaten/kota di dalam kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yaitu: DAS Citarum; DAS Ciliwung; DAS Toba Asahan; DAS Musi; DAS Cisadane; DAS Serayu; DAS Bengawan Solo; DAS Brantas; DAS Saddang; DAS Jeneberang; DAS Limboto Bone Bolango; DAS Moyo; dan DAS Sekampung.
3. Sesuai UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, usulan pendanaan DAK Nonfisik Bidang Kehutanan dapat diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan. Adapun usulan pendanaan DAK Nonfisik bidang Kehutanan tersebut dapat difokuskan untuk penguatan pencapaian prioritas nasional pada menu DAK existing, yaitu berupa peningkatan kapasitas pendamping kehutanan provinsi dan tenaga teknis di KPH beserta masyarakat untuk melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), serta peningkatan kapasitas masyarakat/kelompok tani dalam mengembangkan usaha yakni eksplorasi produk, proses produksi akses permodalan, dan akses pemasaran produk kelompok.



Sesuai dengan Surat Nomor B.529/M.PPN/D.3/PP.01.01 /07/2021 tanggal 30 Juli 2021, Bappenas menyambut baik usulan DAK Fisik, DAK Non Fisik dan DID yang diusulkan oleh Menteri LHK. Namun melihat proses perencanaan dan penganggaran DAK untuk Tahun 2023 telah berjalan, sehingga Bappenas menyarankan untuk membahas seluruh usulan TKDD Kementerian LHK secara komprehensif dan terintegrasi sebagai usulan program TKDD Tahun 2023.

V. PENUTUP

Pada Raker ini kami mohon arahan dan masukan Yth Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI atas hal-hal yang kami sajikan dalam bahan rapat kerja ini.

Kami juga mohon dukungan dan persetujuan atas :

1. Pagu Anggaran Kementerian LHK TA 2022
2. Usulan Penambahan Pagu Alokasi Anggaran Kementerian LHK TA 2022

Terima kasih atas kesempatan yang berharga serta arahan dan persetujuan dari Yth Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Jakarta, 26 Agustus 2021
Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan RI



Terima Kasih